

LAPKIN

TAHUN 2021



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

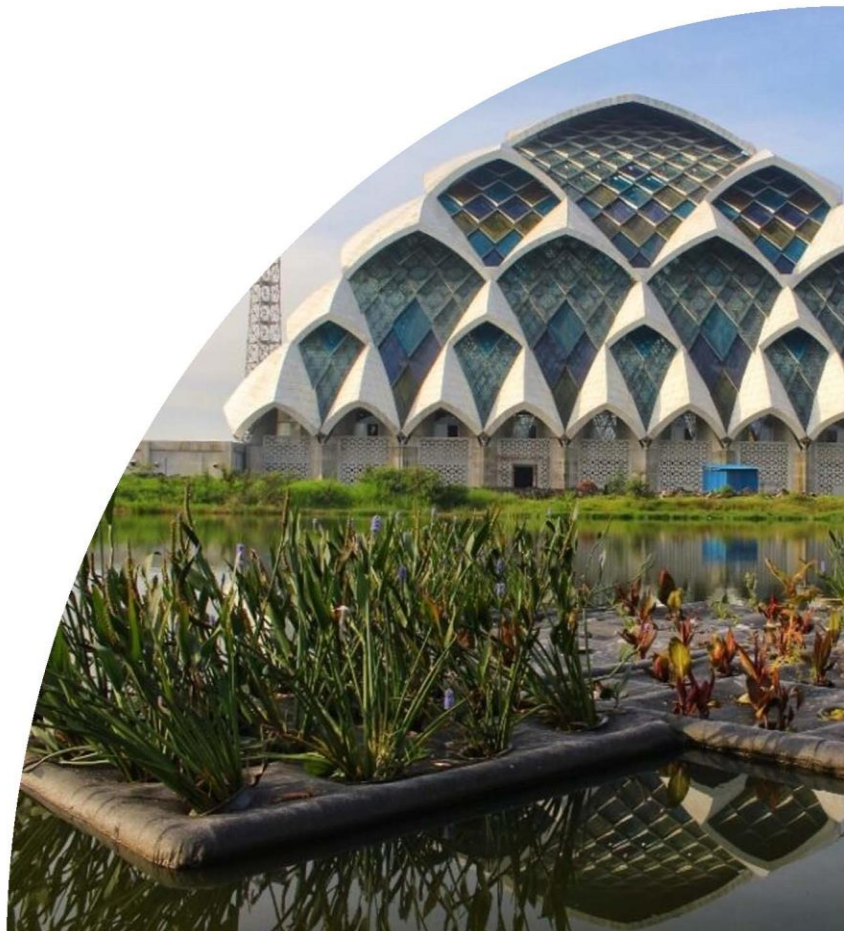




WBK BBPOM BANDUNG
JUARA!
GOES TO **WBBM**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Penanggung Jawab

Dra. Susan Gracia Arpan, M.Si

Pengarah

- ❖ Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si.
- ❖ Dra. Rera Rachmawati, Apt.
- ❖ Ir. Rusiana, M.Sc
- ❖ Endang Yaya Suwarya Anggadiharja, S.Si., Apt.
- ❖ Alex Sander, S. Farm, Apt, MH

Ketua

Dwi Kurniasari, S.Si., Apt.

Wakil Ketua

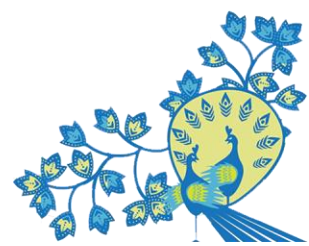
- ❖ Leni Maryati, S.Si., Apt., M.Si
- ❖ Agung Purwanto, S.Si., MLQAM.

Sekretaris

Siti Aminah, S.Si., Apt., M.Si.

Anggota

- ❖ Dra. Sri Prihatin, Apt., MM.
- ❖ Elly Yanti, ST
- ❖ Mia Dewi Amitasari, SE
- ❖ Puji Astuti, S.Si., Apt.
- ❖ R. Oppy Sophiawaty, S.Si., Apt.
- ❖ Sufiati, MSi.
- ❖ Vinnie, S.Si, Apt.
- ❖ Fitria Augustin Trirahmadani, S.Si., Apt.
- ❖ Tri Winarsih, S.Si., Apt.
- ❖ Tarita Kamardi, ST
- ❖ Reni Novianti, S.Si, Apt
- ❖ Ayi Mahfud Sidik, S.Si, Apt
- ❖ Arief Nugroho, S.Farm., Apt.
- ❖ Agung Kurniawan, A.Md.
- ❖ Lutfi Rizki Andriansyah, S.Sos.

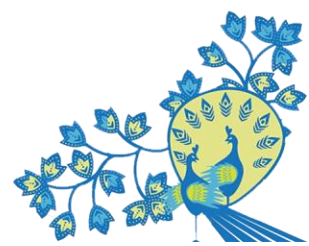


KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 dapat diselesaikan. Sebagai instansi pemerintah yang memiliki komitmen untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, BBPOM di Bandung telah melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 maka disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 ini.

LAPKIN disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Addendum Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar/Balai POM serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Laporan Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 memiliki dua fungsi utama yaitu (1) merupakan sarana bagi Balai Besar POM di Bandung untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (2) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*), baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka BPOM telah melakukan reviu terhadap Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung perlu melakukan reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024, sehingga berbagai kebijakan dan strategi yang ditetapkan BPOM dapat teroperasionalisasikan dan diimplementasikan dengan baik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.02.12A.12A5.12.21.110 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024. Selain itu, telah dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 berdasarkan hasil reviu Rencana Strategis tersebut. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis, kendala dan permasalahan yang terjadi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam PK dan RAPK Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021, namun dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik maka target kinerja dapat dicapai.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada pemberi mandat dan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung pada masa yang akan datang.



Bandung, Februari 2022

Kepala Balai Besar POM di Bandung

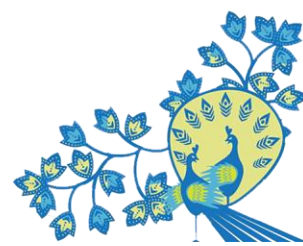


Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i		
DAFTAR ISI	iv		
RINGKASAN EKSEKUTIF	v		
<hr/>			
Bab 1	1.1	LATAR BELAKANG	2
Pendahuluan	1.2	GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
	1.3	STRUKTUR ORGANISASI	5
	1.4	ISU STRATEGIS	5
<hr/>			
Bab 2	2.1	REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	17
Perencanaan Kinerja	2.2	RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021	24
	2.3	PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021	26
	2.4	RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2021	28
	2.5	METODE PENGUKURAN	29
<hr/>			
Bab 3	3.1	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	32
Perencanaan Kinerja	3.2	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021	209
<hr/>			
Bab 4	4.1	KESIMPULAN	220
Perencanaan Kinerja	4.2	SARAN	221
<hr/>			
LAMPIRAN	223		



RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya selama tahun 2021. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Bandung selama tahun 2021 yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 ditetapkan. Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, yaitu :

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Balai Besar POM di Bandung dalam merumuskan sasaran kegiatan, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021, telah ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Balai Besar POM di Bandung.

Pengukuran kinerja yang tercantum dalam dokumen Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Balai Besar POM di Bandung



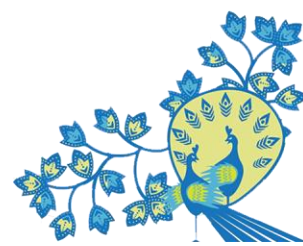
yang telah ditetapkan pada tanggal 08 November 2021. Perjanjian kinerja tersebut merupakan ikhtisar Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024 yang telah dilakukan reviu dan telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.02.12A.12A5.12.21.110 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024.

Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2021 sebanyak 11 (sebelas) sasaran kegiatan, Dari sasaran kegiatan tersebut diukur berdasarkan 29 (dua puluh sembilan indikator) indikator sasaran kegiatan. Dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) indikator sasaran kegiatan dengan kriteria **Sangat Baik**, 7 (tujuh) indikator sasaran kegiatan dengan kriteria **Baik**, 2 (dua) indikator sasaran kegiatan dengan kriteria **Cukup** dan 1 (satu) indikator sasaran kegiatan dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

Pada tahun 2021, BBPOM di Bandung melaksanakan 19 (sembilan belas) Rincian Output (RO) dengan nilai TE masuk kategori Efisien. Dari data perhitungan tingkat efisiensi, nilai TE tertinggi adalah KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM (TE=0,30). Berdasarkan perhitungan Nilai TE, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan BBPOM di Bandung pada tahun 2021 terlaksana secara efisien (TE=0.02).

Pada tahun 2021, anggaran Balai Besar POM di Bandung sebesar Rp.57.089.510.000,-. Namun, pada Bulan Mei 2021 dilakukan revisi penghematan tunjangan kinerja THR dan Gaji ke 13 BBPOM di Bandung sebesar Rp. 1.654.911.790,-. Sehingga anggaran BBPOM di Bandung menjadi Rp. 55.434.598.000,-. Dan pada Bulan Juli 2021 dilakukan *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, pada pemotongan APBN-P Tahap III TA 2021 untuk BBPOM di Bandung dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 1.875.829.000,- dan pemotongan APBN-P Tahap IV TA 2021 untuk BBPOM di Bandung dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 3.068.000.000,-. Sehingga anggaran BBPOM di Bandung berkurang menjadi Rp. 50.490.769.000,-, dengan rincian: (1) Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.322.445.000,-; dan (2) Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.168.324.000,-. Pada tahun 2021, realisasi berdasarkan Omspan sebesar Rp. 50.258.696.474,- (99,54%), namun berdasarkan SAS sebesar Rp. 50.315.182.634,- (99,65%)

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Balai Besar POM di Bandung untuk dapat memperlihatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.



Bandung, Februari 2022

Kepala Balai Besar POM di Bandung



Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si





BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI
- 1.3 STRUKTUR ORGANISASI
- 1.4 ISU STRATEGIS

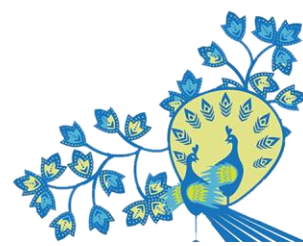
1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2021 dan tahun kedua dari Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Balai Besar POM di Bandung.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.



Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

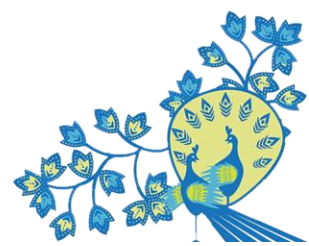
Sebagai tindak lanjut, maka diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM sebanyak 21 (dua puluh satu); b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM sebanyak 13 (tiga belas); dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM sebanyak 39 (tiga puluh sembilan).

KEDUDUKAN

UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

TUGAS

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Balai Besar POM di Bandung mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



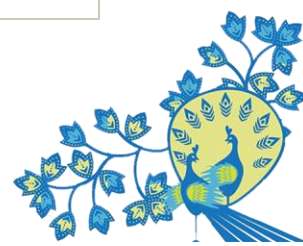
FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

TABEL 1.1
WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

UPT	Kedudukan	Wilayah Kerja
BBPOM di Bandung	Alamat Jl. Pasteur No. 25 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Bandung 2. Kabupaten Subang 3. Kabupaten Cianjur 4. Kabupaten Garut 5. Kabupaten Bandung Barat 6. Kabupaten Majalengka 7. Kabupaten Sumedang 8. Kabupaten Bandung 9. Kabupaten Karawang 10. Kota Bekasi 11. Kabupaten Bekasi 12. Kabupaten Sukabumi 13. Kota Cimahi 14. Kota Sukabumi 15. Kabupaten Purwakarta 16. Kabupaten Cirebon 17. Kota Cirebon, 18. Kabupaten Indramayu 19. Kabupaten Kuningan



1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Bandung disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diundangkan pada tanggal 7 September 2020.

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BBPOM DI BANDUNG



1.4 ISU STRATEGIS

Sering dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada tahun kerja 2021 maka muncul beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja, antara lain:

ISU INTERNAL

Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.



Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPOM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Perpres tersebut di atas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan fungsi penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diberi kewenangan intelijen dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sumberdaya Manusia

Balai Besar POM di Bandung memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK).

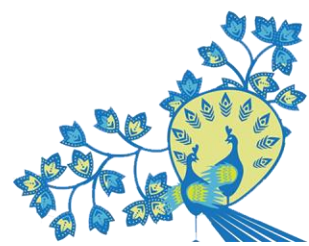
Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). sarana dan prasarana kerja; 2). Alat Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari Ruang kerja, Ruang penunjang dalam gedung, Ruang/ fasilitas penunjang luar gedung, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan operasional.

Luas lahan Balai Besar POM di Bandung seluas 4.268 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 5.686 m². Bangunan yang ada selain memiliki fungsi sebagai area perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Pemenuhan terhadap kebutuhan sarana prasarana adalah 78,1% yang terdiri dari pemenuhan alat laboratorium 61,7% dan pemenuhan sarana prasarana kerja 94,6%, sehingga masih diperlukan tambahan untuk penambahan alat laboratorium.

Peralatan Laboratorium

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium Balai Besar POM di Bandung telah mendapat sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji dari Komite Akreditasi Nasional dengan nomor sertifikat LP-173-IDN. Ilmu dan teknologi terus berkembang, begitu pula dengan proses pengujian. Untuk itu, laboratorium harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara optimal. Untuk melakukan pengujian, laboratorium telah dilengkapi dengan peralatan yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya. Namun, dibandingkan terhadap Standar Minimum Laboratorium Balai Besar POM di Bandung, masih terdapat gap sehingga



pengadaan peralatan laboratorium terus dilakukan. Pada tahun 2021, pemenuhan Standar Minimum Alat Laboratorium adalah sebesar 71,55%.

ISU EKSTERNAL

Secara garis besar, isu bersifat eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandung adalah sebagai berikut :

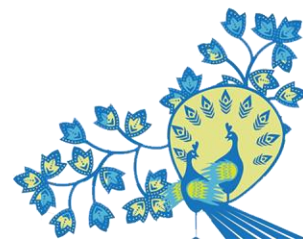
Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (IV) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Sebagaimana tertuang dalam PP no.72 Tahun 2012 tersebut, maka Balai Besar POM di Bandung sebagai salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi, dan makanan, dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan baik *pre-market* maupun *post-market* Obat dan Makanan sehingga dapat menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Balai Besar POM di Bandung, yaitu melalui :

- a) Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar mulai dari pengawasan, pelaksanaan regulasi, pembinaan, penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, serta;
- b) Upaya terkait kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan.

Fokus sistem kesehatan nasional tahun 2021 dengan berkaca pada terjadinya Pandemi covid-19 menurut Bappenas akan menjadi salah satu *major project* dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Adapun fokus penguatan Sistem Kesehatan Nasional di 2021 antara lain penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS), penguatan ketahanan kesehatan dan penguatan sumber daya melalui pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan. Balai Besar POM di Bandung sebagai UPT dari Badan POM memegang peranan penting di ketiga fokus penguatan ini, diantaranya dalam memberikan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) untuk mengkampanyekan GERMAS pada masyarakat, memperkuat sistem



pengawasan dengan penguatan kapasitas dan jejaring laboratorium serta pengawalan dalam pemenuhan vaksin dan obat, termasuk vaksin covid-19

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan demand terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Tingginya permintaan obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran Balai Besar POM di Bandung akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB dan post-market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar. Seiring dengan penerapan JKN, akan banyak industri farmasi yang harus melakukan resertifikasi CPOB yang berlaku 5 (lima) tahun. Dari sisi penyediaan (supply side) JKN, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian BPOM harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji dan inspektur), serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan naiknya beban kerja.

Implementasi JKN dalam menghadapi Pandemi covid-19 pada tahun 2020 juga memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada pengawasan Obat dan Makanan. Meningkatnya kapasitas produksi industri farmasi maupun obat tradisional yang menghasilkan Vitamin, Suplemen Kesehatan, Obat Tradisional, juga industri kosmetik yang menggunakan fasilitas produksinya bersamaan dengan produksi hand sanitizer menyebabkan dampak langsung pada Badan POM termasuk Balai Besar POM di Bandung sebagai UPT dari Badan POM. Sementara dampak tidak langsungnya ke masyarakat membuat Balai Besar POM di Bandung harus lebih giat dalam memberikan KIE mengenai



cara konsumsi vitamin, obat tradisional, dan suplemen kesehatan yang benar; karena pastinya konsumsi produk ini akibat pandemi meningkat cukup signifikan.

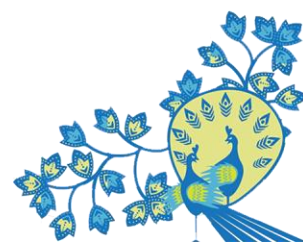
Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan. Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional yang memungkinkan terbentuknya suatu kawasan bebas perdagangan. Hal ini membuka peluang produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional. Oleh karena itu diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu meningkatkan daya saing terhadap produk luar negeri. Hal tersebut juga berdampak pada pertumbuhan sektor industri Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2021 terdapat 88 industri farmasi, 54 industri Obat Tradisional, 24.291 industri PKRT, 187 industri kosmetik, 1802 industri suplemen makanan, 104 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), 141 industri alat kesehatan dan 926 Industri Pangan. Hal tersebut merupakan potensi bagi Balai Besar POM di Bandung dalam pemantapan stakeholder untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha.

Pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan . Hal ini menjadi peluang bagi Balai Besar POM di Bandung untuk ikut serta dalam meningkatkan daya saing industri tersebut dalam menghadapi pasar global. Namun disisi lain, timbul permasalahan era perdagangan bebas yaitu masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Apabila dibandingkan pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan dengan SDM yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung, sampai dengan tahun 2014 presentase pemenuhan SDM sesuai beban kerja hanya 76,97%. Sedangkan pemenuhan SDM sesuai beban kerja tahun 2015 berdasarkan Renstra tahun 2015-2019 hanya sebesar 44,48 %. Jumlah SDM yang tidak sebanding ini menjadi tantangan yang sangat besar dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Pandemi covid-19 yang kemudian mendatangkan vaksin dari Tiongkok juga merupakan bukti bahwa Badan POM terlibat dalam komitmen internasional, yang akhirnya menantang UPT-nya termasuk Balai Besar POM di Bandung untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM-nya terutama dalam hal pengawalan distribusi vaksin dan pengujian sampel swab antigen dan RT-PCR.



Berdasarkan hal ini, Balai Besar POM di Bandung harus menyusun strategi agar kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dapat terlaksana secara optimal, dan juga menerapkan sistem manajemen kinerja secara optimal sehingga lebih efektif dan efisien. Namun demikian, Balai Besar POM di Bandung memiliki kelebihan yang dapat dipergunakan, yaitu adanya pedoman pengawasan yang jelas sebagai acuan dan standar baku dalam pengawasan atas Obat dan Makanan. Selain itu, Balai Besar POM di Bandung telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 dan SNI ISO/IEC 17025: 2017.

Perubahan Iklim

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia. Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu negara ke negara lain.

Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCCC-UI) tahun 2013, dalam pelaksanaan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vektor yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dan penyakit batu ginjal. Di dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023, salah satu misinya memiliki tujuan meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Hal ini merupakan tindak lanjut pemerintah daerah dalam mencapai target yang ditetapkan dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) di sektor kesehatan yaitu diantaranya mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air dan penyakit menular lainnya. Untuk mencapai target tersebut pasti akan diimbangi dengan peningkatan jenis dan jumlah obat terkait penyakit-penyakit tersebut, dan ini semakin nyata dengan terjadinya Pandemi covid-19 sejak 2020 yang lalu.

Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, diperlukan peran dari Balai Besar POM di Bandung dalam mengawasi peredaran varian obat baru dari jenis penyakit tersebut. Selain dari obat kimia, varian obat baru ini juga diikuti pula dengan varian obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar



di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari Balai Besar POM di Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredaran obat tersebut.

Perubahan Demografi, Ekonomi dan Sosial Masyarakat

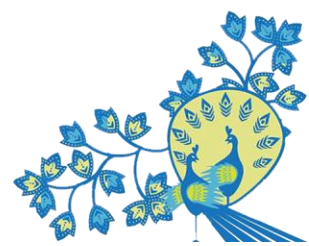
Kemajuan dari ekonomi suatu provinsi dapat dilihat dari indikator makro-ekonomi, yakni pendapatan per kapita. Pada tahun 2018 PDRB per kapita atas harga berlaku Provinsi Jawa Barat sebesar 40,30 juta rupiah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 37,18 juta atau naik sebesar 8,41 persen. Persentase jumlah penduduk miskin Jawa Barat juga mengalami penurunan dari tahun 2017 (7,86%) menjadi tahun 2018 (7,27%).

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat yang secara teori dan fakta, bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memiliki standar dan kualitas. Faktor tersebut dapat menyebabkan kecenderungan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan dapat menimbulkan penurunan derajat kesehatan.

Pada tahun 2020, penduduk Jawa Barat berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 yaitu sebanyak 48,27 juta jiwa, menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia dalam hal jumlah penduduk terbesar. Terdiri atas laki-laki sebanyak 24,51 juta jiwa dan perempuan sebanyak 23,76 juta jiwa (Sumber: Badan Pusat Statistik - Jawa Barat dalam Angka 2020), menjadi tantangan bagi BBPOM di Bandung dalam perannya memberikan informasi dan edukasi publik mengenai produk Obat dan Makanan yang aman. Pertumbuhan jumlah penduduk dan bergesernya pola hidup masyarakat umum menjadi tantangan Balai Besar POM di Bandung untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin banyak jenis dan jumlahnya. Hal tersebut juga harus disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas edukasi terhadap masyarakat di Provinsi Jawa Barat mengenai produk Obat dan Makanan yang aman.

Tuntutan masyarakat

Tuntutan masyarakat terhadap pangan yang semula hanya pada aspek harga, rasa dan tren gaya hidup, pada saat ini telah bergeser lebih kepada keamanan dan mutu pangan. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan semakin banyaknya lembaga perlindungan konsumen serta media informasi baik offline maupun online yang memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam memilih produk serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen.



Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Sistem Desentralisasi ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Bandung berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintahan pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dengan pihak swasta.

Disisi lain, pengakuan stakeholder akan keberadaan Balai Besar POM di Bandung semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena Balai Besar POM di Bandung tidak hanya telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal tetapi juga berperan aktif didalam berbagai forum instansi lainnya dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa diantaranya adalah Badan POM termasuk Balai Besar POM di Bandung sebagai Kelompok Kerja Keamanan Pangan Nasional di dalam Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT), Program Pembinaan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, Program Pasar Aman dsari Bahan Berbahaya, Program Gerakan Keamanan Pangan Desa, dan sebagai narasumber dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Balai Besar POM di Bandung juga melayani pengujian produk Obat dan Makanan dari pihak ketiga. Secara umum, pengujian dari pihak ketiga berasal dari instansi pemerintah dan masyarakat umum, antara lain kepolisian dan pelaku usaha. Hal tersebut menjadi peluang, khususnya bagi Laboratorium Balai Besar POM di Bandung dalam menjalin kerjasama dengan stakeholder sekaligus mendukung peningkatan daya saing pelaku usaha.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan teknologi, baik teknologi produksi, distribusi dan pengembangan jenis produk, akan membawa dampak perubahan secara terus-menerus pada produk Obat dan Makanan. Hal ini harus menjadi perhatian dan antisipasi Balai Besar POM di Bandung untuk terus berinovasi dalam menghadapi perkembangan dan tuntutan yang ada. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai Besar di Bandung untuk dapat melakukan pelayanan online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Namun, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Bandung terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan



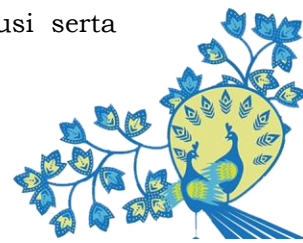
Makanan yang dilakukan secara online, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi.

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan dan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan manajemen dan juga kegiatan teknis laboratorium. Laboratorium merupakan tulang punggung dari pengawasan Obat dan Makanan, oleh karenanya diperlukan sarana dan prasarana laboratorium yang lengkap mulai dari metode analisa, baku pembandingan, reagensia sampai kepada peralatan yang memadai. Peralatan yang dimiliki masih belum memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan. Adalah fakta bahwa kemampuan dan kapasitas uji laboratorium Badan POM, termasuk Balai Besar POM di Bandung, belum memadai jika dibandingkan dengan beban kerja pengawasan Obat dan Makanan. Dengan perkembangan teknologi saat ini, tentu juga terkait erat dengan perkembangan teknologi di bidang pengujian, sehingga menjadi suatu tantangan tersendiri untuk laboratorium Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada terkait dengan produk dan metode analisis.

Implementasi Program Fortifikasi Pangan

Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi diantaranya dengan dukungan fortifikasi mikronutrien penting. Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit, mengingat juga masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurang yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh Balai Besar POM di Bandung. Hasil pengawasan garam beryodium dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015– 2019) menunjukkan tren penurunan terhadap hasil uji yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu pada tahun 2015 jumlah sampel garam yang TMS sebesar 85% dan hingga tahun 2017 menjadi 81,62%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan signifikan menjadi 54,82%. Sedangkan hasil pengawasan tepung terigu dan minyak goreng sawit dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2015- 2019) menunjukkan relatif semua sampel yang diuji memenuhi syarat (MS).

Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (compliance) maupun surveilan keamanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana distribusi serta



penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan. Kegiatan lainnya yaitu pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.

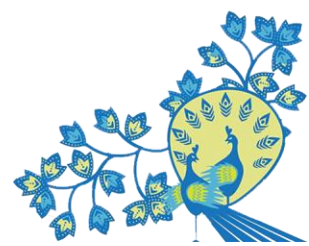
Jejaring Kerja

Balai Besar POM di Bandung menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu Balai Besar POM di Bandung mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM, maka Balai Besar POM di Bandung sebagai bagian dari beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki BPOM yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, *Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed* (INRASFF), Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah), *Indonesia Criminal Justice System* (ICJS), dan Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI). Di tingkat regional maupun internasional, BPOM memiliki jejaring kerja dengan *ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed* (ARASFF), *World Health Organization* (WHO), *Codex Alimentarius Commission*, Forum Kerjasama Asia Pasifik dalam harmonisasi regulasi bidang obat (RHSC), *ASEAN References Laboratories* (AFL), *Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme* (PIC/S), dan *International Crime Police Organization Interpol*.

Balai Besar POM di Bandung melakukan pengembangan dan penguatan program pemberdayaan masyarakat melalui Food Safety Masuk Desa, PJAS, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Selain itu, dilakukan pengembangan jejaring komunikasi melalui peningkatan komunikasi sosial melalui kegiatan Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) bersama tokoh masyarakat serta Iklan Layanan Masyarakat.

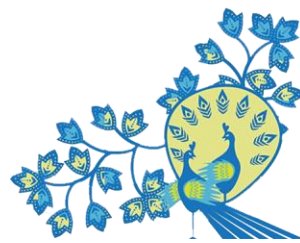
Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM di Bandung melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai Besar POM di Bandung merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB dengan membentuk tim POKJA dalam area Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai wujud pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).



Pandemik Covid-19

Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi, termasuk Provinsi Jawa Barat, Setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakhiri pembatasan social berskala besar (PSBB) pada bulan Juni 2020 dan mulai menerapkan tatanan new normal, penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Jawa Barat alami peningkatan yang cukup tajam. Hal ini menjadi tantangan besar bagi BBPOM di Bandung dapat turut berkontribusi dalam percepatan penanganan covid-19 dan menjalankan tugas pengawasan Obat dan Makanan dalam masa pandemik-Covid-19 dengan membuat berbagai inovasi seperti layanan publik berbasis digital.





BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021

2.4 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2021

2.5 METODE PENGUKURAN

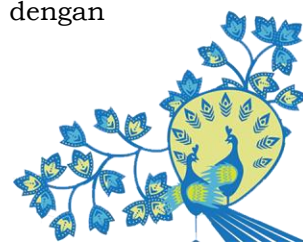
2.1 REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Rencana B POM Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 serta dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja B POM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang B POM serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh B POM pada tahun 2020-2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia. Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi.

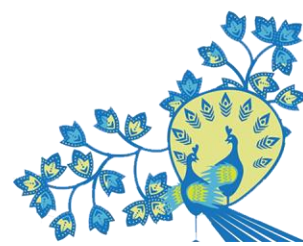
Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan B POM Tahun 2020-2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi B POM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai *impact assessment*.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis B POM yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan



adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Jawa Barat sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka BPOM telah melakukan reviu terhadap Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung perlu melakukan reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024, sehingga berbagai kebijakan dan strategi yang ditetapkan BPOM dapat teroperasionalisasikan dan diimplementasikan dengan baik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.02.12A.12A5.12.21.110 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024. Selain itu, telah dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 berdasarkan hasil reviu Rencana Strategis tersebut. Berdasarkan hasil reviu ***Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024***, karena tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan BPOM. Visi, Misi dan Tujuan BPOM masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:



VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Balai Besar POM di Bandung telah menetapkan Visi 2020-2024 yaitu:

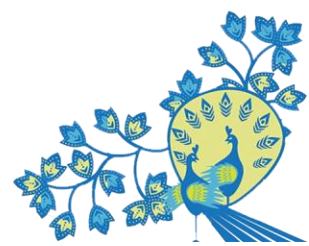
“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

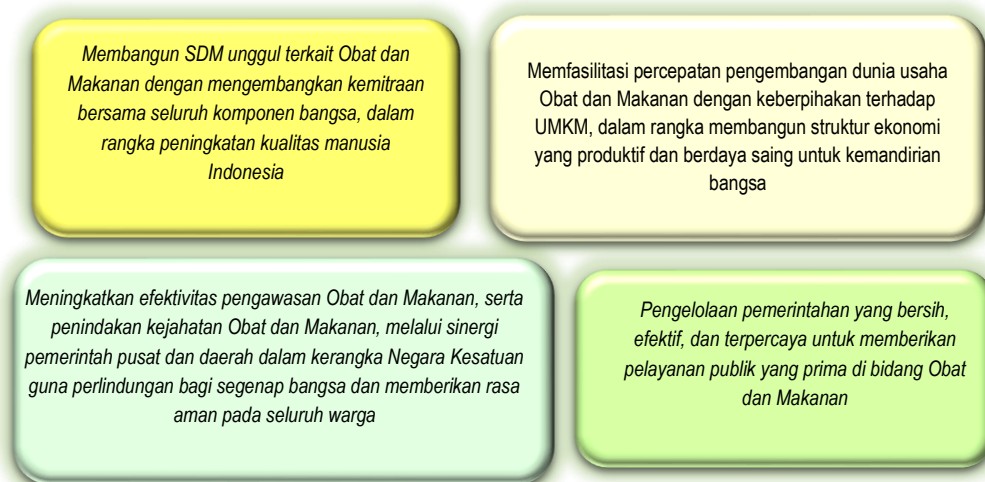


MISI

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Balai Besar POM di Bandung sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara *full spectrum* pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex spesialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindaklanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*.

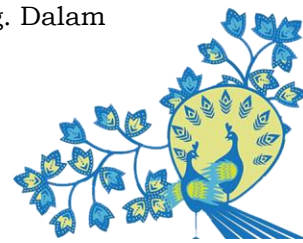
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Balai Besar POM di Bandung sebagai berikut:



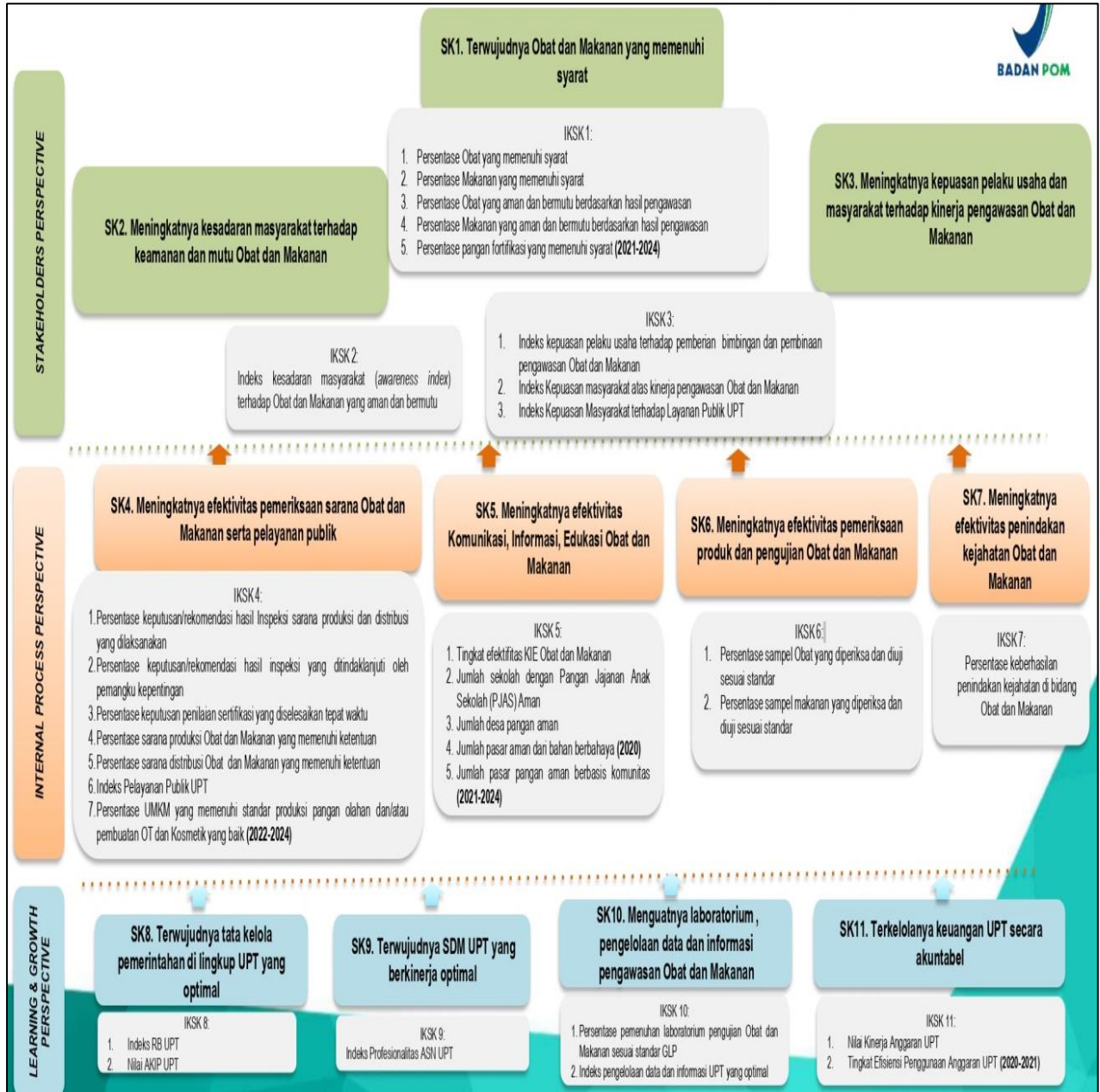
Gambar 2.1 Misi Balai Besar POM di Bandung 2020-2024

SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Bandung dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Bandung. Dalam



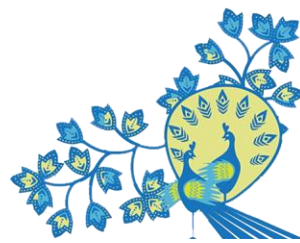
kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Bandung akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Balai Besar POM di Bandung yang berdasarkan hasil reuiu dirubah menjadu sebagai berikut



Gambar 2.2 Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Bandung

Sumber: Konsensus BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, BBPOM di Bandung menetapkan sasaran Kegiatan, indikator kegiatan dan target yang telah dilakukan reuiu, perubahannya menjadi sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 berikut:

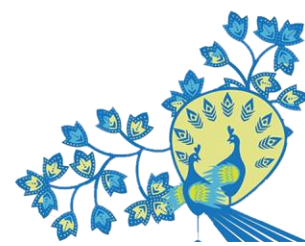


Tabel 2.1
Perubahan
Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target BBPOM di Bandung
Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Target Kinerja (Menjadi)			
	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE									
SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3	97	97.5	98	98.5
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	80	82	84	86
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94	95	95.5	96	94
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78	70	72	74	76
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat						70	72	74	76
SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	75	78	81	83	71	74	77	80
SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	85	86	87,5	89	91.1	92.3	93.4	94.6
8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83	77.83	80.22	82.62	85.01
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	88,5	90,5	91	91,5	92	89,50	90,50	91,00	92,00
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95	96	97	98	99
11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,9	63,9	70,9	78	85	64	71	78	85
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97	88	91	94	97
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70	57	61	66	70
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	78	80	81	82	74	76	78	80
15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,7	3,75	3,81	4,16	4,51	4,29	4,38	4,46	4,55



Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Target Kinerja (Menjadi)			
	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
16. Persentase UMKM yang memenuhi standar						-	77	79	81
SK5. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83	92	93.8	95.7	97.6
18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	42	62	82	104	42	76	112	150
19. Jumlah desa pangan aman	9	19	28	37	47	19	28	37	47
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	8	13	18	23	8	13	18	23
SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94	100	100	100	100
22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	84	86	88	90	100	100	100	100
SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
23. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74	78	82	86	90	65	67	69	71
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal									
24. Indeks RB BBPOM di Bandung	91	92	93	94	95	82.8	83.8	84.8	85.8
25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81	85	90	91	92	83	85.5	88	90.5
SK9. Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal									
26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	77	80	82	85	79	80	81	82
SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan									
27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	79	81	85	90	79	84	89	94
28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3	2	2.25	2.5	3
SK11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel									
29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93	94	95	96	97	95.1	95.3	95.6	95.9
30. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (95%)	-	-	-

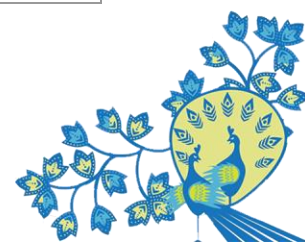


2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

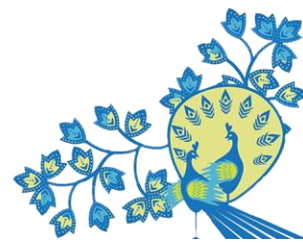
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2021 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.02.12A.12A5.12.21.110A Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar POM di Bandung Nomor. HK.02.02.103.1031.06.20.1060B tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Perubahan Rencana Kinerja Tahunan BBPOM di Bandung
Tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	97
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	95
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	70
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	70
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75	71
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85	91.1
		8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74	77.83
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	90,5	89,50
4.	Meningkatnya efektivitas	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana	89	96



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	produksi dan distribusi yang dilaksanakan		
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,9	64
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	88
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	57
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	74
		15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,75	4,29
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	16. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	73	92
		17. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	42	42
		18. Jumlah desa pangan aman	19	19
		19. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8	8
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	20. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	100
		21. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	84	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	22. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78	65
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	23. Indeks RB BBPOM di Bandung	92	82.8
		24. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	85	83
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	25. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	77	79
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	26. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79	79
		27. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2	2
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	28. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	94	95.1
		29. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisiensi (92%)	Efisiensi (95%)

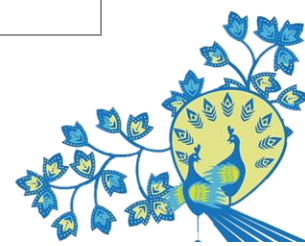


2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021

Setelah penyerahan DIPA Balai Besar POM di Bandung Tahun Anggaran 2021, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berdasarkan RKT Tahun 2021 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp. 57.089.510.000. Namun dengan adanya Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Perubahan RKT Tahun 2021, maka Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 telah dilakukan perubahan berdasarkan dokumen tersebut diatas ditetapkan pada tanggal 08 November 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 50.490.769.000,-, sebagaimana tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja BBPOM di Bandung
Tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	97
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	94
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	70
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	70
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	75	71
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85	91.1
		8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74	77.83
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	90,5	89,50
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	96
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,9	64



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	88
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	57
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78	74
		15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,78	4,35
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	16. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,18	92
		17. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	42	42
		18. Jumlah desa pangan aman	19	19
		19. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8	8
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	20. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	100
		21. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	84	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	22. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78	65
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	23. Indeks RB BBPOM di Bandung	92	82.8
		24. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	85	83
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	25. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	77	79
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	26. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79	79
		27. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2	2
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	28. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	94	95.1
		29. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisiensi (92%)	Efisiensi (95%)

Kegiatan :

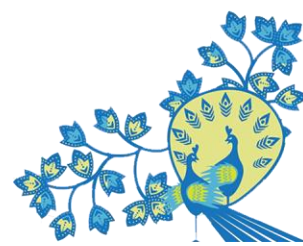
Anggaran (Semula)

Anggaran (Menjadi)

1. Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Rp. 31.191.604.000,-
Rp. 25.897.906.000,-

Rp. 50.490.769.000,-

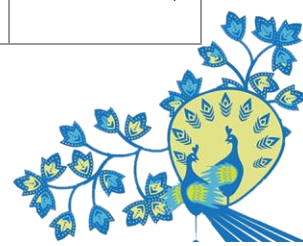


2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2021

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2021 menyajikan target triwulan dan per bulan yang tercantum dalam Perubahan PK Balai Besar POM di Bandung beserta anggarannya sebagaimana tabel tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
Tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						ANGGARAN (Rp)
			B03	B06	B09	B10	B11	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6%	83,6%	83,6%	97%	97%	97%	412.453.800,-
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	80%	80%	80%	80%	80%	89/641.500,-
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91%	91%	91%	94%	94%	94%	212.476.200,-
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73%	73%	73%	70%	70%	70%	48.268.500,-
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat				70%	70%	70%	24.330.000,-
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu					71	116.652.000,-	
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan					91,1	91.667.000,-	
		8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan					77,83	52.270.000,-	
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung					89,50	129.270.000,-	
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	89%	89%	96%	96%	96%	18.900.000,-
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,9%	63,9%	63,9%	64%	64%	64%	3.540.000,-
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88%	88%	88%	88%	88%	88%	655.120.000,-
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	55%	55%	57%	57%	57%	569.809.000,-
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan	78%	78%	78%	74%	74%	74%	758.120.000,-



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						ANGGARAN (Rp)
			B03	B06	B09	B10	B11	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	
		Makanan yang memenuhi ketentuan							
		15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung						4,35	60.911.000,-
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	16. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,18	89,18	89,18	92	92	92	5.604.012.000,-
		17. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	0%	40%	55%	55%	55%	42	345.620.000,-
		18. Jumlah desa pangan aman	0%	25%	40%	40%	40%	19	726.561.000,-
		19. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	5%	60%	70%	70%	70%	8	171.259.000,-
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	20. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	17,5%	37,5%	62,5%	100%	100%	100%	889.680.000,-
		21. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	22,5%	42,5%	65%	100%	100%	100%	434.043.000,-
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	22. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	46%	60%	68%	65%	65%	65%	999.603.000,-
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	23. Indeks RB BBPOM di bandung						82,8	694.155.000,-
		24. Nilai AKIP BBPOM di Bandung						83	17.214.000,-
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	25. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung						79	22.480.179.000,-
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	26. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP						79%	10.445.978.000,-
		27. Persentase pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	0,5	1	1,5	2	2	2	482.904.000,-
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	28. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	24	48	72	95,1	95,1	95,1	83.208.000,-
		29. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisiensi (92%)	Efisiensi (92%)	Efisiensi (92%)	Efisiensi (95%)	Efisiensi (95%)	Efisiensi (95%)	3.872.924.000,-

2.5 METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar POM Di Bandung merupakan Indikator Kegiatan Utama. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja.



Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini:

Pengukuran **INDIKATOR POSITIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\%$$







Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya **BUKAN DALAM** % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

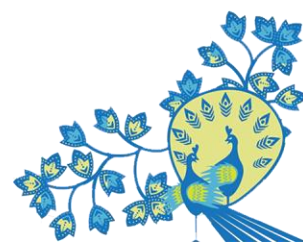
$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja (X) yang digunakan adalah sebagai berikut:

TABEL 2.5
KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

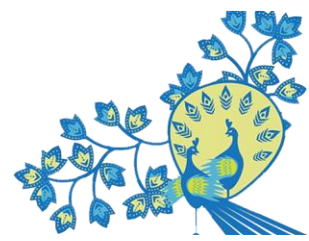
					
Tidak Dapat Disimpulkan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
X >120%	110% ≤ X ≤ 120%	90% ≤ X <110%	70% ≤ X < 90%	50% ≤ X < 70%	X < 50%





BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- 3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021





3.1



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Seesuai dengan yang tercantum di dalam Revisi Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung tahun 2020-2024 dan Perubahan Penetapan Kinerja Balai Besar POM di Bandung tahun 2021 memuat 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Pencapaian keseluruhan sasaran kegiatan Balai Besar POM di Bandung pada tahun 2021 secara lengkap adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TAHUN 2021

SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	KRITERIA	
1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	99,81	BAIK	
2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	110,32	SANGAT BAIK	
3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	95,95	BAIK	
4. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	101,38	BAIK	
5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	99,82	BAIK	
6. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	89,42	CUKUP	
7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	128,32	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
8. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL	98,53	BAIK	
9. TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG BERKINERJA OPTIMAL	107,32	BAIK	

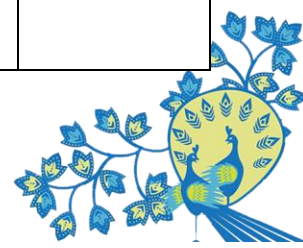


SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	KRITERIA
10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	84,67	CUKUP 
11. TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG SECARA AKUNTABEL	100,61	BAIK 

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 29 indikator kinerja utama. Perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini:

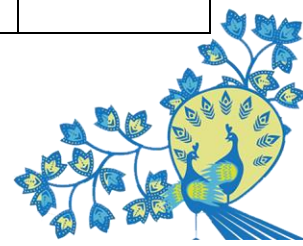
TABEL 3.2
PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%) PENYESUAIAN	KRITERIA CAPAIAN
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	97,00%	95,88%	98,85%	98,85%	Baik
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	87,06%	108,83%	108,83%	Baik
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,00%	91,96%	97,83%	104,99%	Baik
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00%	74,16%	105,94%	105,94%	Baik
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	70,00%	61,33%	87,62%	87,62%	Cukup
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				99,81%	99,81%
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	71,00%	78,33%	110,32%	110,32%	Sangat Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				110,32%	110,32%
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,10	91,10	86,40%	94,84%	Baik



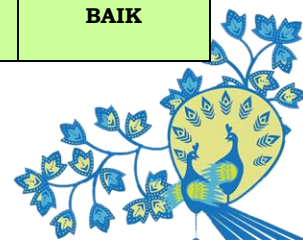
LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR POM DI BANDUNG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%) PENYESUAIAN	KRITERIA CAPAIAN
	BBPOM di Bandung	8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77,83	69,12	88,81%	88,81%	Cukup
		9. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung	89,50	93,27	104,21%	104,21%	Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			95,95%	95,95%	BAIK
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	96,00%	92,10%	95,94%	95,94%	Baik
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	64,00%	56,14%	87,72%	87,72%	Cukup
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00%	101,63%	115,48%	115,48%	Baik
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00%	51,13%	89,71%	89,71%	Cukup
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74,00%	86,16%	116,44%	116,44%	Sangat Baik
		15. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	4,35	4,48	102,99%	102,99%	Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			101,38%	101,38%	BAIK
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	16. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,00	91,35	99,29%	99,29%	Baik
		17. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	42	42	100,00%	100,00%	Baik
		18. Jumlah desa pangan aman	19	19	100,00%	100,00%	Baik
		19. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8	8	100,00%	100,00%	Baik



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR POM DI BANDUNG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%) PENYESUAIAN	KRITERIA CAPAIAN
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			99,82%	99,82%	BAIK
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	20. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%	87,03%	87,03%	87,03%	Cukup
		21. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%	91,82%	91,82%	91,82%	Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			89,42%	89,42%	CUKUP
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	22. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65,00%	83,40%	128,32%	128,32%	Tidak Dapat Disimpulkan
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			128,32%	120,00%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	23. Indeks RB BBPOM di Bandung	82,80	82,66	99,83%	99,83%	Baik
		24. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	83,00	80,70	97,23%	97,23%	Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			98,53%	98,53%	BAIK
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	25. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	79,00	84,78	107,32%	107,32%	Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			107,32%	107,32%	BAIK
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	26. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79,00%	76,50%	96,84%	96,84%	Baik
		27. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2,00	1,45	72,50%	72,50%	Cukup
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			84,67%	84,67%	CUKUP
11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Bandung secara akuntabel	28. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95,10	90,78	95,46%	95,46%	Baik
		29. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (95%)	Efisien (99,33%)	104,56%	104,56%	Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			100,01%	100,01%	BAIK



Pada tahun 2021, terdapat satu (1) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria sangat baik, tujuh (7) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria baik, dua (2) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria cukup dan satu (1) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Secara rinci setiap sasaran kegiatan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Bandung pada Tahun 2021 berdasarkan *Perspective Balance Score Card* sebesar 101, dengan rincian Nilai Kinerja *Stakeholder Perspective* (102); Nilai Kinerja *Internal Process Perspective* (105) dan Nilai Kinerja *Learning and Growth Perspective* (98), secara rinci sebagaimana tabel 3.3 berikut:

TABEL 3.3
NILAI KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN
PERSPECTIVE BALANCE SCORE CARD
TAHUN 2021

Perspective	Sasaran Kegiatan	Nilai Pencapaian Sasaran	Nilai Pencapaian Perspective
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE	1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	99,81	102
	2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	110,32	
	3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	95,95	
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE	4. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	101,38	103
	5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	99,82	
	6. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	89,42	
	7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	120,00	
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE	8. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL	98,53	98
	9. TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG BERKINERJA OPTIMAL	107,32	
	10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	84,67	
	11. TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG SECARA AKUNTABEL	100,01	
NILAI KINERJA ORGANISASI			101

Penjelasan mengenai kendala pencapaian dan upaya perbaikan untuk pencapaian target dapat dilihat pada penjelasan indikator kinerja di bawah ini :



**SASARAN
KEGIATAN
KE-1**
**TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG
MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM
DI BANDUNG**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **99,81%** dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.4.

TABEL 3.4
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-1
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	97,00%	95,88%	98,85%	Baik	
2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	80,00%	87,06%	108,83%	Baik	
3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	94,00%	91,96%	97,83%	Baik	
4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	70,00%	74,16%	105,94%	Baik	
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	70,00%	61,33%	87,62%	Cukup	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			99,81%	BAIK	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:


1. PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT

Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2021 dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2021. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Sampel acak adalah sampel yang disampling terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun 2021. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu

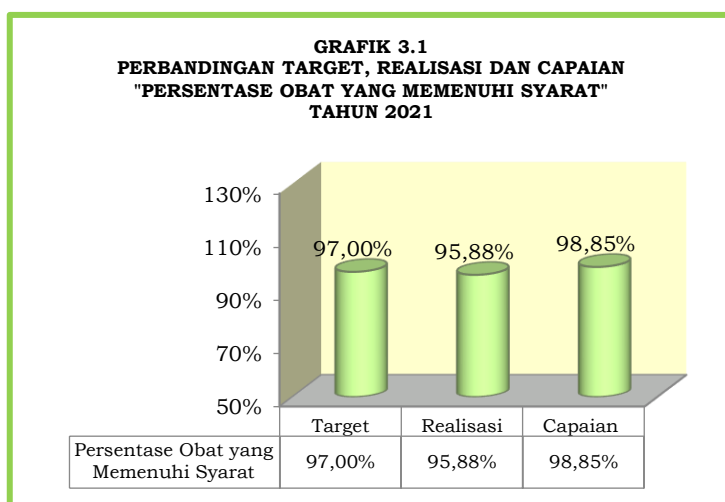


(termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila termasuk poin 4, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

TABEL 3.5
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT”
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	97,00%	95,88%	98,85%	Baik 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

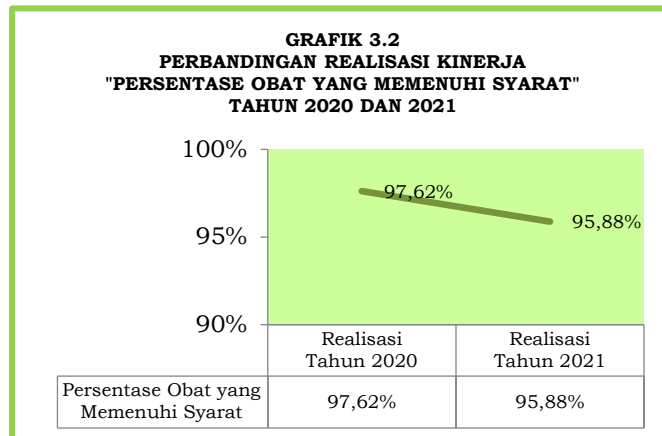


Pada tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 97,00%. Sebanyak 1311 sampel acak telah diperiksa dan diuji dengan rincian sebanyak 1257 sampel memenuhi syarat, 54 sampel tidak memenuhi syarat. Persentase Obat

yang memenuhi syarat sebesar 95,88%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **98,85%** dengan kriteria **Baik**.



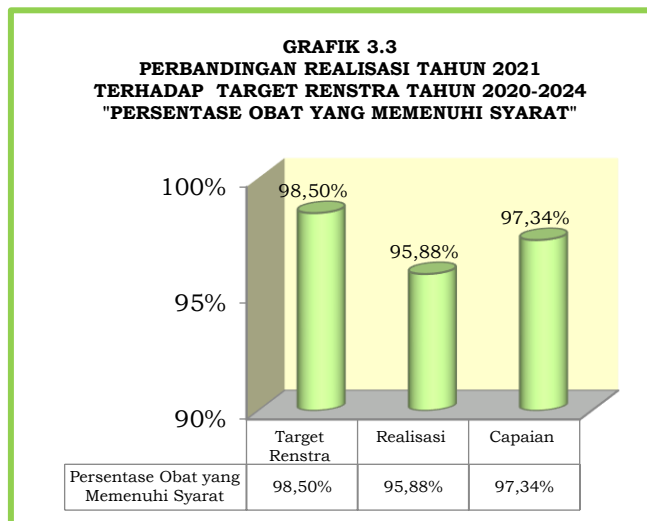
B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020



Persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2021 sebesar 95,88% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 97,62%. Jika dibandingkan antara tahun 2021 terhadap tahun 2020, terjadi penurunan realisasi kinerja sebesar 1,74% dan capaian kinerja sebesar

21,97%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.2.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

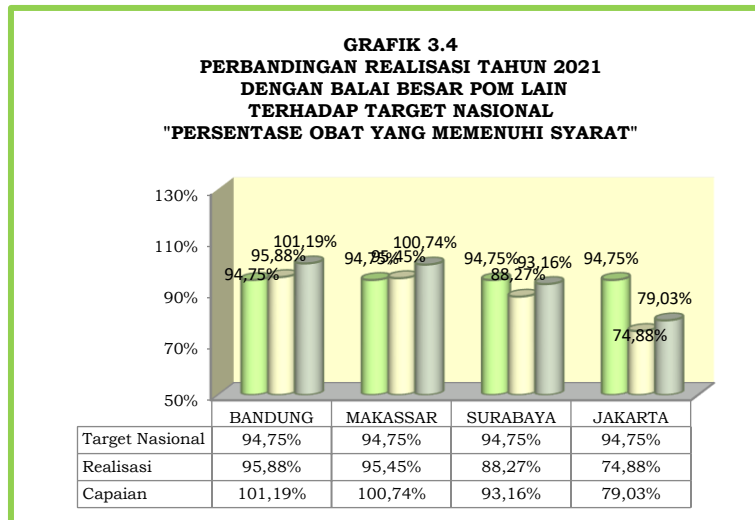


Target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis sesuai dengan dokumen Reviu Renstra adalah sebesar 98,50%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja tahun 2021 terhadap target Rencana Strategis

Tahun 2020-2024 sebesar **97,34%** dengan kriteria **Baik**. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.3.



D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu : Balai Besar POM di Bandung (95,88%), Balai Besar POM di Makassar (95,45%), Balai Besar POM di Surabaya (88,27%) dan Balai Besar POM

di Jakarta (74,88%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (94,75%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Bandung (101,19%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.4.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2021 disebabkan antara lain:

- ☰ Meningkatnya kepatuhan produsen Obat terhadap pedoman yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 jumlah sarana produksi obat, obat tradisional, dan kosmetika yang memenuhi ketentuan dalam pemenuhan GMP sebesar 81,34% dari 134 sarana. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah sarana produksi obat, obat tradisional, dan kosmetika yang memenuhi ketentuan dalam pemenuhan GMP sebesar 78,34% dari 157 sarana yang diperiksa.
- ☰ Adanya kegiatan Layanan Informasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan media sosial. KIE dilaksanakan melalui media sosial berupa infografis tentang Obat dan, media elektronik berupa Iklan Layanan Masyarakat tentang Obat dan Makanan. Selain itu KIE dilakukan melalui Webinar Sosialisasi KIE melalui Film Pendek bekerjasama dengan Pramuka sebanyak 5 kali. Balai besar POM di Bandung menyelenggarakan kegiatan Lomba Film Pendek yang menghasilkan 1093 Film pendek tentang obat dan makanan.



- ☪ Meskipun capaian berhasil dengan kriteria baik akan tetapi realisasi kinerja mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 terdapat peningkatan target persentase obat memenuhi syarat sebesar 97,00%, yaitu meningkat 16,2% jika dibandingkan dengan tahun 2020 (80,80%). Hal ini karena dari hasil review dengan mempertimbangkan data capaian tahun 2020 sehingga tahun 2021 target yang ditetapkan dinaikkan menjadi 97%. Juga terjadi peningkatan jumlah sampel obat yang tidak memenuhi syarat. Apabila kita bandingkan jumlah sampel obat yang disampling secara acak pada tahun 2020 terhadap tahun 2021, terdapat peningkatan hasil tidak memenuhi syarat sebesar 15% (tahun 2020 : 47 sampel, tahun 2021 : 54 sampel). Peningkatan berasal dari produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Hasil pengujian Obat yang TMS sebanyak 54 sampel yang terdiri dari TMK penandaan (37 sampel) dan TMS mutu pengujian (17 sampel). Parameter Uji TMS, meliputi Produk Obat (Disolusi), Produk Obat Tradisional (Mikrobiologi seperti Angka Kapang Khamir, Kadar air dan Bahan kimia Obat). Produk Kosmetik (Kadar Metanol) dan Suplemen Kesehatan (Kadar Air, Kadar Kofein).

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ☪ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat, Dana Alokasi Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan, Narasumber dan pengawasan bersama.
- ☪ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat, *Public Warning* Obat yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Ig Live), media masa melalui Iklan Layanan Masyarakat bekerjasama dengan radio, wawancara dengan radio. Bekerjasama dengan stakeholder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat) melaksanakan KIE melalui Webinar Sosialisasi KIE melalui pembuatan film pendek sebanyak 5 kali maupun tatap muka dengan Tokoh Masyarakat dan tetap memperhatikan protokol Kesehatan sebanyak 2 kali. Ditambahkan poksi infokom
- ☪ Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana pelayanan kefarmasian, pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, masyarakat tentang Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Pembinaan juga dilakukan saat pengawasan rutin di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan memberikan informasi mengenai cek klik.



- ☰ Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar. Pengawasan terhadap produk Obat yang beredar selalu dilakukan melalui kegiatan Operasi Daerah dan Operasi Rutin Penindakan yang sudah direncanakan sesuai tingkat prioritasnya. Pada triwulan IV, dilakukan operasi penindakan terhadap salah satu sarana distribusi obat impor tanpa ijin edar di alamat Infinity Resort Town House, Awiligar, Cibeunying, Cimenyan. Sarana tersebut diberikan sanksi administratif berupa penyitaan produk ilegal dan terhadap pemilik juga diberikan panggilan untuk datang ke kantor Balai Besar POM di Bandung. Pemilik diberikan teguran keras dan diharuskan membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan kesalahan tersebut kembali. Selain itu, tetap dilakukan pengawasan melalui patroli siber terkait produksi/distribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar secara rutin.
- ☰ Melaporkan hasil evaluasi penandaan Obat ke pusat untuk ditindaklanjuti ke produsen sebanyak 2090 produk.
- ☰ Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan melibatkan dalam pelatihan dan kegiatan yang diadakan BBPOM Bandung dan Badan POM. Pelatihan dan kegiatan yang dilakukan antara lain Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kemandirian Bahan Baku Obat, Obat dan Produk Biologi: Sinergi Membangun Ekosistem Pengembangan Produk Inovasi yang Bermutu dan Berdaya Saing yang dilaksanakan pada 30 November – 1 Desember 2021, Forum Komunikasi Publik dengan masyarakat dan pelaku usaha pada tanggal 24-25 Nopember 2021, serta Peningkatan kompetensi Inspektur melalui Forum Komunikasi Inspektur CPOTB pada tanggal 25-26 Nopember 2021.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja :

- ☰ Pengambilan contoh sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung dilakukan tepat waktu sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.
- ☰ Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan secara rutin oleh BBPOM di Bandung, meliputi sarana Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Kosmetik, dan Industri Suplemen



Kesehatan. Sampai dengan triwulan IV tahun 2021 jumlah sarana produksi yang diperiksa sejumlah 132 sarana.

- ☰ Adanya kegiatan Layanan Informasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung dan daring maupun melalui media elektronik dan media sosial.

G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Rekomendasi perbaikan kinerja ke depan yaitu :

- ☰ Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dalam pemenuhan CPOB, CPOTB termasuk fokus khusus penandaan obat tradisional terhadap sarana produksi Obat Tradisional, pemenuhan CPKB dan CDOB. Dengan kondisi pandemi yang sudah menurun dengan tetap menjaga proses pencapaian target produksi selama triwulan IV dapat dioptimalkan dengan pemeriksaan secara luring.
- ☰ Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan, diantaranya dengan pemantauan rutin CAPA yang masuk dan yang telah dievaluasi.
- ☰ Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pemberian layanan informasi tentang Obat secara daring maupun tatap muka.
- ☰ Peningkatan kegiatan sosialisasi (KIE) tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Obat yang diterbitkan oleh Badan POM. KIE tentang obat juga dilakukan melalui Media Sosial serta KIE yang dilaksanakan melalui Webinar Warta POPA yang dilaksanakan setiap bulan.
- ☰ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab./Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.
- ☰ Pro justicia memiliki arti demi hukum, untuk hukum atau undang-undang. Secara formal sanksi administrative pro justicia menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum adalah tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Pembinaan dan penyebaran informasi mengenai penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar dilakukan melalui tatap muka maupun daring menggunakan Media sosial dan media elektronik.




H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

2. PRESENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

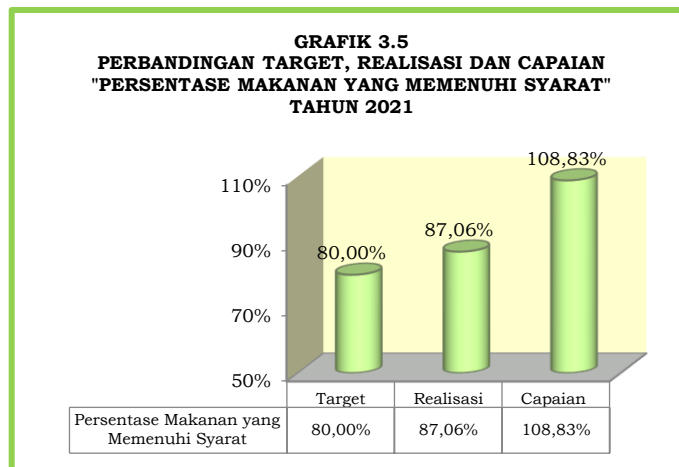
Persentase Makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2021 dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2021. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung satu sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.6.

TABEL 3.6
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT”
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	80,00%	87,06%	108,83%	Baik 



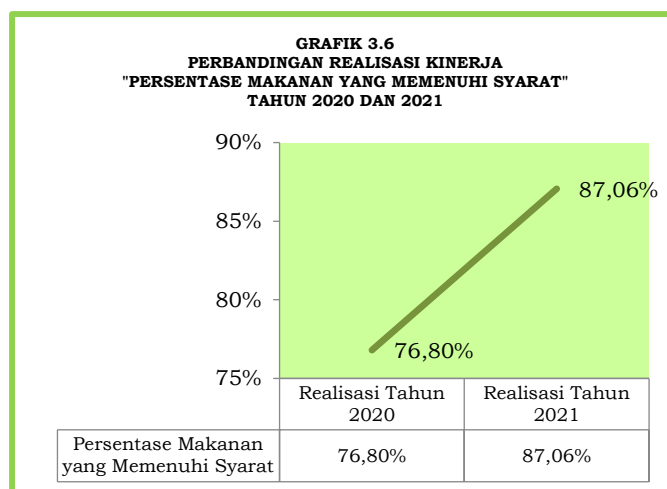
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021



Pada tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 80,00%. Realisasi yang diperoleh pada tahun 2021 sebesar 87,06%, dengan rincian 424 sampel memenuhi syarat dan 63

sampel tidak memenuhi syarat. Total sampel acak yang diperiksa dan diuji sebanyak 487 sampel. Dengan demikian capaian indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **108,83%** dengan kriteria **Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020

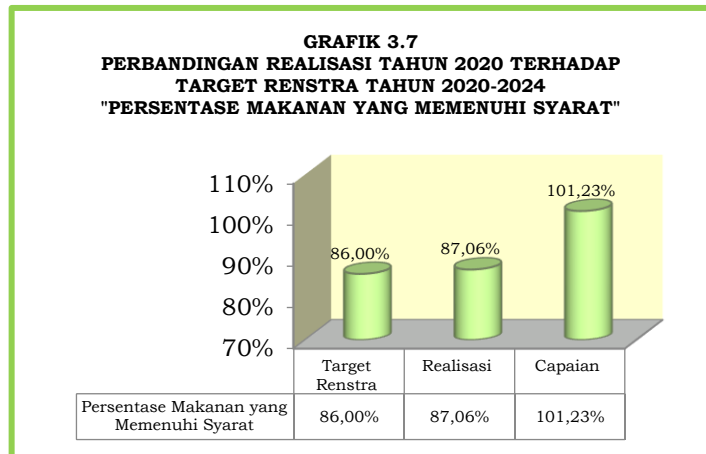


Persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2021 sebesar 87,06% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 76,80%. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan realisasi untuk indikator kegiatan ini. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 3.2. menunjukkan bahwa pada tahun 2021

terjadi peningkatan persentase sampel makanan memenuhi syarat sebesar 10,74% dibandingkan dengan tahun 2020.



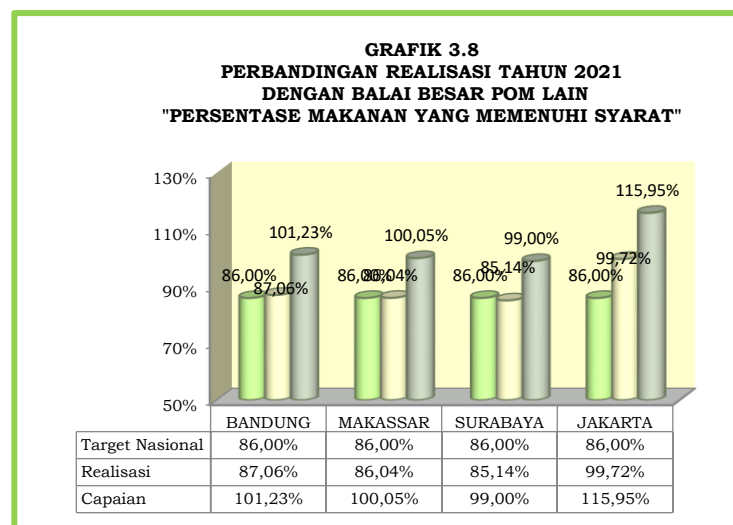
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 86,00%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada tahun 2021

sebesar 101,23%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.7.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu : Balai Besar POM di Jakarta (99,72%), Balai Besar POM di Bandung (87,06%), Balai Besar POM di Makassar (86,04%) dan Balai Besar POM di

Surabaya (85,14%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (86,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Jakarta (115,95%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.8.

E. ANALISIS KEBERHASILAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Peningkatan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2021 ini disebabkan oleh :

- ☛ Pada tahun 2021 terdapat perubahan kesimpulan hasil akhir untuk kriteria TMK sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2021. Sampel dengan kriteria TMK Minor dengan hasil uji MS maka kesimpulan akhir MS. Berbeda



dengan tahun 2020 kesimpulan akhir untuk kriteria TMK tidak ada kategori Minor ataupun Mayor seperti tahun 2021 jadi hasil uji MS kesimpulan akhir tetap TMS.

- ☪ Pada tahun 2021, jumlah sarana produksi makanan yang tidak memenuhi ketentuan dalam pemenuhan GMP sebesar 72% dari 175 sarana yang diperiksa. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 59,43% maka terdapat peningkatan terhadap ketidakpatuhan pemenuhan GMP dari sarana produksi yang diperiksa. Jika dilihat dari hasil pengawasan sarana produksi makanan dapat terlihat penurunan tingkat ketidakpatuhan produsen makanan. Ketidakpatuhan produsen makanan disebabkan karena ada pemenuhan beberapa aspek CPPOB yang belum diterapkan dengan baik.
- ☪ Terdapat peningkatan jumlah sarana produksi makanan yang memenuhi ketentuan yang diperiksa pada tahun 2021 yaitu sebanyak 49 sarana. Peningkatan ini merupakan dampak inisiatif dari sarana produksi makanan dalam kepatuhan pemenuhan GMP dari sarana produksi yang diperiksa.
- ☪ Pada tahun 2021 terdapat 22 sampel TMK label/penandaan (TMK label/penandaan Kriteria Major sebanyak 13 sampel dan Tanpa Ijin Edar sebanyak 9 sampel) dan sebanyak 46 sampel TMS hasil pengujian, dimana sebagian besar berasal dari sampel yang melebihi persyaratan parameter uji mikrobiologi seperti Angka Lempeng Total (ALT), Angka Kapang Khamir (AKK) dan Enterobacteriaceae dan parameter uji kimia dengan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang melebihi persyaratan. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
- ☪ Meningkatnya kepatuhan sarana distribusi makanan terhadap pedoman yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, jumlah sarana distribusi makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 77,44% dari 164 sarana yang diperiksa. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 65,61% maka terdapat peningkatan terhadap ketidakpatuhan dari sarana distribusi yang diperiksa.
- ☪ Adanya kegiatan Layanan Informasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan media sosial.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- ☪ Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui KIE yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media sosial berupa infografis dan IG Live Kelo Geulis maupun elektronik berupa Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bekerjasama dengan Radio serta kegiatan KIE melalui



Webinar Warta POPA tentang Obat dan Makanan. Pada tahun 2021, KIE melalui media social sebanyak 756 posting.

- ☰ Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ☰ Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB yaitu sebanyak 177 sarana produksi yang diperiksa pada tahun 2021.
- ☰ Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi ketentuan, yaitu sebanyak 127 sarana distribusi yang diperiksa pada tahun 2021.
- ☰ Melaporkan hasil evaluasi penandaan ke pusat untuk ditindaklanjuti ke produsen, yaitu sebanyak 777 label pangan.
- ☰ Peningkatan koordinasi dengan stakeholder (Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.
- ☰ Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan makanan Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar. Sanksi ini berkaitan dengan pelanggaran Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pengawasan terhadap produk makanan yang beredar antara lain melalui kegiatan Operasi Daerah dan Operasi Rutin Penindakan yang sudah direncanakan sesuai tingkat prioritasnya. Pada tahun 2021 dilakukan pengawasan melalui patroli siber terkait produksi/distribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar. Untuk tindak lanjut dari patroli siber yang sudah dilakukan adalah melaporkan hasil patroli siber dan kemudian akan dilakukan *take down* oleh Badan POM Pusat.
- ☰ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Ig Live), media masa melalui Iklan Layana Masyarakat bekerjasama dengan radio. Bekerjasama dengan stakeholder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat).

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja adalah :

- ☰ Pengawasan sarana produksi makanan yang dilakukan secara rutin oleh BBPOM di Bandung meliputi sarana Industri Pangan Olahan MD dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Pada tahun 2021 jumlah sarana produksi yang



memenuhi ketentuan meningkat hal ini disebabkan kepatuhan sarana produksi makanan terhadap pedoman CPPOB yang telah ditetapkan sudah sesuai ketentuan.

- ☰ Diadakannya kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknik Program Manajemen Resiko bagi Pelaku Usaha Produksi Pangan Olahan dan Sarana Peredaran Pangan di Bandung pada tanggal 25 November 2021

G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Bandung ke depan adalah:

- ☰ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Ig Live), media masa melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bekerjasama dengan radio.
- ☰ Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.
- ☰ Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi ketentuan.
- ☰ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan) terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2


3. PRESENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted yang memenuhi syarat tahun 2020 dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji tahun 2020. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive tahun 2020. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; (2) Produk kadaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara

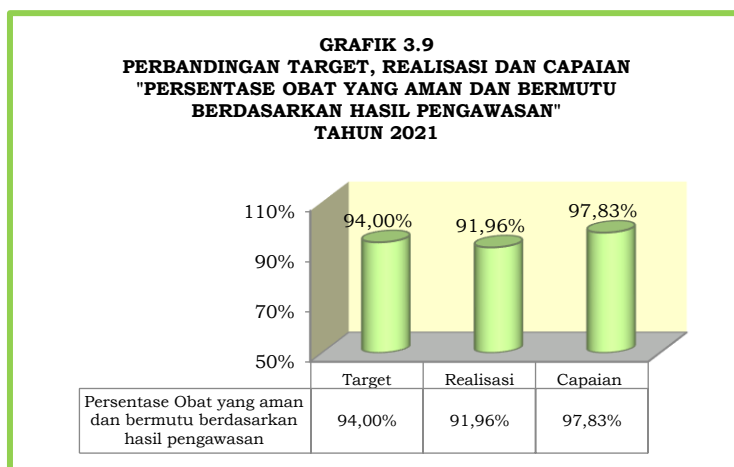


berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.7.

TABEL 3.7
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU
BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN”
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,00%	91,96%	97,83%	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

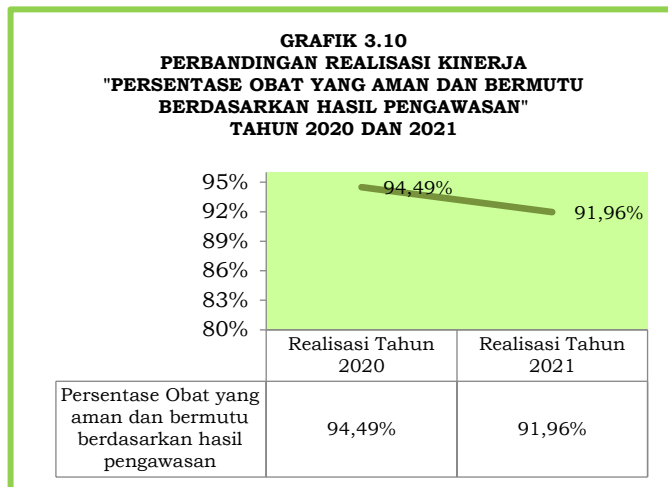


Pada tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sebesar 94,00%. Sampel targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 684 sampel dengan rincian sebanyak 629 sampel memenuhi syarat dan 55 sampel tidak

memenuhi syarat, sehingga persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh sebesar 91,96%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **97,83%** dengan kriteria **Baik**. Pada tahun 2021, hasil pengujian Obat yang tidak memenuhi syarat (TMS) berasal dari TMS mutu pengujian sebanyak 30 sampel yang berasal dari produk Obat Tradisional, 5 sampel yang berasal dari produk Suplemen Kesehatan dan 20 sampel yang berasal dari produk Kosmetik. Parameter uji yang TMS meliputi TMS uji mikrobiologi (Obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik), Penetapan Kadar Zat aktif (Suplemen Kesehatan), Penetapan Kadar Bahan yang Dibatasi (Kosmetik).

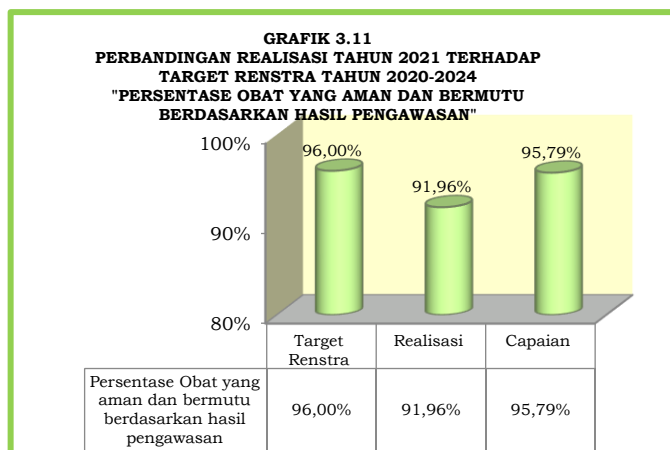


B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020



Persentase obat yang aman dan bermutu pada tahun 2021 sebesar 91,96% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 94,49%. Jika dibandingkan antara tahun 2021 terhadap tahun 2020, terjadi penurunan realisasi kinerja sebesar 2,53%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.10.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

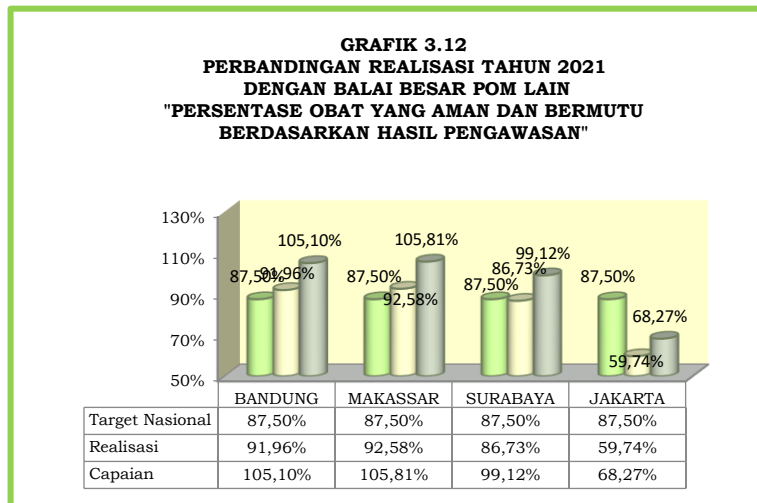


Target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 96 %. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran tahun 2021 terhadap target Rencana

Strategis Tahun 2020-2024 (95,79%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.11.



D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu : Balai Besar POM di Makassar (92,58%), Balai Besar POM di Bandung (91,96%), Balai Besar POM di

Surabaya (86,73%) dan Balai Besar POM di Jakarta (59,74%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (87,50%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Makassar (105,81%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.12.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Penurunan capaian kinerja sasaran ini disebabkan antara lain:

- ☛ Pada tahun 2021, pengambilan contoh sampel obat, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling. Dari 684 sampel yang diperiksa dan diuji terdapat 55 sampel tidak memenuhi syarat yang terdiri dari 30 sampel TMK Penandaan, 25 sampel tidak memenuhi syarat (yang berasal dari sampel Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan). Parameter uji yang TMS meliputi TMS uji mikrobiologi, kadar air dan kadar vitamin).
- ☛ Pada tahun 2021 di Balai Besar POM Bandung terdapat sampel e katalog yang disampling pada produsen obat saat inspeksi CPOB, sampel kasus obat Covid di sarana pelayanan kefarmasian (hilir).

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- ☛ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Ig Live), media masa melalui iklan layanan



masyarakat bekerjasama dengan radio. KIE Sosialisasi Film Pendek Bekerjasama dengan Pramuka sebanyak 5 kali.

- ☰ Bekerjasama dengan stake holder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat) melaksanakan KIE melalui IG Live Kelom Geulis tentang Alur Perizinan Obat Tradisional. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab./Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.
- ☰ Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi Obat serta masyarakat tentang Obat yang memenuhi ketentuan. Penerapan sanksi administratif terhadap sarana produksi dan distribusi yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) mulai dari peringatan, peringatan keras dan penghentian sementara kegiatan.
- ☰ Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi Obat serta masyarakat tentang Obat yang memenuhi ketentuan. Penerapan sanksi administratif terhadap sarana produksi dan distribusi yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) mulai dari peringatan, peringatan keras dan penghentian sementara kegiatan.
- ☰ Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/dilarang beredar. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Penerapan sanksi baik administratif atau pro justicia diharapkan mampu memberikan efek jera bagi masyarakat luas.

F. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja :

- ☰ Pengambilan contoh sampel obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung, dilakukan sesuai perencanaan pada triwulan IV. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sebanyak 684 sampel .
- ☰ Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan secara rutin oleh BBPOM di Bandung, meliputi sarana Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Kosmetik, dan Industri Suplemen Kesehatan. Pada triwulan IV tahun 2021 jumlah sarana produksi yang diperiksa sejumlah 132 sarana.



- ☪ Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran. Sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian meliputi, Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Toko Obat, Klinik, Puskesmas, dan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, serta suplemen kesehatan. Pada triwulan IV tahun 2021 jumlah sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian yang diperiksa sejumlah 920 sarana.

G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Rekomendasi perbaikan kinerja adalah sebagai berikut :

- ☪ Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dalam pemenuhan CPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB. Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan setiap minggu.
- ☪ Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara langsung maupun melalui media sosial berupa infografis tentang Obat dan Makanan maupun IG Live Kelom Geulis Tentang Obat Tradisional serta Iklan Layanan Masyarakat (ILM).
- ☪ Peningkatan kegiatan sosialisasi tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Obat yang diterbitkan oleh Badan POM yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- ☪ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab./Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat. Pembinaan dan pelayanan informasi tentang Obat dan Makanan terhadap sarana distribusi Obat serta masyarakat tentang Obat yang memenuhi ketentuan.

☪ **ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.


4. PRESENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted memenuhi syarat pada tahun 2021 dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji

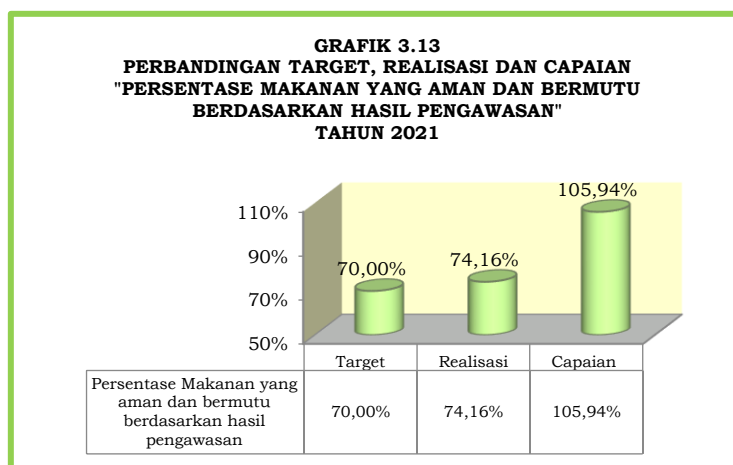


pada tahun 2021. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.8.

TABEL 3.8
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU
BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN”
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	70,00%	74,16%	105,94%	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

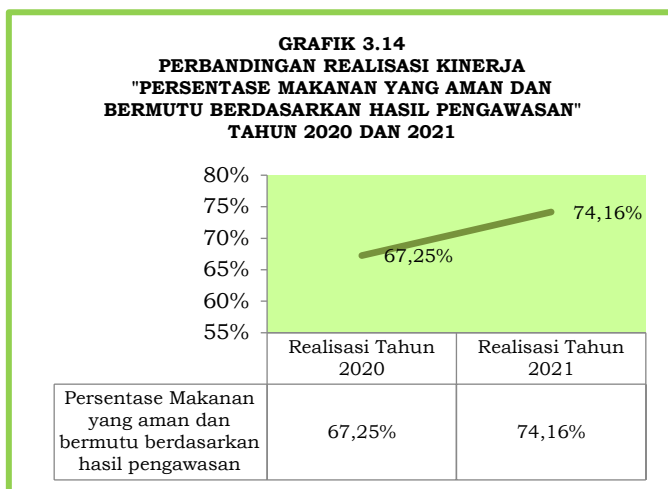


Pada tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 70,00%. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil

pengawasan pada tahun 2021 sebesar 74,16%, dengan rincian sebanyak 198 sampel targeted memenuhi syarat dan 69 sampel targeted tidak memenuhi syarat dari total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 267 sampel targeted. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **105,94%** dengan kriteria **Baik**.



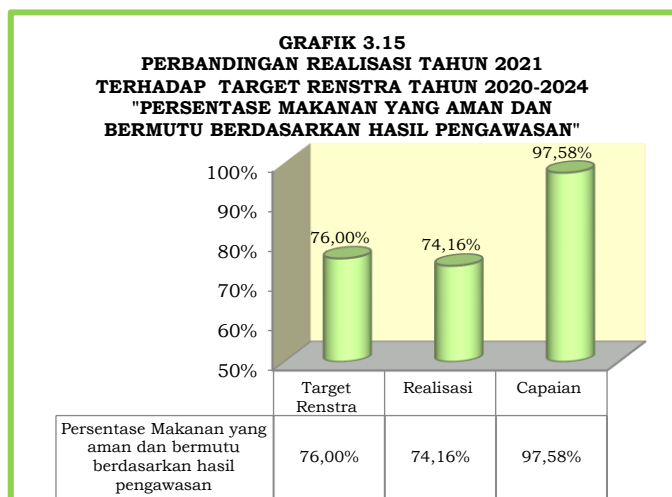
B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020



Persentase sampel makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2020 sebesar 67,25% dan tahun 2021 sebesar 74,16%. Realisasi kinerja indikator ini tidak dapat dibandingkan karena terdapat perbedaan definisi operasional. Pada tahun

2021 terdapat perubahan definisi operasional yaitu sampel targeted/purposive, kecuali sampel pangan fortifikasi. Sedangkan tahun 2020, sampel targeted/purposive termasuk sampel pangan fortifikasi. Akan tetapi jika diukur dengan definisi operasional tahun 2021 diperoleh realisasi tahun 2020 sebesar 66,67%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terjadi peningkatan persentase sampel makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan sebesar 7,49% dibandingkan dengan tahun 2020.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

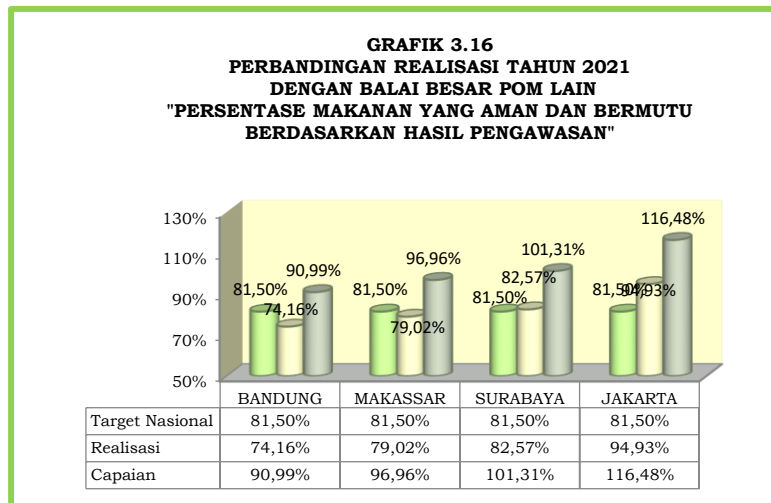


Target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 76,00%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 97,58%. Secara lengkap dapat dilihat pada

grafik 3.15.



D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu : Balai Besar POM di Jakarta (94,93%), Balai Besar POM di

Surabaya (82,57%), Balai Besar POM di Makassar (79,02%) dan Balai Besar POM di Bandung (74,16%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (81,50%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Jakarta (116,48%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.16.

E. ANALISIS KEBERHASILAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan IV tahun 2021 disebabkan antara lain :

- Adanya perubahan definisi operasional sasaran kinerja, dimana pangan fortifikasi tidak termasuk dalam pengukuran indikator kinerja ini, karena yang berkontribusi sangat besar untuk sampel TMS berasal dari pangan fortifikasi. Pada tahun 2021 hasil pengujian sampel makanan yang TMS sebanyak 69 sampel (25,84%) dari total 267 sampel makanan yang diperiksa dan diuji. Hasil pengujian sampel makanan yang TMS tersebut, sebagian besar berasal dari sampel PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah) dan sampel UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sebanyak 46 sampel tidak memenuhi syarat parameter uji mikrobiologi, yaitu Angka Lempeng Total (ALT), Angka Kapang Khamir (AKK) yang melebihi persyaratan serta mengandung bakteri P Aeruginosa dan E. Coli dan 12 sampel tidak memenuhi syarat parameter uji kimia, yaitu pemanis siklamat yang melebihi batas persyaratan.

Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).



Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- ☪ Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB melalui pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ☪ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Ig Live) serta iklan layanan masyarakat bekerjasama dengan radio.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja :

- ☪ Telah dilaksanakannya kegiatan program nasional keamanan pangan yang meliputi PJAS Aman, Gerakan Keamanan Pangan Desa dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.



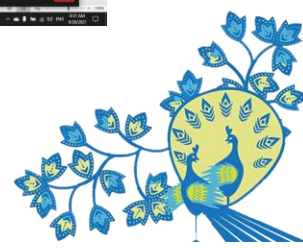
Gambar 3.1 Kegiatan Bimtek Komunitas dan Pelaku Usaha pangan Desa program Gerakanan Keamanan Pangan Desa



Gambar 3.2 Kegiatan Bimtek Keamanan Pangan untuk kader keamanan pangan di sekolah



Gambar 3.3 Kegiatan Bimtek Petugas Pengelola Pasar



G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Rekomendasi perbaikan kinerja kedepan adalah sebagai berikut :

- ☰ Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi syarat melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung atau melalui media sosial Instagram, Facebook dan Twitter dan Youtube. KIE melalui Webinar warta POPA dan Sosialisasi dalam rangka KIE Film Pendek bekerjasama dengan Pramuka.
- ☰ Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.
- ☰ Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi syarat.
- ☰ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan serta melakukan advokasi pengawasan pangan fortifikasi secara langsung di tempat produsen.

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA


Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

5. PRESENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT

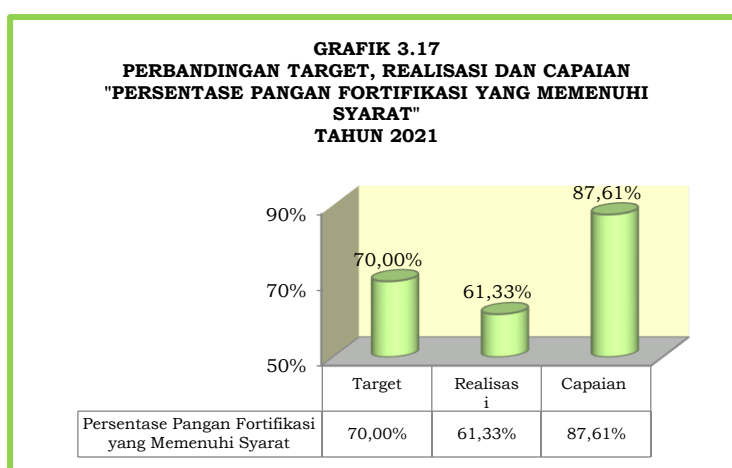
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2021 dibandingkan dengan total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji pada tahun 2021. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.9.



TABEL 3.9.
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT”
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	70,00%	61,33%	87,62%	Cukup	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021



Indikator ini ditetapkan pada akhir tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Revisi Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 70,00%. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada

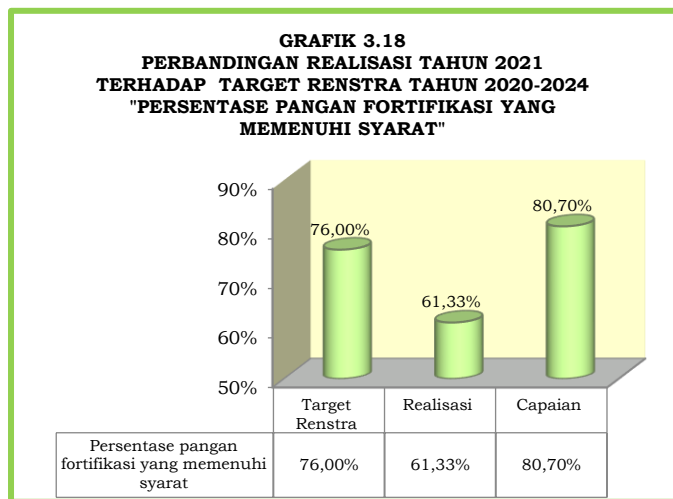
tahun 2021 sebesar 61,33%, dengan rincian sebanyak 92 sampel pangan fortifikasi memenuhi syarat dan 58 sampel targeted tidak memenuhi syarat dari total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 150 sampel pangan fortifikasi. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **87,62%** dengan kriteria **Cukup**.

D. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020

Realisasi kinerja indikator ini tidak dapat dibandingkan karena indikator ini baru ditetapkan pada akhir tahun 2021. Akan tetapi jika diukur menggunakan definisi operasional tahun 2021 maka Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2020 sebesar 68,46% dan tahun 2021 sebesar 61,33%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan persentase pangan fortifikasi sebesar 1,12% dibandingkan dengan tahun 2020.

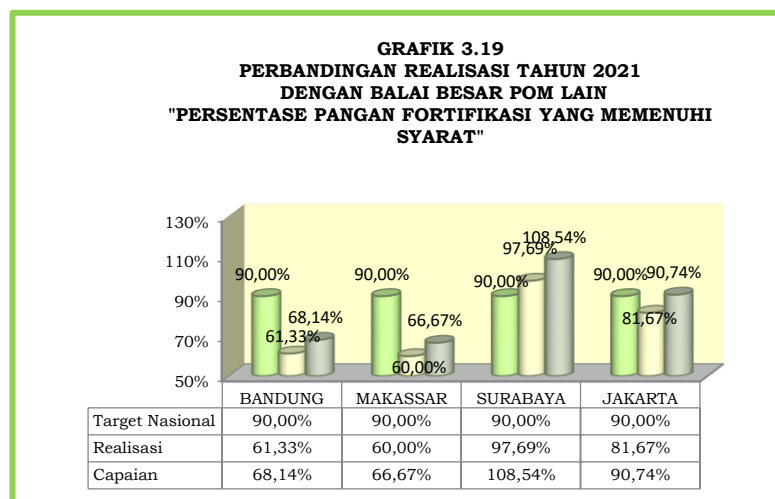


E. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 76,00%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 80,70%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.15.

E. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu : Balai Besar POM di Surabaya (97,69%), Balai Besar POM di Jakarta (81,67%),

Balai Besar POM di Bandung (61,33%) dan Balai Besar POM di Makassar (60,00%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (90,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Surabaya (108,54%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.16.

G. ANALISIS KEGAGALAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kegagalan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2021 disebabkan antara lain :

- Pada tahun 2021 hasil pengujian sampel pangan fortifikasi yang TMS sebanyak 58 sampel (38,67%) dari total 150 sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan



diuji. Hasil pengujian sampel makanan yang TMS tersebut, sebagian besar berasal dari sampel fortifikasi garam beryodium, yaitu sebanyak 54 sampel mengandung KIO₃ yang substandard, dan 4 sampel tepung terigu mengandung Vitamin B₂ dan asam folat yang substandar. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap penambahan fortifikan yang memenuhi standar.

- ☪ Belum terpenuhinya GMP sarana produksi garam, dimana sebagian besar sarana produksi garam masih merupakan UMKM.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- ☪ Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan, terutama sarana produksi garam terkait pemenuhan CPPOB melalui pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ☪ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Ig Live) serta iklan layanan masyarakat bekerjasama dengan radio.

H. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja :

- ☪ Kurangnya pemahaman dari pelaku usaha tentang aspek CPPOB serta kesadaran untuk mempertahankan pemenuhan aspek CPPOB tidak hanya pada saat di inspeksi namun sudah menjadi kebijakan yang harus ditaati sarana produksi.

I. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

- ☪ Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.
- ☪ Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi syarat.
- ☪ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan serta melakukan advokasi pengawasan pangan fortifikasi secara langsung di tempat produsen.



B. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

**SASARAN
KEGIATAN
KE-2**
**MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT
TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN
MAKANAN WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yaitu : Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu. Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil survey oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM yang dilakukan pada akhir tahun anggaran.



Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu: (1) Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat; (2) Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan; dan (3) Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM. Interpretasi indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu mengacu pada skala 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

TABEL 3.10
KATEGORI INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX)
TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU

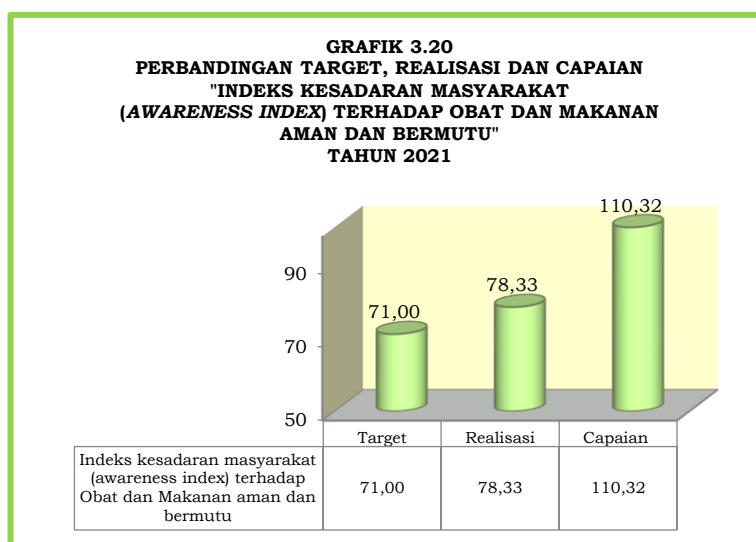
SKOR	INTERPRESTASI
≤ 45,00	TIDAK BAIK
45,01 - 60,00	KURANG BAIK
60,01 - 75,00	CUKUP BAIK
75,01 - 90,00	BAIK
≥ 90,01	SANGAT BAIK



TABEL 3.11
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN
MAKANAN AMAN DAN BERMUTU”
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	71,00	78,33	110,32%	Sangat Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			110,32%	SANGAT BAIK	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

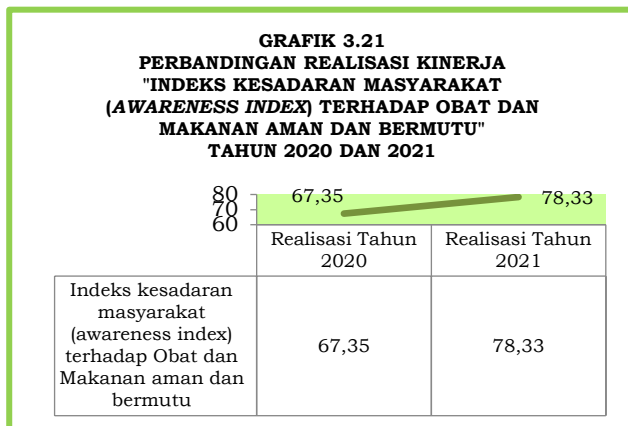


Pada tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 71,00. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Provinsi Jawa Barat sebesar

78,33 (Baik). Dengan demikian nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar **110,32%** dengan kriteria **Sangat Baik**. Rincian indeks dapat dilihat pada tabel berikut:

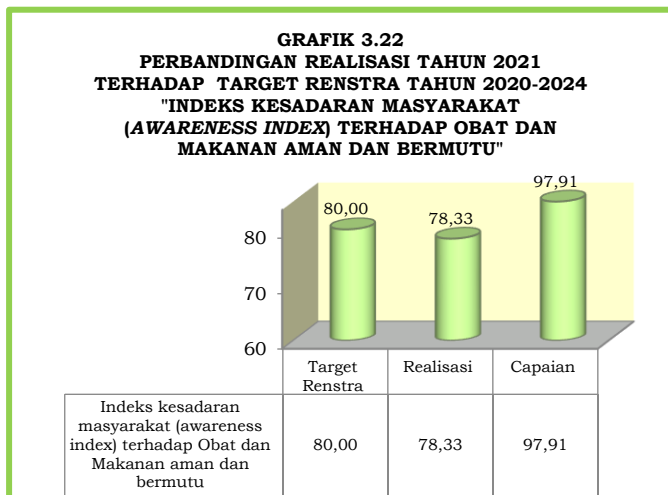


B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020



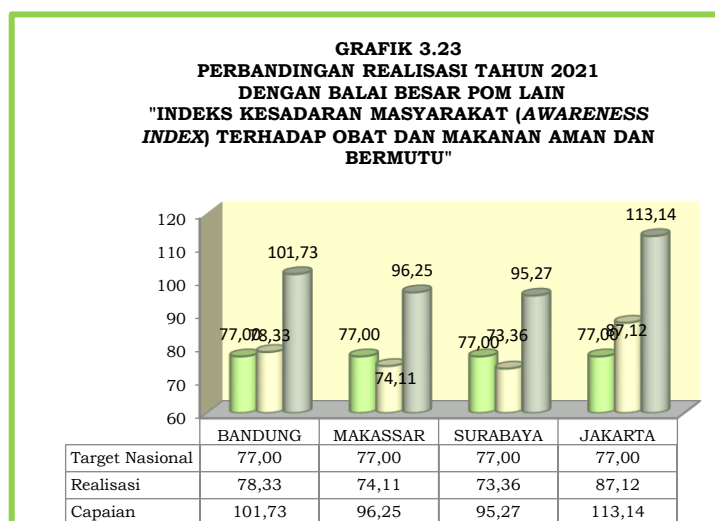
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 sebesar 78,33 sedangkan pada tahun 2020 sebesar 67,35, terdapat peningkatan sebesar 10,98.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Target indikator tersebut yang ditetapkan pada akhir periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 80,00. Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya sebesar 97,91% dengan kriteria **Baik**.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja dari Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu yang tertinggi secara berturut-turut yaitu : Balai Besar POM di Jakarta (87,12), Balai Besar POM di Bandung (78,33), Balai Besar POM



di Makassar (74,11) dan Balai Besar POM di Surabaya (73,36). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (77,00), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Jakarta (113,14%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.20.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 termasuk dalam kriteria Baik, artinya sudah adanya kesadaran masyarakat di Provinsi Jawa Barat mengenai obat dan makanan aman namun perlu ditingkatkan. Penyebab keberhasilan capaian kinerja indikator tersebut, yaitu:

- ☰ Adanya peningkatan aspek pengetahuan dan perilaku terkait Obat dan Makanan dalam kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
- ☰ Gencarnya peran media social, media elektronik dan media cetak untuk menyebarkan informasi terkait obat dan makanan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2021, antara lain :

- ☰ Peningkatan aspek pengetahuan dan perilaku terkait Obat dan Makanan dalam kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
- ☰ Melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan KIE.
- ☰ Mengembangkan kegiatan KIE yang lebih variatif sesuai dengan karakteristik wilayah Jawa Barat.
- ☰ Mengoptimalkan peran media sosial media elektronik dan media cetak untuk menyebarkan informasi terkait obat dan makanan.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

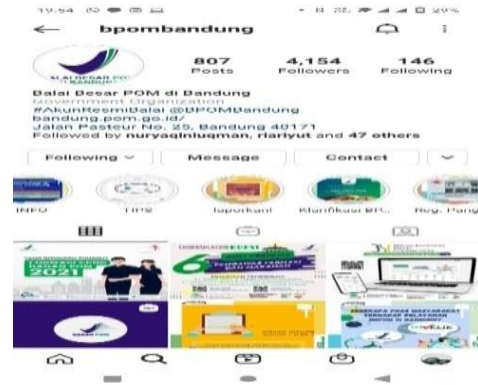
- ☰ Adanya kegiatan Layanan Informasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung dan daring maupun melalui media elektronik dan media sosial.



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR POM DI BANDUNG



KIE IG Live Kelom Geulis



KIE Infografis pada Medsos



Webinar Warta POPA dengan tema Menjadi Konsumen Cerdas



KIE bekerjasama dengan pramuka



KIE bekerjasama dengan tokoh masyarakat

Gambar 3.4 Kegiatan KIE yang telah diselenggarakan oleh BBPOM di Bandung

- Adanya gebyar KIE 1095 Film Pendek Obat dan Makanan, BBPOM di Bandung bekerjasama dengan Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Jawa Barat Tahun 2021 dan mendapatkan anugerah Rekor MURI pada tanggal 03 September 2021.





Gambar 3.5
Gebyar KIE 1095 Film Pendek Obat dan Makanan

G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

- ✎ Peningkatan aspek pengetahuan dan perilaku terkait Obat dan Makanan dalam kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
- ✎ Melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan KIE.
- ✎ Mengembangkan kegiatan KIE yang lebih variatif sesuai dengan karakteristik wilayah Jawa Barat.
- ✎ Mengoptimalkan peran media sosial untuk menyebarkan informasi terkait obat dan makanan
- ✎ Mengembangkan metode dan sarana untuk melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
- ✎ Meningkatkan kompetensi petugas agar dapat melakukan pengembangan metode dan sarana melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

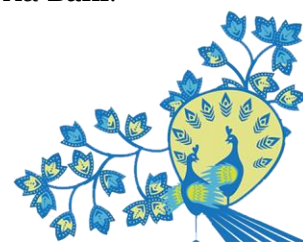
✎ ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

SASARAN KEGIATAN KE-3

MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 3 (tiga) indikator yaitu : (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; (2) Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan; dan (3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM. Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil survey oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM yang dilakukan pada akhir tahun anggaran. Dari perhitungan ketiga indikator diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **95,95%** dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.12.




TABEL 3.12
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE 3
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,10	86,40	94,84%	Baik	
2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	77,83	69,12	88,81%	Cukup	
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	89,50	93,27	104,21%	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			95,95%	BAIK	

1. INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

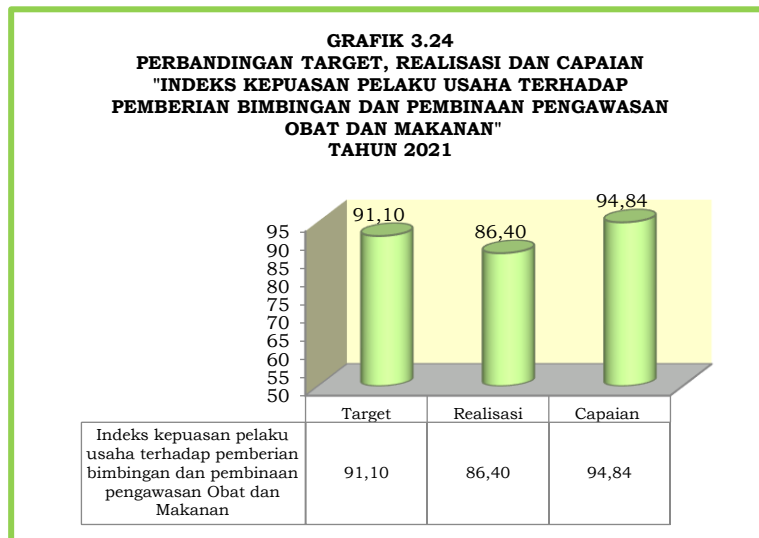
Indeks kepuasan pelaku usaha merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/coaching clinic, konsultasi, focus group discussion (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survey ini adalah: (1). Aspek bimbingan dan pembinaan; (2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan; (3). Aspek penanganan saran dan masukan; (4). Aspek manfaat; (5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan; dan (6). Aspek pengetahuan dan pemahaman.

TABEL 3.13
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,10	86,40	94,84%	Baik	



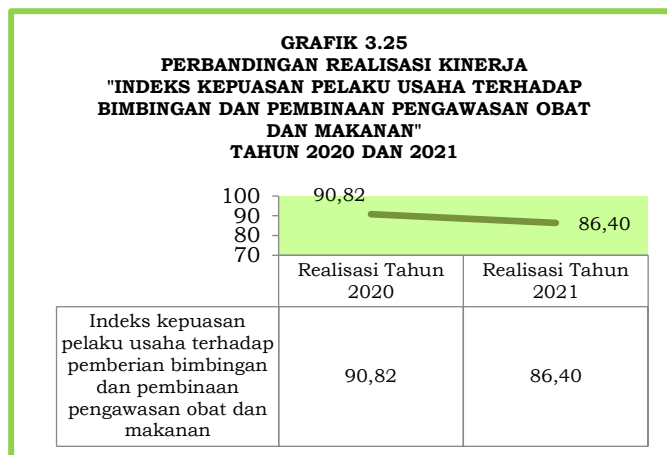
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021



Pada tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 91,10. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat sebesar

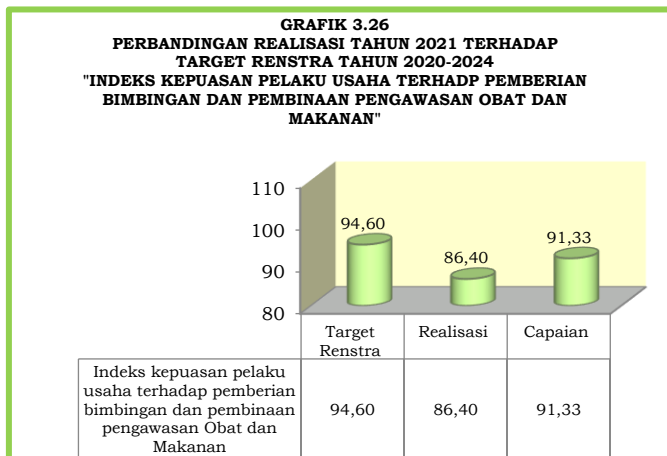
86,40. Dengan demikian nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar **94,84%** dengan kriteria **Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020

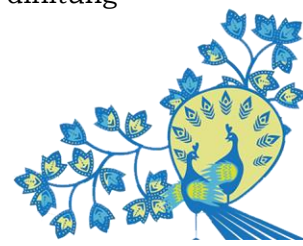


Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 sebesar 86,40 sedangkan pada tahun 2020 sebesar 90,82, terjadi penurunan sebesar 4,42.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

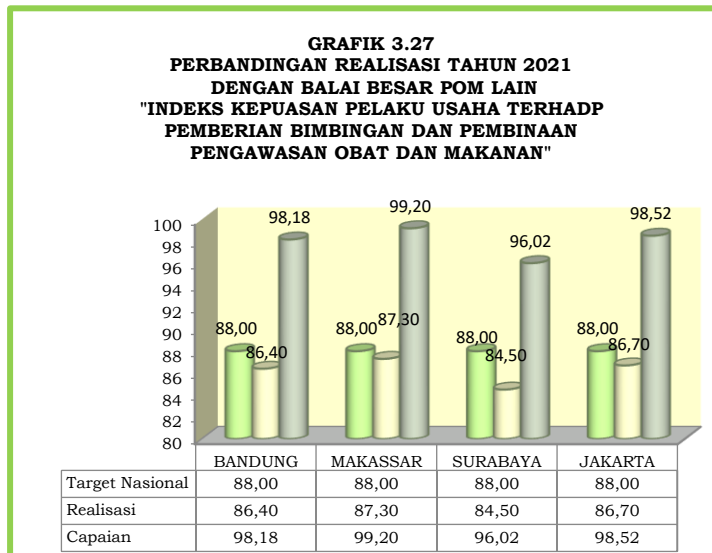


Pada tahun 2021, target indikator tersebut yang ditetapkan pada akhir periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 94,60. Jika capaian kinerja pada tahun 2021 dihitung



terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar **91,33%** dengan kriteria **Baik**.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja dari Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan secara berturut-turut yaitu : Balai Besar POM di Makassar (87,30), Balai Besar POM di Jakarta (86,70), Balai Besar POM di Bandung (86,40) dan

Balai Besar POM di Surabaya (84,50). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (88,00), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Makassar (99,20%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.27.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN PADA TAHUN 2021

Penyebab keberhasilan capaian kinerja indikator tersebut, yaitu:

- ☰ Layanan Informasi dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran Obat dan Makanan
- ☰ Berbagai Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen di Bidang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung secara rutin berdampak pada peningkatan pemahaman dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai peraturan yang berlaku.

Alternative solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja, antara lain:

- ☰ Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen.



- ☪ Bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait Obat dan Makanan lebih fokus pada materi yang berdampak langsung pada percepatan perijinan/sertifikasi pelaku usaha.
- ☪ Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi diperoleh hasil bahwa pelaku usaha yang terlibat proses registrasi di Badan POM merasakan manfaat bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh petugas BBPOM Di Bandung. Petugas akan terus meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih responsif dan dapat menyampaikan informasi dengan lebih jelas sehingga dapat dipahami oleh pelaku usaha. BBPOM Di Bandung juga akan selalu berkoordinasi dengan petugas Badan POM agar proses pendaftaran terutama untuk pelaku UMKM dapat terlaksana dengan cepat dan tepat.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- ☪ Layanan Informasi dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran Obat dan Makanan melalui tatap muka, whatsapp Kabayan, Telepon, email, media social.



Gambar 3.6 Layanan Informasi

- ☪ Pada tanggal 5-6 April 2021 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Registrasi Pangan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan yang diikuti oleh 36 pelaku usaha yang telah diaudit PSB oleh Balai Besar POM Di Bandung. Pelaku usaha didampingi dan dibantu untuk melakukan pendaftaran akun dan pendaftaran produk pangan olahan secara online oleh petugas dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Balai Besar POM Di Bandung untuk percepatan mendapatkan nomor izin edar. Output dari kegiatan Desk Registrasi ini adalah telah berhasil menerbitkan 23 nomor izin edar (NIE), 12 akun perusahaan dan 2 rekomendasi pemeriksaan sarana.
- ☪ Pada tanggal 23 Februari 2021 diadakan kegiatan coaching clinic terhadap para pelaku usaha UMKM Pangan di Kabupaten Cirebon terkait kendala-



kendala yang mereka hadapi dalam hal menempuh proses untuk mendapatkan rekomendasi pemeriksaan sarana dalam rangka pendaftaran pangan

- ☪ Pada tanggal 12 Februari 2021, diadakan FGD Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan dengan Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Produksi Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang, Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong, Kemasan Yang Digunakan Untuk Pangan dan Bahan Lainnya – Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan – Kedeputusan III Bidang Pengawasan Pangan Olahan – Badan POM RI) salam rangka salah satu upaya peningkatan kompetensi dan komitmen SDM Balai Besar POM di Bandung dalam kegiatan sertifikasi sehingga sarana produksi dan sarana distribusi yang mengajukan permohonan dalam rangka sertifikasi dapat memenuhi ketentuan dan dapat diselesaikan sesuai timeline yang telah ditetapkan.
- ☪ Dilaksanakan pembinaan kepada para pelaku usaha obat tradisional dalam acara Workshop Registrasi Produk Herbal bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran pada tanggal 7 Juli 2021 melalui zoom meeting.
- ☪ Dilaksanakan pembinaan ke para pelaku usaha melalui Bimtek Pendaftaran Pangan melalui pertemuan tatap muka pada tanggal 28 September 2021 di Kabupaten Cirebon.
- ☪ Dilaksanakan Sosialisasi Mekanisme Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Cimahi melalui kegiatan tatap muka pada tanggal 31 November sampai dengan 2 Desember 2021.



Gambar 3.7 Kegiatan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha

- ☪ Telah dilaksanakan kegiatan Desk CAPA di bulan Januari, Maret, Juni, Agustus dan September. Penyelenggaraan kegiatan Desk CAPA secara rutin setiap 1-2 bulan sehingga kendala-kendala yang dialami oleh pelaku usaha dalam rangka pemenuhan CAPA-nya lebih diminimalisir hal ini berdampak pada pencapaian jumlah rekomendasi yang dikeluarkan semakin meningkat. Pada tahun 2021 ini sudah dilaksanakan 6 kali kegiatan Desk CAPA, yaitu tanggal 29 Januari 2021, 19 Maret 2021, 4 Juni 2021, 22 Juni 2021, 20 Agustus 2021, 17 September 2021 dan Desk CAPA yang diselenggarakan secara tatap muka pada 2 November 2021.





Gambar 3.8 Kegiatan Desk CAPA

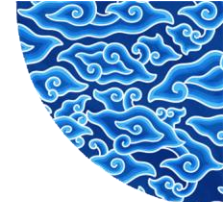
G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.


2. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu: (1). Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*); dan (2). Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

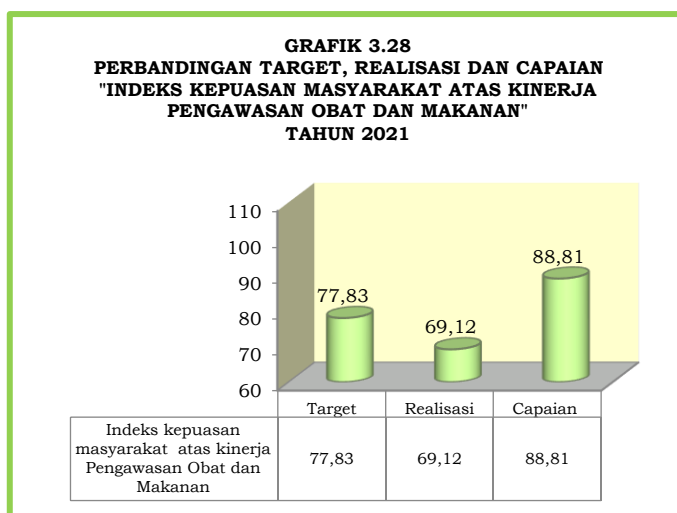




TABEL 3.14
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	77,83	69,12	88,81%	Cukup	

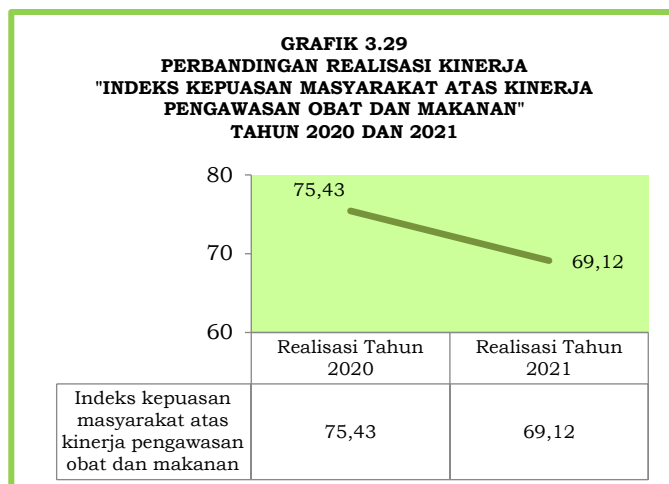
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021



Pada tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 77,83. Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat sebesar 69,12. Dengan demikian nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah

sebesar **88,81%** dengan kriteria **Cukup**.

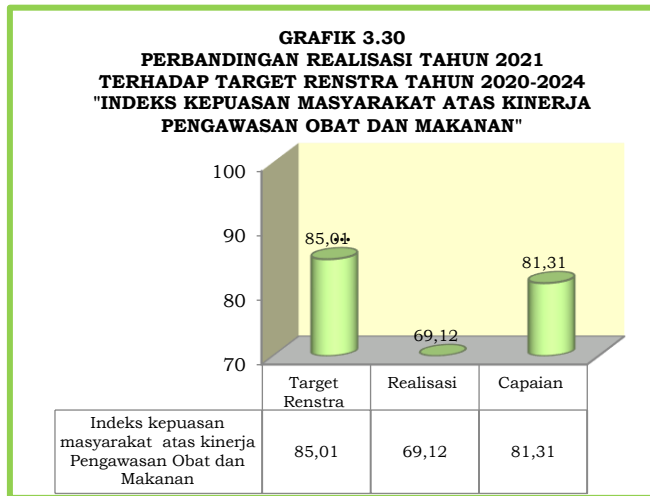
B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020



Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 sebesar 69,12 sedangkan pada tahun 2020 sebesar 75,43, terjadi penurunan sebesar 6,31.

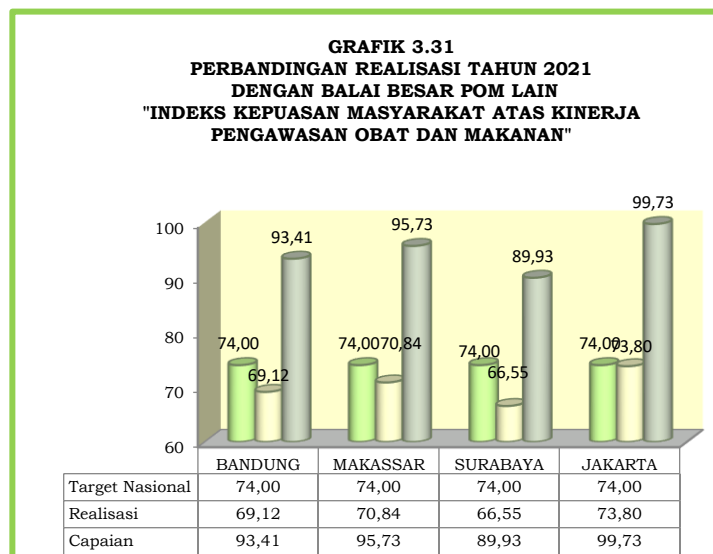


C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Pada tahun 2021, target indikator tersebut yang ditetapkan pada akhir periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 85,01. Jika capaian kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar **81,81%** dengan kriteria **Cukup**.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja dari Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan secara berturut-turut yaitu : Balai Besar POM di Jakarta (73,80), Balai Besar POM di Makassar (70,84), Balai Besar POM di Bandung (69,12) dan Balai Besar POM di

Surabaya (66,55). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (74,00), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Jakarta (99,73%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.31.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Penyebab keberhasilan capaian kinerja indikator tersebut, yaitu:

- ☞ Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung Pengawasan Pre Market serta Bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait Obat dan Makanan



- ☪ Pengawasan Post Market melalui kegiatan Inspeksi terhadap sarana produksi, pelayanan dan distribusi Obat dan Makanan Meningkatnya kegiatan KIE yang diselenggarakan bersama Tokoh Masyarakat maupun yang dilakukan melalui media sosial pada masa pandemic covid-19.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2021, antara lain :

- ☪ Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung
- ☪ Meningkatkan pengawasan PreMarket serta Bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait Obat dan Makanan
- ☪ Meningkatkan pengawasan Post Market melalui kegiatan Inspeksi terhadap sarana produksi, pelayanan dan distribusi Obat dan Makanan.
- ☪ Melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan KIE. Mengembangkan kegiatan KIE sesuai dengan karakteristik wilayah Jawa Barat.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

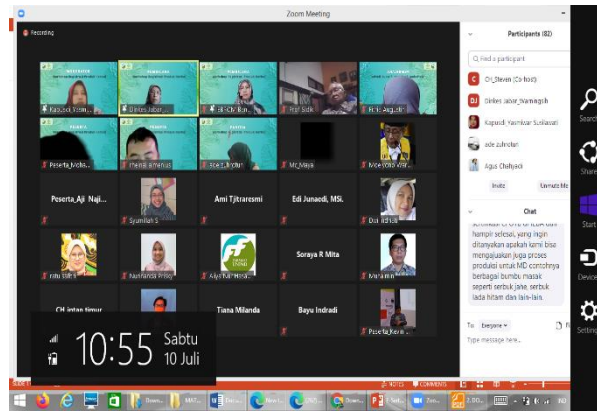
- ☪ Layanan Informasi dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran Obat dan Makanan, Layanan Pengujian Pihak Ketiga dan Pengaduan Konsumen melalui tatap muka, whatsapp Kabayan, Telepon, email, media social.



Gambar 3.9 Layanan Informasi

- ☪ Bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait Obat dan Makanan yang dialihkan dari luring menjadi daring pada masa pandemic Covid-19.





Gambar 3.10 Kegiatan Bimtek kepada Pelaku Usaha secara Daring

- ☛ Pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung. Inspeksi terhadap sarana produksi, pelayanan dan distribusi Obat dan Makanan.



Gambar 3.11 Kegiatan Pengawasan Barang Beredar

- ☛ Kegiatan KIE yang diselenggarakan bersama Tokoh Masyarakat maupun yang dilakukan melalui media sosial pada masa pandemic covid-19.



Gambar 3.12 Kegiatan KIE bekerjasama dengan tokoh masyarakat

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



3. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM


Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Pada tahap interpretasi, untuk memudahkan penafsiran dan mengacu pada pengelompokan kinerja unit pelayanan berdasarkan PemanPAN dan RB Nomo 14 Tahun 2017, indeks yang diperoleh dikelompokkan sebagai berikut:

TABEL 3.15
NILAI KONVERSI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM

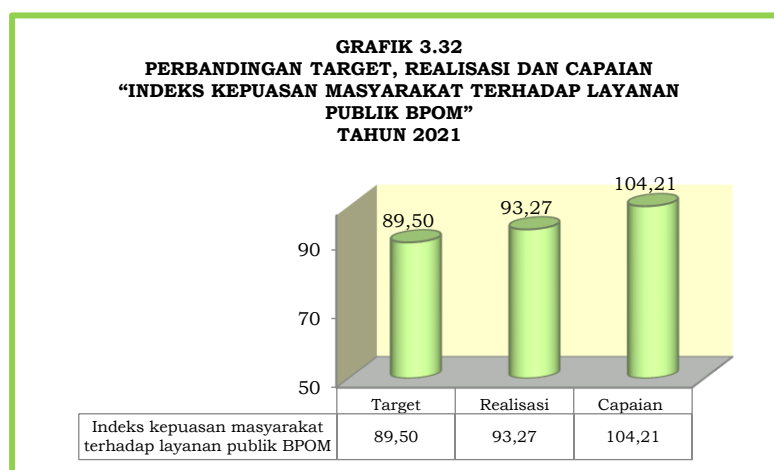
NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.16

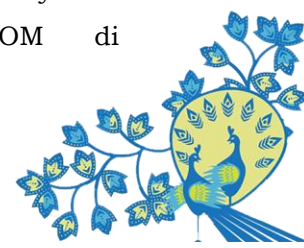
TABEL 3.16
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM”
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	89,50	93,27	104,21%	Baik 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

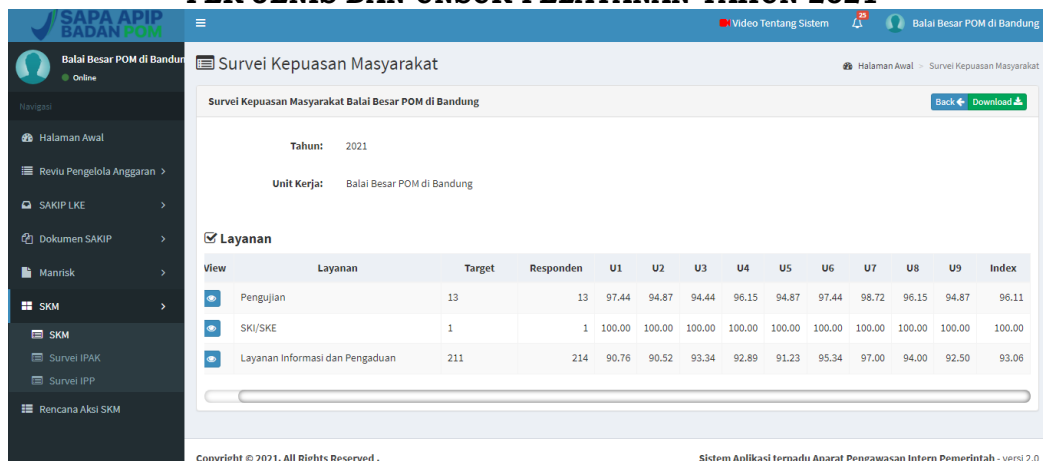


Pada 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 89,50. Hasil survey menunjukkan Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM di

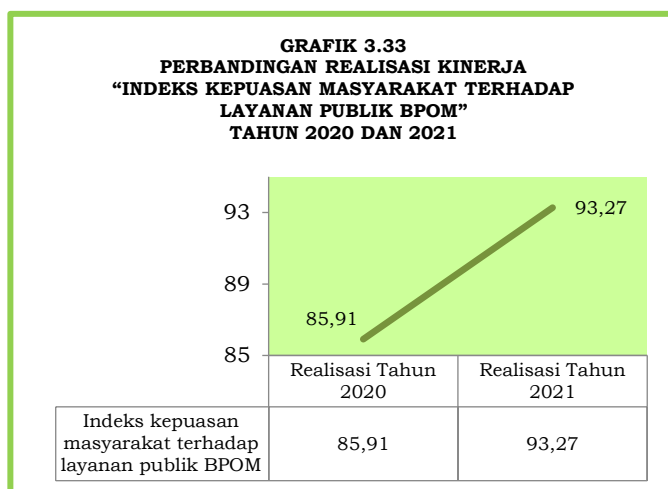


Provinsi Jawa Barat sebesar 93,27 (Sangat Baik). Dengan demikian nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar **104,21%** dengan kriteria **Baik**. Dengan rincian indeks per unsur pelayanan publik sebagai berikut:

GAMBAR 3.17
PENILAIAN
“INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM”
PER JENIS DAN UNSUR PELAYANAN TAHUN 2021



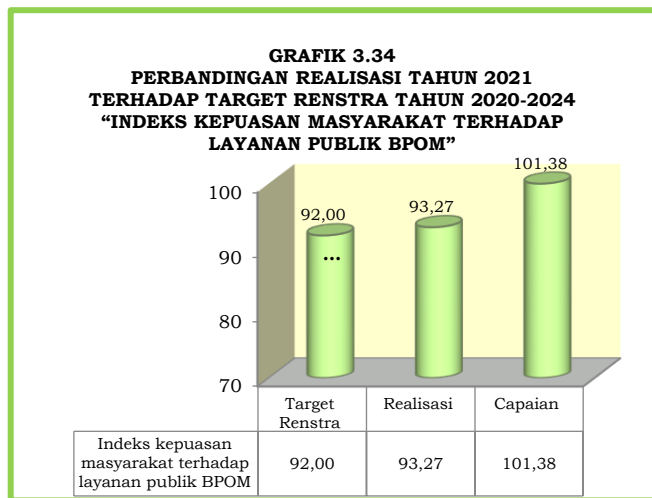
B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020



Capaian Indikator Kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM di Provinsi Jawa Barat tahun 2021 (93,27) lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2020 (85,91).

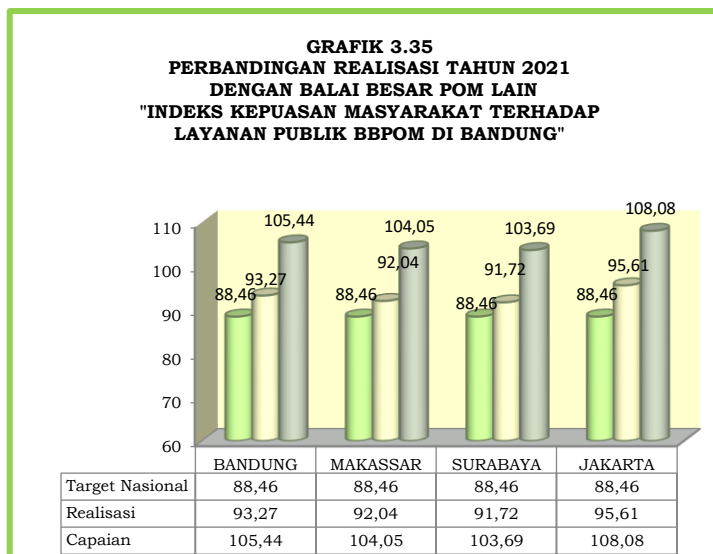


C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Pada tahun 2021, target indikator tersebut yang ditetapkan pada akhir periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 92,00. Jika capaian kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian pada sebesar **101,38%** dengan kriteria **Baik**.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja dari Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM secara berturut-turut yaitu : Balai Besar POM di Jakarta (95,61), Balai Besar POM di Bandung (93,27), Balai Besar POM di Makassar (92,04) dan Balai Besar POM di Surabaya (91,72). Jika realisasi kinerja indikator tersebut

dibandingkan terhadap target nasional (88,46), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Jakarta (108,08%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan IV tahun 2021 disebabkan antara lain:

- ☰ Seluruh kegiatan pelayanan publik BBPOM di Bandung mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan BBPOM di Bandung dan Surat Keputusan Kepala BBPOM di Bandung Nomor HK.02.02.12A.12A5.05.21.58 Tahun 2021 tentang Penetapan



Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. Selain itu, telah standar pelayanan publik BBPOM di Bandung telah dipublikasikan kepada pihak eksternal melalui surat kabar, baliho/banner, media sosial, website BBPOM di Bandung.

- ☰ Seluruh petugas pelayanan publik di lingkungan BBPOM di Bandung telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala BBPOM di Bandung Nomor HK.02.02.12A.12A5.05.21.54 Tahun 2021 tentang Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung.
- ☰ BBPOM di Bandung memiliki maklumat pelayanan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda yang telah dipublikasikan melalui media sosial BBPOM di Bandung, media cetak dan media elektronik.



Gambar 3.13
Maklumat Pelayanan BBPOM di Bandung
Dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda

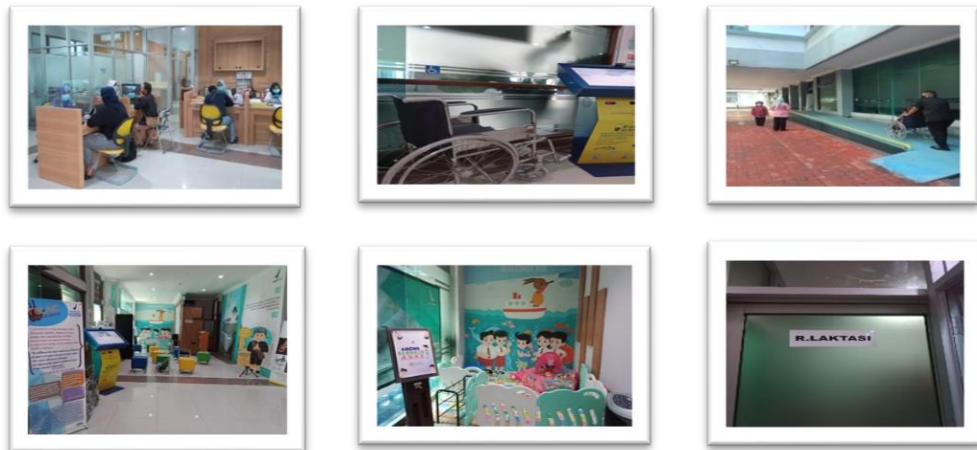
- ☰ BBPOM di Bandung telah memiliki SOP Mikro terkait seluruh pelayanan publik dan secara berkala dilakukan kaji ulang dokumen.
- ☰ Inovasi Pelayanan Publik BBPOM di Bandung antara lain:
 - BBPOM BANDUNG SMART CONNECTION yaitu: subsite Balai Besar POM di Bandung menyediakan bagian khusus yang berisi berbagai link aplikasi dan media pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan terintegrasi dengan Bandung smart city.
 - LACAK PASTI (Layanan Administrasi dan Pelacakan + Pembayaran Pakai Sistem Elektronik) yaitu: Aplikasi publik untuk melacak status pengujian sampel pihak ke-3, dan informasi mengenai layanan pengujian Balai Besar POM di Bandung, seperti Tarif dan Parameter Uji, Prosedur Pelayanan, Persyaratan, dan FAQ.
 - KABAYAN (Kepala Balai Melayani) yaitu: Layanan khusus whatsapp mengenai pengaduan dan informasi gratis seputar obat, pangan, obat tradisional, suplemen kesehatan hingga kosmetik.
 - KELOM GEULIS (Kenalan dengan BBPOM di Bandung Berbagi Edukasi dan Layanan Informasi, Sae Pisan) yaitu: berupa kegiatan KIE yang dilakukan melalui IG live maupun bekerja sama dengan radio



- SiPETA (Sistem PELayanan TAMu di Balai Besar POM di Bandung) yaitu: berupa buku tamu elektronik dan nomor antrian layanan publik BBPOM di Bandung, memuat Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), informasi layanan publik Badan POM dan menampilkan status kehadiran pejabat struktural BBPOM di Bandung secara real time.
 - Si ITEUNG (Siap Beri Informasi 'Tuk Seluruh Negeri' yaitu: berupa layanan informasi/ konsultasi tatap muka secara online/ daring. Pelanggan yang akan berkonsultasi mendaftar melalui WA 0821 2893 6046.
 - WARTA POPA (Warta Peduli Obat dan Pangan Aman) yaitu: program penyampaian berita dan informasi kepada masyarakat tentang Peduli Obat dan Pangan Aman, berupa webinar, seminar, sosialisasi melalui infografis/ media massa.
 - MELODI POPA (Melodi Peduli Obat dan Pangan Aman) yaitu: merupakan kumpulan lagu tentang Peduli Obat dan Pangan Aman yang digunakan sebagai salah satu alat mengajar bagi peserta KIE/ bimtek.
 - KERJASAMA TV DAN RADIO DESA DALAM IKLAN LAYANAN MASYARAKAT yaitu: merupakan kerja sama BBPOM di Bandung dengan Desa Cibiru Wetan Kab. Bandung (Radio TV Swarga) dalam penyebaran informasi Peduli Obat dan Pangan Aman. Bertujuan untuk menjaga agar program Desa Pangan Aman dapat terus berjalan dan berkelanjutan.
 - KIE MELALUI LOMBA PEMBUATAN FILM PENDEK OLEH PRAMUKA PENGGALANG DAN PENEGAK SE- JAWA BARAT yaitu: merupakan kerja sama BBPOM di Bandung dengan Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Barat dalam penyebaran informasi Peduli Obat dan Pangan Aman. Bertujuan untuk meningkatnya peran serta Pramuka Penggalang dan Penegak dalam mendukung peningkatan efektifitas KIE Obat dan Makanan Aman di wilayah Provinsi Jawa Barat.
 - LAYANAN SERTIFIKASI SECARA DARING yaitu: merupakan layanan sertifikasi secara daring di lingkungan BBPOM di Bandung. Memungkinkan tetap dilakukannya pemeriksaan/ audit sarana pada kondisi tidak dapat dilakukan secara onsite/ offline
 - SOSIALISASI DAN DESK REGISTRASI DALAM RANGKA JEMPUT BOLA yaitu: Kegiatan diikuti oleh 36 pelaku usaha di wilayah Jawa Barat. Pada kegiatan tersebut telah diterbitkan 23 Nomor Izin Edar (NIE), 12 akun perusahaan dan 2 rekomendasi PSB.
- ☪ Seluruh pelayanan publik dan inovasi tersebut diatas telah dipublikasikan pada website BBPOM di Bandung, media sosial BBPOM di Bandung, WAG Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, media cetak dan media elektronik.



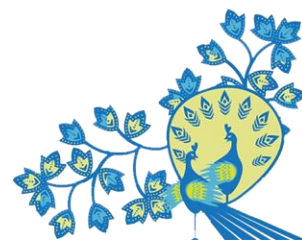
- ☪ Adanya SK *Reward and Punishment* Pelayanan Publik dan laporan pengaduan serta evaluasi *reward and punishment*. Selain itu, Publikasi *reward Employee of the Month* di Ruang Pelayanan Publik.
- ☪ Sarana pelayanan publik BBPOM di Bandung sudah terpusat dalam satu ruangan, meliputi: Layanan Informasi, Layanan Pengujian, Layanan Pengaduan, dan Layanan Sertifikasi. Selain itu, sarana ruang tunggu pelayanan telah dilengkapi : Free Coffee, Akses Wifi Gratis, Kantin Kejujuran, Kotak Saran, Media Cetak/Media siar (TV), Area Bermain Anak, Sarana untuk Disabilitas dan Ruang Laktasi serta area parkir khusus tamu.



Gambar 3.14 Sarana Pelayanan Publik BBPOM di Bandung

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

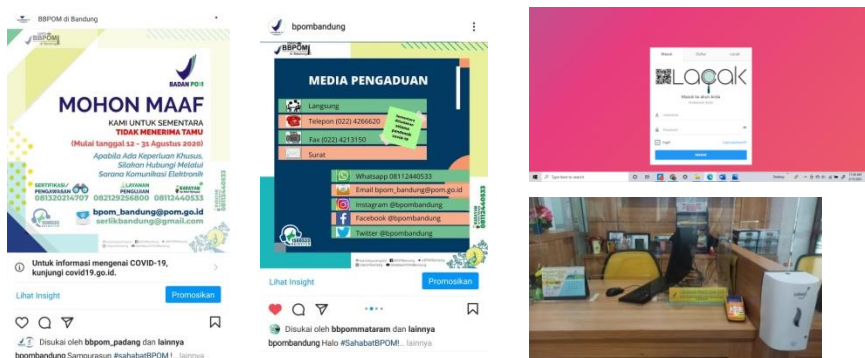
- ☪ Pemenuhan terhadap Standar Pelayanan Publik
- ☪ Melakukan perbaikan sesuai dengan saran dan masukan responden Balai Besar POM di Bandung.
- ☪ Peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan, sosialisasi atau webinar/seminar.
- ☪ Menyusun dan melaksanakan Rencana Tindak Lanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2020.
- ☪ Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan FKP berupa kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Publik yang diselenggarakan pada tanggal 05 Maret 2021 yang melibatkan berbagai stakeholder terkait secara daring dan luring.



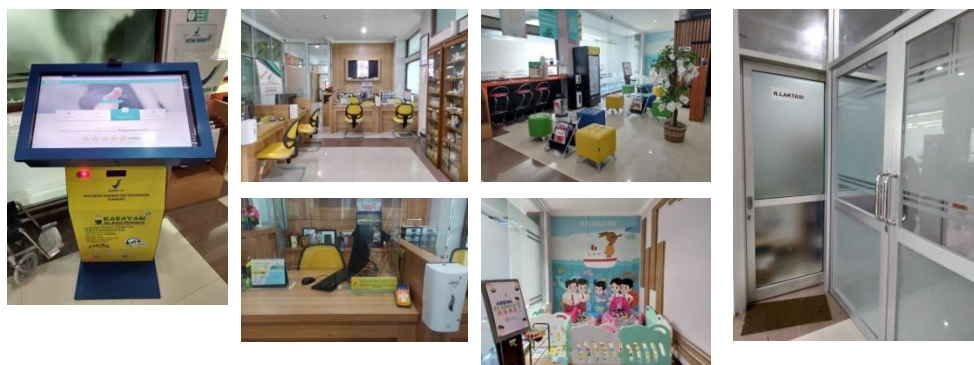
F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan, yaitu :

- ☰ Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Publik yang diselenggarakan pada tanggal 05 Maret 2021 yang melibatkan berbagai stakeholder terkait secara daring dan luring, dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi tentang terobosan yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandung dalam rangka perbaikan sistem pelayanan publik serta menjaring masukan dari pelaku usaha dan mitra kerja untuk membangun sistem pelayanan publik Balai Besar POM di Bandung menjadi lebih baik.
- ☰ Kegiatan Pelayanan publik Balai Besar POM di Bandung, antara lain adanya beberapa inovasi terkait pelayanan publik antara lain LACAQ, fasilitasi mesin EDC untuk pembayaran billing pengujian pihak ketiga, serta layanan Informasi dan pengaduan konsumen yang diberikan melalui berbagai media yaitu tatap muka, whatsapp Kabayan dan Sipetrik, telpon, email, media sosial lainnya, adanya maklumat pelayanan dll.



- ☰ Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik Balai Besar POM di Bandung.



G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Rekomendasi perbaikan ke depan adalah sebagai berikut:

- ☰ Menyusun Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021.
- ☰ Melaksanakan seluruh Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021.
- ☰ Monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021.

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

SASARAN KEGIATAN KE-4




MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 6 (enam) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keenam indikator diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **101,38%** dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.18.

TABEL 3.18
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-4
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	96,00%	92,10%	95,94%	Baik	
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	64%	56,14%	87,72%	Cukup	
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00%	101,63%	115,48%	Sangat Baik	
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00%	51,13%	89,71%	Cukup	




INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74,00%	86,16%	116,43%	Sangat Baik	
6. Indeks Pelayanan Publik BPOM di Bandung	4,35	4,48	102,99%	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			101,38%	BAIK	

Penjelasan capaian indikator sasaran kegiatan ke 4 tersebut adalah sebagai berikut :

1. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diukur rata-rata jumlah persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT, persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d tahun n.

TABEL 3.19
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN”
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	96,00%	92,10%	95,94%	Baik	



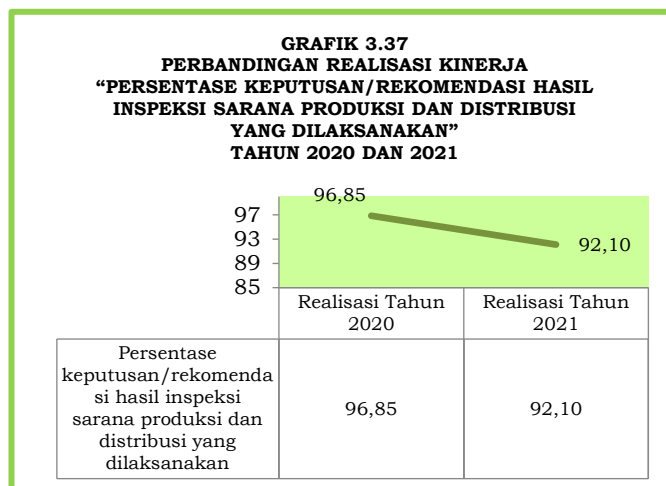
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021



Pada tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator kinerja kegiatan ini adalah sebesar 96,00% sedangkan realisasinya adalah sebesar 92,10% dengan rincian persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100%; persentase rekomendasi hasil

inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 99,08%; persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain sebesar 69,33%; dan persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **95,94%** dengan kriteria **Baik**.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020

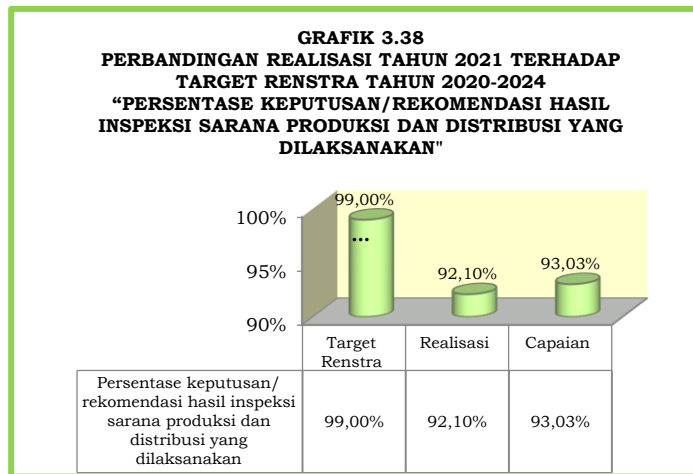


Realisasi Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebesar 96,85% (target 87,00%) sedangkan pada tahun 2021 sebesar 92,10% (target 96,00%) dengan

demikian pada tahun 2021 terdapat penurunan realisasi sebesar 4,75%.

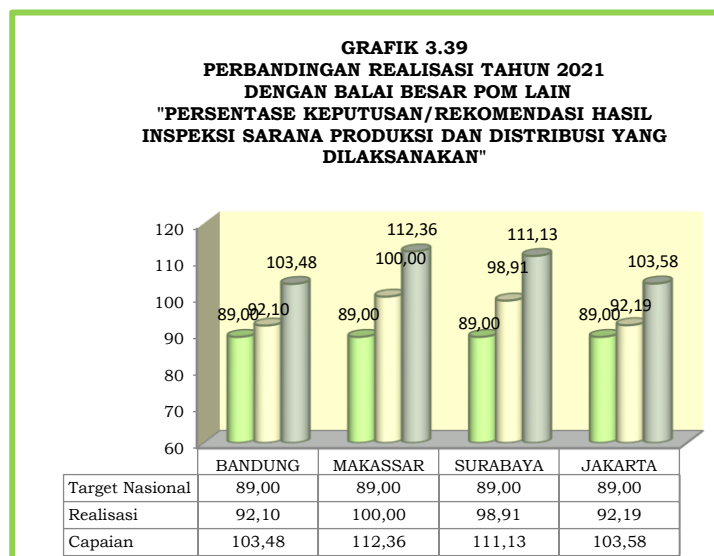


D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator kegiatan ini adalah sebesar 99,00% sedangkan realisasi pada tahun 2021 adalah sebesar 92,10% sehingga jika dihitung terhadap target tersebut maka capaian kerjanya adalah sebesar **93,03%**.

E. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan secara berturut-turut yaitu : Balai Besar POM di Makassar 100%, Balai Besar POM di Surabaya 98,91%, Balai Besar POM di Jakarta 92,19% dan

Balai Besar POM di Bandung 92,10%. Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (89%) maka urutan capaian kerjanya berturut-turut adalah sebagai berikut Balai Besar POM di Bandung (103,48%), Balai Besar POM di Jakarta (103,58%), Balai Besar POM di Surabaya (111,13%) dan Balai Besar POM di Makassar (112,36%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.39.

F. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Penurunan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2021 disebabkan antara lain:



- ☸ Penurunan respon dari stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.
- ☸ Penurunan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ☸ Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis yang dipersyaratkan melalui pelatihan/workshop/bimtek/diseminasi/webinar mengenai CPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.
- ☸ Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen.
- ☸ Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.
- ☸ Berbagai upaya telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindak lanjut yang direncanakan, antara lain: pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan dilakukan setiap bulan, serta dilaporkan melalui Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Inspeksi Tahun 2021.

G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Rekomendasi perbaikan ke depan adalah sebagai berikut:

- ☸ Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.
- ☸ Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA


Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

2. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diukur rata-rata jumlah persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor s.d tahun berjalan.



TABEL 3.20
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI
OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN”
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	64%	56,14%	87,72%	Cukup 

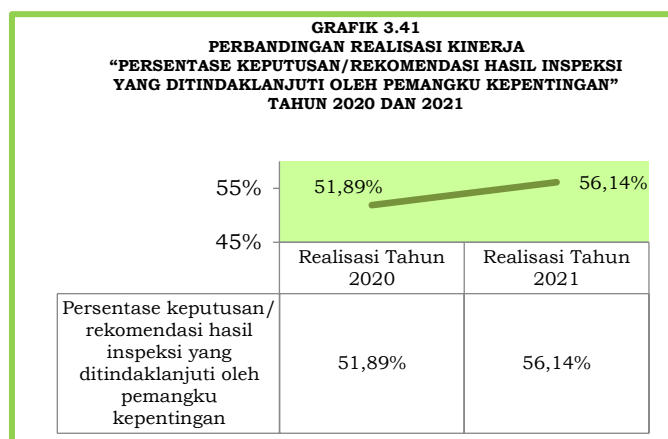
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021



Pada tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator kinerja kegiatan ini adalah sebesar 64% sedangkan realisasinya adalah sebesar 56,14%. Dengan rincian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh

pelaku usaha sebesar 62,28% dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor sebesar 50%. Dengan demikian persentase capaian indikator tersebut adalah sebesar **87,72%** dengan kriteria **Cukup**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020



Pada tahun 2020 realisasi indikator ini adalah sebesar 51,89% (target 56,90%) dan realisasi pada tahun 2021 adalah sebesar 56,14% (target 64%). Jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka terdapat peningkatan realisasinya sebesar 4,25%.

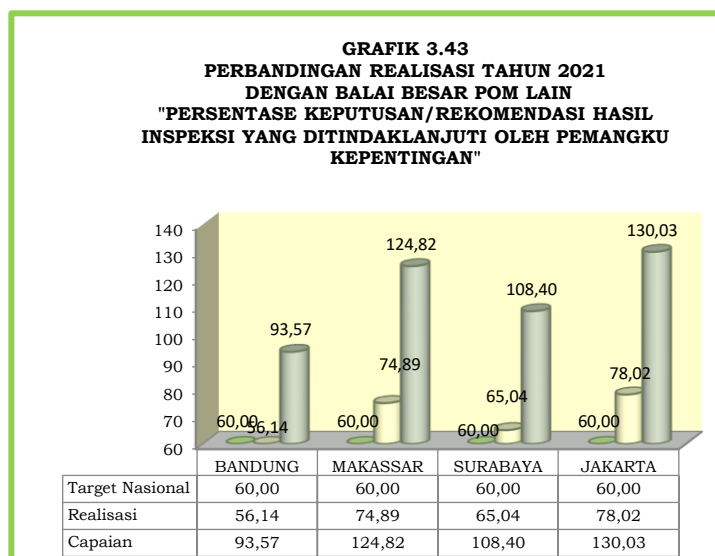


C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Target akhir periode Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator kegiatan ini adalah sebesar 85,00% sedangkan realisasi pada tahun 2021 adalah sebesar 56,14%, jika dihitung terhadap target tersebut maka capaian kinerjanya adalah sebesar 66,05%.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan secara berturut-turut sebagai berikut: Balai Besar POM di Bandung 56,14%, Balai Besar POM di Surabaya 65,04%, Balai Besar POM di

Jakarta 78,02% dan Balai Besar POM di Makassar 74,89%. Target nasional indikator ini adalah sebesar 60% sehingga jika dibandingkan dengan target nasional tersebut maka urutan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut : Balai Besar POM di Bandung 93,57%, Balai Besar POM di Surabaya 108,4%, Balai Besar POM di Makassar 124,82% dan Balai Besar POM di Jakarta 130,03%. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.43.



E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Peningkatan capaian kinerja kegiatan tersebut pada tahun 2021 disebabkan antara lain:

- ☪ Meningkatkan respon sarana terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan, dimana saat ini setiap surat tindak lanjut disampaikan langsung melalui surat elektronik kepada sarana, sehingga dapat dipastikan pelaku usaha menerima dan merespon surat tindak lanjut tersebut
- ☪ Meningkatnya kepatuhan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan terhadap pemenuhan regulasi, sehingga rekomendasi yang diterbitkan lebih sedikit.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain:

- ☪ Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan form *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.
- ☪ Melengkapi data kontak berupa nomor handphone dan alamat email pemilik atau penanggung jawab sarana produksi dan distribusi
- ☪ Melakukan monitoring dan evaluasi *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) secara berkala sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.

F. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Rekomendasi perbaikan ke depan adalah sebagai berikut :

- ☪ Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha
- ☪ Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ☪ Melakukan pertemuan intensif dengan pemangku kepentingan melalui Kegiatan Penguatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Pimpinan Daerah dan Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan.
- ☪ Melakukan komunikasi pada saat pemeriksaan sarana produksi dan distribusi terkait penyampaian hasil tindak lanjut dari Balai Besar POM di Bandung
- ☪ Melakukan evaluasi internal terkait data CAPA yang disampaikan oleh pelaku usaha




G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

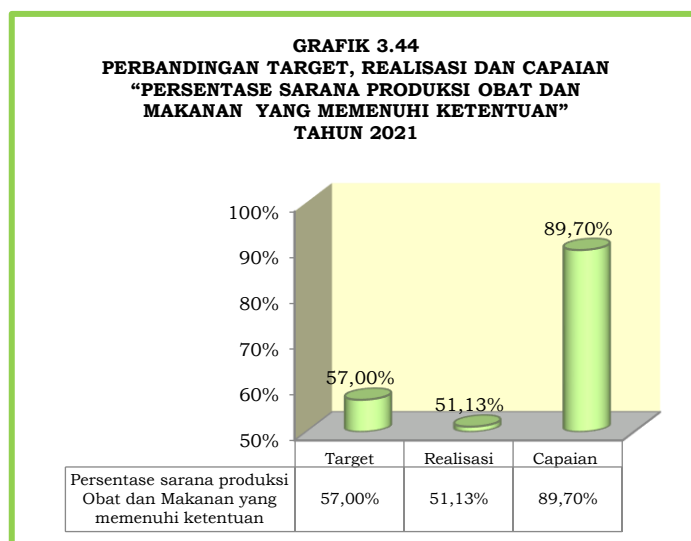
3. PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun n dengan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada tahun n.

TABEL 3.21
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN”
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00%	51,13%	89,70%	Cukup	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021



Target indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 adalah sebesar 57% sedangkan realisasinya adalah sebesar 51,13%. Dengan demikian capaian kinerja indikator tersebut adalah sebesar **89,70%** dengan kriteria **Cukup**. Rincian hasil pemeriksaan

tersebut sebagai berikut jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebanyak 158 sarana sedangkan sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa adalah sebanyak 309 sarana.



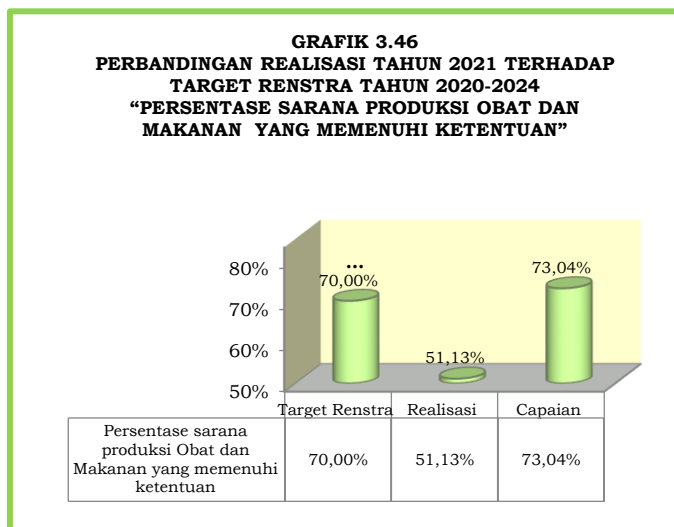
B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 TERHADAP TAHUN 2020



Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2021 adalah sebesar 51,13% sedangkan pada tahun 2020 adalah 56,59% sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka realisasi pada tahun 2021 terdapat penurunan

sebesar 5,46%.

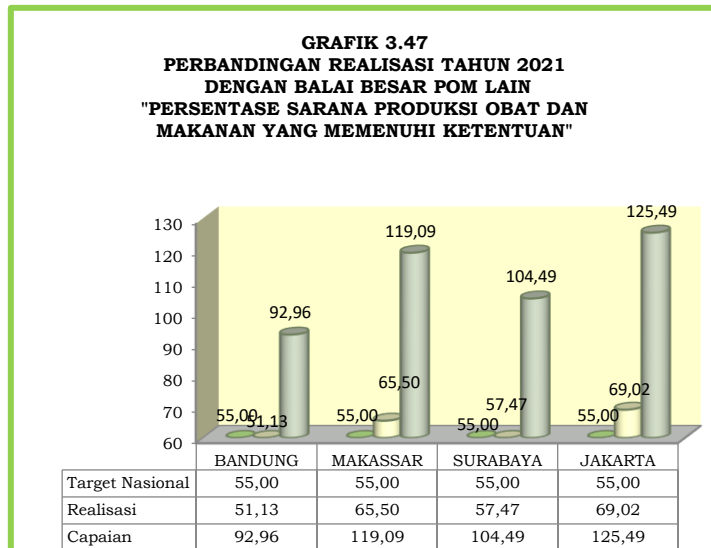
C. REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Target akhir periode Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator kegiatan ini adalah sebesar 70,00%. Realisasi kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 51,13% maka jika dihitung terhadap target rencana strategis tersebut capaian kerjanya adalah sebesar 73,04% .



D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu sebagai berikut: Balai Besar POM di Bandung 51,13%, Balai Besar POM di Surabaya 57,47%, Balai Besar POM di Jakarta 69,02% dan Balai Besar POM di

Makassar 65,5%. Jika dibandingkan dengan target nasional (55%) maka capaian kinerjanya berturut-turut sebagai berikut: Balai Besar POM di Bandung 92,96%, Balai Besar POM di Surabaya 104,49%, Balai Besar POM di Makassar 119,09% dan Balai Besar POM di Jakarta 125,49%. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.47.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Penurunan capaian kinerja kegiatan tersebut pada tahun 2021 disebabkan antara lain:

- ☛ Pemenuhan kepatuhan GMP sarana produksi obat dan makanan kurang terpenuhi.
- ☛ Penurunan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.
- ☛ Pelaksanaan pelayanan *help desk* untuk pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana produksi belum maksimal.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain:

- ☛ Meningkatkan kompetensi petugas Balai Besar POM di Bandung dengan mengikuti pelatihan,
- ☛ Melakukan monitoring dan evaluasi *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) secara berkala sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.



G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Rekomendasi perbaikan ke depan adalah sebagai berikut:

- ☰ Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan form *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.
- ☰ Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ☰ Melaksanakan monitoring dan evaluasi bulanan terhadap perencanaan yang dibuat pada awal tahun
- ☰ Membuat *tools* untuk memudahkan monitoring dan evaluasi CAPA sehingga pemantauan evaluasi CAPA oleh petugas menjadi lebih terkendali

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA


Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

4. PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

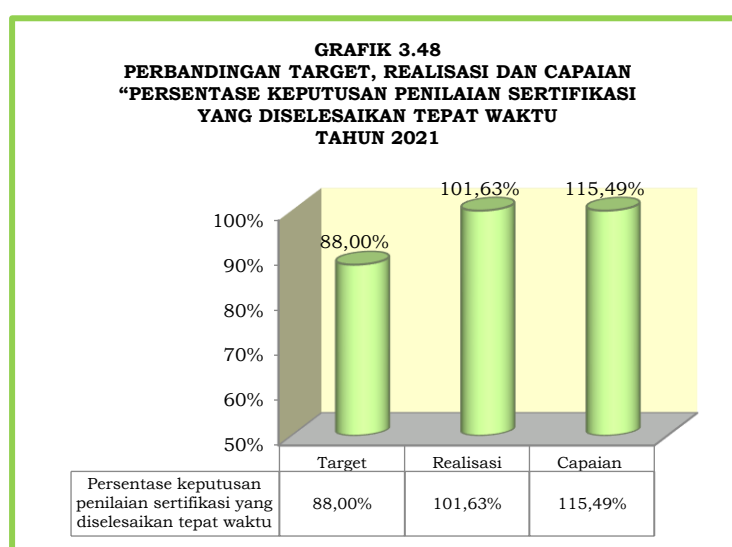
Per sentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diukur dengan membandingkan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) dengan jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: (1). Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; (2). Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; (3). Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; (4). Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; (5). Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; (6). Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; (7). Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK dan (8) Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga.



TABEL 3.22
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI
YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU”
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00%	101,63%	115,48%	Sangat Baik 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021



Pada tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 88% yang merupakan target Penetapan Kinerja Tahun 2021. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 sebesar 101,63%.

Dengan rincian jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) sebanyak 2.749 keputusan dan jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) sebanyak 2.705 permohonan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **115,48 %** dengan kriteria **Sangat Baik**.

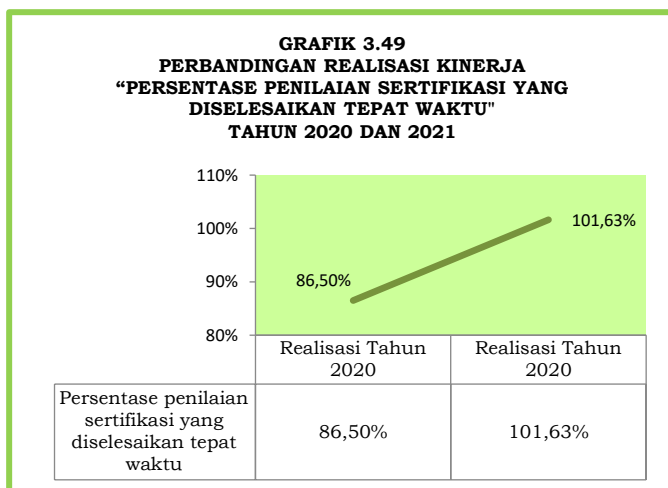
TABEL 3.23
HASIL PENILAIAN SERTIFIKASI
TAHUN 2021

No.	Rekomendasi	Satuan	Jumlah Permohonan	Jumlah sertifikat yang diterbitkan tepat waktu	% sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	0	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	1.537	1.495	97,45
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	487	571	117,25



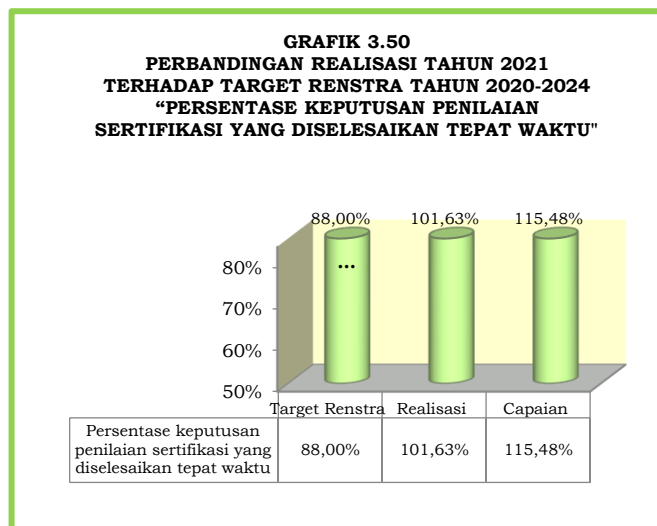
No.	Rekomendasi	Satuan	Jumlah Permohonan	Jumlah sertifikat yang diterbitkan tepat waktu	% sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	Sertifikat	690	689	99,86
TOTAL			2.705	2.749	101,63%

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020



Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 adalah sebesar 101,63% yang naik sebesar 15 % dibandingkan tahun 2020 yang realisasinya adalah 86,5%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

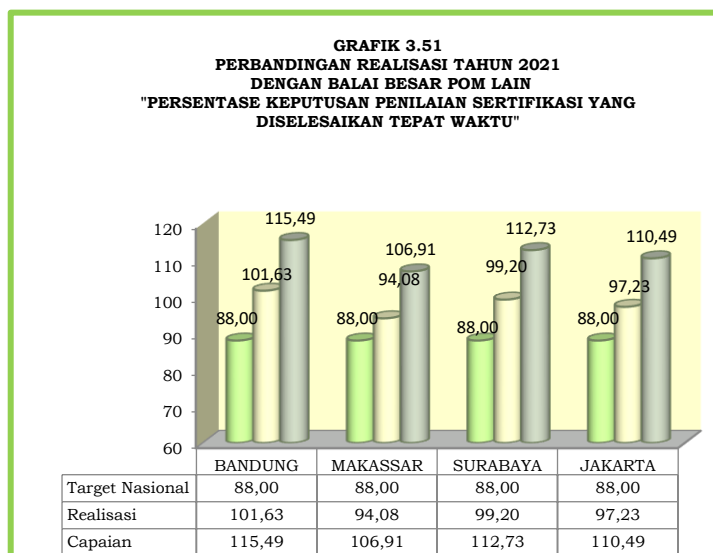


Target akhir periode Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 88,00%. Jika capaian kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerjanya sebesar 115,48% dengan kriteria **Sangat Baik**, pada tahun 2021 ini pencapaian kinerja

melebihi target sebesar 14%.



D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Apabila dibandingkan capaian dengan Balai Besar POM provinsi lain yang memiliki beban kerja yang sama, hasilnya sebagai berikut:

Jika dibandingkan dengan target Balai Besar POM di DKI Jakarta, Balai Besar POM di Surabaya dan

Balai Besar POM di Makassar tahun 2021, realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 (101,63%) lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Balai Besar POM di DKI Jakarta sebesar 97,23% (dengan target 85,00%), lebih tinggi dari realisasi Balai Besar POM di Surabaya dengan realisasi sebesar 99,20 % (dengan target 98%) dan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Balai Besar POM di Makassar yaitu sebesar 94,08% (dengan target 96%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.43.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2021 memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan adanya hal berikut:

- ☛ Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memudahkan pelaku usaha khususnya di bidang Obat dan Makanan dalam memenuhi persyaratan administrasi dalam rangka sertifikasi terkait perizinan usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS) berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Import (API).
- ☛ Adanya Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.01.1.2.03.21.125 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi



Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika, mempercepat waktu pemenuhan (time line) dikeluarkannya rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika.

- ✎ Adanya kebijakan Badan POM dalam penerapan CPOTB bertahap, memudahkan pelaku usaha obat tradisional yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dalam memenuhi persyaratan teknis dalam CPOTB.
- ✎ Terbitnya PerBPOM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, yang merupakan perubahan atas penerbitan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi pangan menjadi izin penerapan CPPOB yang memudahkan pelaku UMKM pangan dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin penerapan CPPOB untuk sarana produksinya sehingga UMKM Pangan tersebut dapat melanjutkan proses registrasi pangan.
- ✎ Terbitnya PerBPOM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Dan Mutu Pangan Olahan Di Sarana Peredaran sehingga mengubah pengajuan permohonan rekomendasi sarana distribusi untuk importir pangan yang sebelumnya diajukan ke UPT Balai Besar POM Di Bandung kini diajukan ke Badan POM melalui Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.
- ✎ Keterbukaan dan kemudahan akses informasi bagi seluruh pelaku usaha khususnya terkait persyaratan dan prosedur sertifikasi baik melalui media elektronik dan nonelektronik yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung.
- ✎ Adanya aplikasi e-bpom yang memfasilitasi layanan proses perizinan eksportasi yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung semakin stabil, selain itu kompetensi dan komitmen SDM evaluator yang tinggi sehingga dapat melakukan evaluasi sesuai dengan persyaratan dan memenuhi timeline yang telah ditetapkan.
- ✎ Berbagai Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen di Bidang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung secara rutin berdampak pada peningkatan pemahaman dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai peraturan yang berlaku.
- ✎ Peningkatan kompetensi dan komitmen SDM Balai Besar POM di Bandung dalam kegiatan sertifikasi sehingga sarana produksi dan sarana distribusi yang mengajukan permohonan dalam rangka sertifikasi dapat memenuhi ketentuan dan dapat diselesaikan sesuai timeline yang telah ditetapkan. Meskipun jumlah SDM sangat kurang dibandingkan dengan beban kerjanya.



- ✎ Optimalisasi kegiatan sertifikasi dengan melakukan audit / pemeriksaan sarana secara daring (*online*) dan *onsite*.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ✎ Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis yang dipersyaratkan melalui pelatihan/*workshop*/bimtek/diseminasi/webinar mengenai CPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.
- ✎ Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen.
- ✎ Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi.
- ✎ Meningkatkan sarana dan prasarana kerja pendukung pelaksanaan kegiatan sertifikasi.
- ✎ Peningkatan koordinasi lintas sektor agar dapat meningkatkan daya ungkit kegiatan pendampingan pelaku usaha obat dan makanan.
- ✎ Melakukan kegiatan proaktif jemput bola terhadap pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan produksi.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

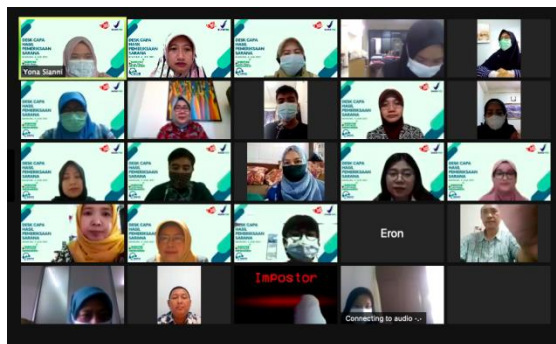
Kondisi pandemi yang terjadi menyebabkan pelaksanaan kegiatan sertifikasi/audit sarana baik produksi maupun distribusi yang dilakukan secara *onsite* menjadi berkurang. Namun kegiatan sertifikasi harus tetap berjalan seiring dengan jumlah permohonan pemeriksaan sarana yang terus bertambah. Sesuai dengan arahan Kedeputian II dan Kedeputian III, untuk pemeriksaan sarana produksi dan distribusi dapat dilakukan secara *on desk* atau *online* selama pandemi berlangsung. Pada pelaksanaannya, dengan memperhatikan kondisi peta penyebaran Covid-19 di Jawa Barat yang masih tinggi maka Balai Besar POM di Bandung Di Bandung melakukan pemeriksaan dalam rangka sertifikasi secara *online* dan atau *onsite*. Pemilihan dan penentuan sarana mana yang *online* dan sarana mana yang *onsite* adalah ditentukan berdasarkan pertimbangan lokasi dan golongan industri yang mengajukan permohonan. Sarana UMKM diutamakan untuk diaudit secara *onsite* dengan memperhatikan protokol kesehatan, hal ini dilakukan karena terkadang pelaku usaha UMKM belum terpapar dan kurang memahami prinsip GMP (CPPOB/CDPOB/CPKB/CPOTB). Dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi secara online dan on site, masing-masing cara audit tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari pihak pelaku usaha merasa lebih baik saat dilakukan pemeriksaaan secara *online* karena sedang dalam masa pandemi namun di sisi lain audit *onsite* lebih jelas karena pelaku usaha dapat langsung berkonsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk



produksi dan produk yang dihasilkan kepada petugas dan petugas dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan sehingga tidak terjadi salah persepsi yang pada akhirnya antara petugas dan pelaku usaha mendapatkan persepsi yang sama. Untuk sarana kosmetik dan obat tradisional yang diaudit secara *online*, rekomendasi yang dikeluarkan merupakan rekomendasi yang bersifat *conditional approval* sehingga pada saat kondisi telah memungkinkan, sarana tersebut harus diaudit kembali secara *onsite*.

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja di tahun 2021 adalah :

- ✎ Meningkatkan monitoring CAPA sebagai bentuk tindaklanjut pengawasan dengan cara membuat tabel monitoring surat masuk beserta progresnya.
- ✎ Telah dilaksanakan kegiatan Desk CAPA di bulan Januari, Maret, Juni, Agustus dan September. Penyelenggaraan kegiatan Desk CAPA secara rutin setiap 1-2 bulan sehingga kendala-kendala yang dialami oleh pelaku usaha dalam rangka pemenuhan CAPA-nya lebih diminimalisir hal ini berdampak



pada pencapaian jumlah rekomendasi yang dikeluarkan semakin meningkat. Pada tahun 2021 ini sudah dilaksanakan 6 kali kegiatan Desk CAPA, yaitu tanggal 29 Januari 2021, 19 Maret 2021, 4 Juni 2021, 22 Juni 2021, 20 Agustus 2021, 17

September 2021 dan 2 November 2021.

- ✎ Pada tanggal 5-6 April 2021 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Registrasi Pangan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan yang diikuti oleh 36 pelaku usaha yang telah diaudit PSB oleh Balai Besar POM Di Bandung. Pelaku usaha didampingi dan dibantu untuk melakukan pendaftaran akun dan pendaftaran produk pangan olahan



secara online oleh petugas dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Balai Besar POM Di Bandung untuk percepatan mendapatkan nomor izin edar. Output dari kegiatan Desk Registrasi ini adalah telah berhasil menerbitkan



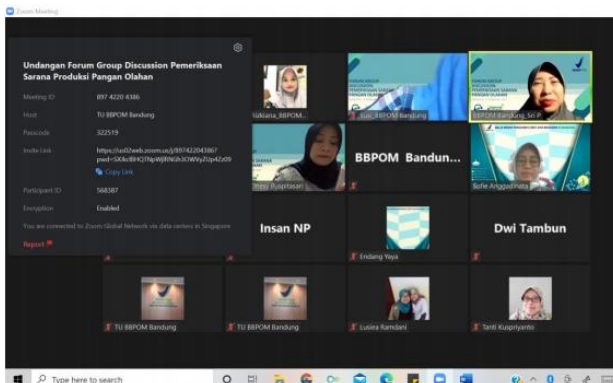
23 nomor izin edar (NIE), 12 akun perusahaan dan 2 rekomendasi pemeriksaan sarana.



☪ Pada tanggal 23 Februari 2021 diadakan kegiatan *coaching clinic* terhadap para pelaku usaha UMKM Pangan di Kabupaten Cirebon terkait kendala-kendala yang mereka hadapi dalam hal menempuh proses untuk

mendapatkan rekomendasi pemeriksaan sarana dalam rangka pendaftaran pangan

☪ Pada tanggal 12 Februari 2021, diadakan FGD Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan dengan Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Produksi Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang, Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong, Kemasan Yang Digunakan Untuk Pangan dan Bahan Lainnya – Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan – Kedeputian III Bidang Pengawasan Pangan Olahan – Badan POM RI) salam rangka salah satu upaya



peningkatan kompetensi dan komitmen SDM Balai Besar POM di Bandung dalam kegiatan sertifikasi sehingga sarana produksi dan sarana distribusi yang mengajukan permohonan dalam rangka sertifikasi dapat memenuhi ketentuan

dan dapat diselesaikan sesuai timeline yang telah ditetapkan.

☪ Dilaksanakan pembinaan kepada para pelaku usaha obat tradisional dalam acara Workshop Registrasi Produk Herbal bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran pada tanggal 7 Juli 2021 melalui zoom meeting.



☪ Dilaksanakan pembinaan ke para pelaku usaha melalui Bimtek Pendaftaran Pangan melalui pertemuan tatap muka pada tanggal 28 September 2021 di Kabupaten Cirebon.



- ✎ Dilaksanakan kegiatan Forum Komunikasi Publik pada tanggal 24-25 November 2021 dengan mengundang para pelaku usaha dalam rangka mensosialisasikan adanya perubahan-perubahan alur perizinan sehubungan dengan implementasi UU Cipta Kerja, salah satunya adalah pemberlakuan Izin Penerapan CPPOB yang merupakan peralihan dari rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi pangan (PSB), perizinan berusaha (OSS RBA) dan SKI-SKE.
- ✎ Dilaksanakan Sosialisasi Mekanisme Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Cimahi melalui kegiatan tatap muka pada tanggal 31 November sampai dengan 2 Desember 2021.
- ✎ Pendampingan registrasi melalui online dengan petugas sertifikasi.
- ✎ Pelaksanaan audit / pemeriksaan sarana secara daring (*online*) dan *onsite*.

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- ✎ Petugas SKE/SKI mengikuti pelatihan Teknis Evaluasi Surat Keterangan Ekspor Impor Bagi Evaluator Baru di Balai/Balai Besar POM pada tanggal 1 September 2020 dan Forum Komunikasi Pelayanan Publik SKI/SKE Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada tanggal 16 Juli 2020.
- ✎ Pada tanggal 26 Maret 2021 evaluator SKE/SKI BBPOM Bandung mengikuti Bimtek SKI Obat yang diselenggarakan oleh Direktorat KMEI Badan POM RI.
- ✎ Evaluator SKE/SKI juga mengikuti Coaching Clinic Layanan Ekspor Impor Kosmetik Bagi Petugas.
- ✎ Terkait updating informasi tentang SKE, pada tanggal 27 Maret 2021 kepada pelaku usaha disampaikan sosialisasi tentang Surat Keterangan Ekspor pada kegiatan Camp UMK yang diselenggarakan oleh Direktorat PMPU Kedeputian 3 Badan POM.
Untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha dalam pelayanan SKE, BBPOM Bandung menyelenggarakan FGD Pelayanan Publik pada tanggal 5 Maret 2021.
- ✎ Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan dan diseminasi yang diselenggarakan oleh Badan POM dan Balai Besar POM di Bandung antara lain : Updating Isu Seputar Toll Manufacturing Kosmetika, Sosialisasi Hasil Workshop Fasilitator e-Registration Pangan Olahan dan e-Sertifikasi CPOTB Bertahap, Bimbingan Teknis Inspektur CPOTB Lanjutan, Pelatihan Inspektur CPKB Junior, Webinar Sosialisasi Registrasi Pangan Olahan.
Meningkatkan pemahaman pelaku usaha melalui Kegiatan pelayanan prima dan bimbingan teknis e-registration pangan olahan yang diselenggarakan pada



tanggal 05-06 April 2021 bertempat di Hotel Holiday Inn Bandung dengan peserta sebanyak 36 sarana produksi pangan di Provinsi Jawa Barat dan diantaranya adalah UMKM binaan dari Balai Besar POM di Bandung.

- ☰ Meningkatkan pemahaman pelaku usaha melalui Kegiatan Forum Komunikasi Publik yang diselenggarakan pada Bulan November 2021. Pada kegiatan ini pelaku usaha diberikan materi tentang Perizinan melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA), Perizinan SNI Produk Pangan, Parameter Uji untuk Pendaftaran Produk Obat dan Makanan, Pelayanan Publik di BBPOM di Bandung, Izin Penerapan CPPOB, e-Sertifikasi dan SKE/SKI Pangan.
- ☰ Meningkatkan monitoring CAPA sebagai bentuk tindaklanjut pengawasan dengan cara membuat tabel monitoring surat masuk beserta progresnya.
- ☰ Selain monitoring CAPA yang dilakukan oleh masing-masing petugas, pada tahun 2021 juga diadakan kegiatan Desk CAPA sebanyak 5 kali pertemuan yang dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting dan 1 kali yang diselenggarakan melalui tatap muka.

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada setiap triwulan, diperoleh hasil bahwa keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu menunjukkan hasil Baik. Kendala-kendala yang ada masih dapat diatasi oleh para petugas. Terkait audit dalam rangka sertifikasi, perlu dilakukan desk CAPA secara berkala agar penyelesaian CAPA dari para pelaku usaha dapat segera terpenuhi. Dengan demikian, rekomendasi dapat segera diterbitkan dan pelaku usaha dapat melanjutkan proses pendaftaran produk untuk mendapatkan izin edar dari Badan POM.

Adapun Rekomendasi yang belum dilaksanakan pada tahun 2021 (Kendala dan Permasalahan).

- ☰ Upaya peningkatkan kompetensi petugas dalam hal e-sertifikasi dan implementasi PB-UMKU pada OSS sehubungan dengan adanya beberapa perubahan alur perizinan pangan, obat tradisional dan kosmetik.
- ☰ Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha dalam hal regulasi dan pemenuhan persyaratan perizinan pangan, obat tradisional dan kosmetik.
- ☰ Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang regulasi ekspor melalui pemberian informasi kepada pelaku usaha terkait regulasi ekspor.

H. UPAYA PERBAIKAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

- ☰ Meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan, workshop atau bimtek mengenai CPPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.



- ☰ Upaya peningkatkan kompetensi evaluator SKE belum dilaksanakan karena belum adanya kegiatan dari BPOM terkait updating informasi maupun regulasi tentang SKE yang melibatkan BBPOM Di Bandung.
- ☰ Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha dalam hal regulasi ekspor melalui pemberian informasi kepada pelaku usaha terkait regulasi ekspor

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA


Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

5. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

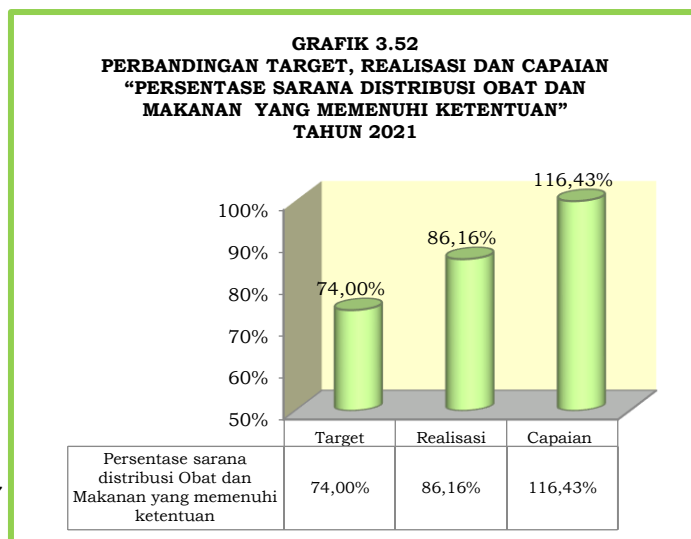
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun n dengan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa pada tahun n.

TABEL 3.24

**CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN”
TAHUN 2021**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	74,00%	86,16%	116,43%	Sangat Baik 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

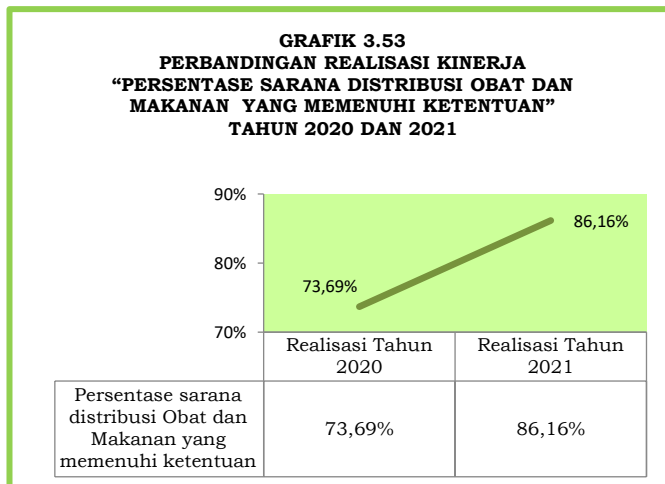


Target indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 yang ditetapkan adalah sebesar 74% sedangkan realisasinya adalah sebesar 86,16%, dengan demikian capaian kerjanya adalah sebesar **116,43%** dengan kriteria



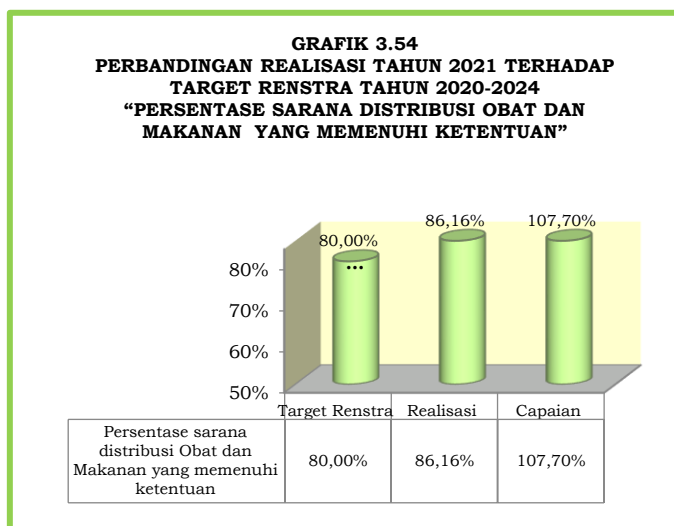
Sangat Baik. Rincian hasil pemeriksaan sarannya yaitu jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebanyak 934 sarana dan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa sebanyak 1084 sarana.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 TERHADAP TAHUN 2020



Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2021 adalah sebesar 86,16% sedangkan tahun 2020 adalah sebesar 73,69%, dengan demikian maka terjadi peningkatan realisasinya yaitu sebesar 12,47%

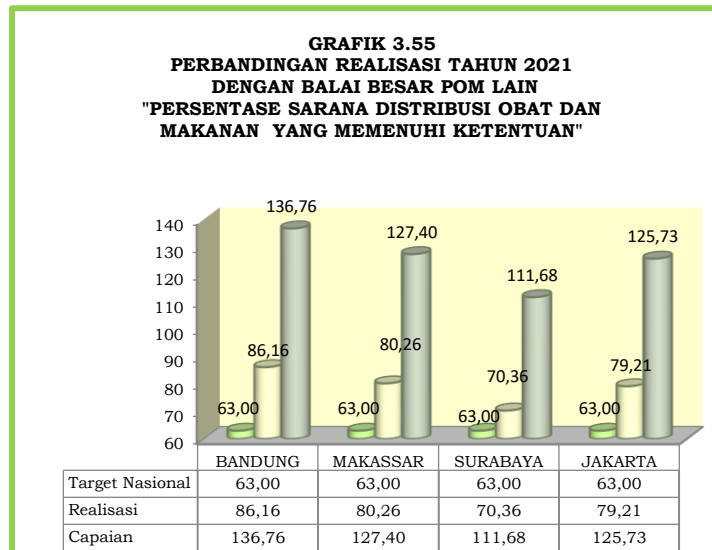
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Target akhir periode Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator kegiatan ini adalah sebesar 80%. Jika dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kerjanya adalah sebesar 107,70%.



D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu sebagai berikut: Balai Besar POM di Bandung 86,16%, Balai Besar POM di Makassar 80,26%, Balai Besar POM di Surabaya 70,36% dan Balai Besar

POM di Jakarta 79,21%. Target nasional indikator kegiatan tersebut yaitu sebesar 63%, sehingga jika dihitung terhadap target nasional maka capaian kinerjanya berturut-turut adalah sebagai berikut; Balai Besar POM di Surabaya 111,68%, Balai Besar POM di Jakarta 125,73%, Balai Besar POM di Makassar 127,40% dan Balai Besar POM di Bandung 136,76%. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.51.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Peningkatan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2021 disebabkan antara lain:

- ☪ Fokus pemeriksaan sarana distribusi obat pada tahun 2021 yaitu intensifikasi pengawasan vaksin di Puskesmas, sehingga hasil pemeriksaan yang memenuhi ketentuan mengalami peningkatan. Target pemeriksaan Puskesmas pada tahun 2021 yaitu 345 dari 649 sarana distribusi obat (53,16%)
- ☪ Fokus pemeriksaan sarana distribusi pangan pada tahun 2021 yaitu intensifikasi pengawasan pangan dalam rangka Hari Natal Tahun 2021 dan tahun baru 2022, sehingga hasil pemeriksaan yang memenuhi ketentuan mengalami peningkatan.
- ☪ Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung dalam rangka pemenuhan CAPA dari sarana yang diperiksa



- ☪ Koordinasi dengan Satgas Pangan Propinsi Jawa Barat dalam rangka persiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru.
- ☪ Partisipasi dalam kegiatan Pengawasan Barang Beredar dengan lintas sektor terkait Provinsi Jawa Barat melalui Inspeksi di Pasar Tradisional dan Pasar Modern rangka memperingati Hari Besar Keagamaan Nasional (Hari Natal dan Tahun Baru) pada tanggal 22 Desember 2021.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain:

- ☪ Meningkatkan kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha dalam rangka penyelesaian CAPA (*help desk* CAPA)
- ☪ Meningkatkan kompetensi petugas dengan mengikuti kegiatan pelatihan
- ☪ Telah dilakukan monitoring dan evaluasi capaian rekomendasi secara berkala berdasarkan rekomendasi periode sebelumnya.
- ☪ Mengadakan kegiatan Sangkuriang “Sinergitas Penguatan Kerjasama Untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan” pada tanggal 28 Desember 2021 untuk membahas hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandung selama tahun 2021 untuk sarana pelayanan kefarmasian serta Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung.

F. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

- ☪ Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan form *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.
- ☪ Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ☪ Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan serta kemudahan dalam penyampaian CAPA melalui email kantor.
- ☪ Melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat dan Organisasi Profesi untuk meningkatkan kesadaran penanggung jawab pengelola obat di sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan pedoman teknis pengelolaan obat yang baik.



G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.


6. INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDUNG

Penilaian kinerja internal Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan BPOM mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang dilakukan terhadap 6 (enam) aspek, terdiri atas: (1) Kebijakan pelayanan; (2) Profesionalisme SDM; (3) Sarana Prasarana; (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik; (5) Konsultasi dan Pengaduan; serta (6) Inovasi. Indeks Pelayanan Publik merupakan hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Tim penilai kinerja UPP BPOM ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.04.21.205 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM Tahun Anggaran 2021. Penilaian kinerja internal UPP di lingkungan BPOM dilaksanakan pada Bulan Juni sampai dengan Juli 2021.

TABEL 3.25
KATEGORI NILAI KINERJA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

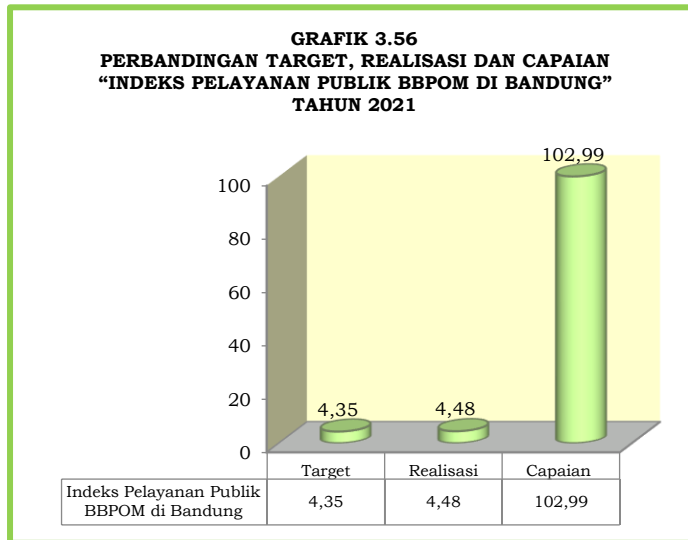
Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1.00	F	Gagal
1.01 – 1.50	E	Sangat Buruk
1.51 – 2.00	D	Buruk
2.01 – 2.50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2.51 – 3.00	C	Cukup
3.01 – 3.50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3.51 – 4.00	B	Baik
4.01 – 4.50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5.00	A	Pelayanan Prima

TABEL 3.26
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	4,35	4,48	102,99%	Baik 



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021



Target indikator tersebut yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 4,35, dengan realisasi sebesar 4,48 (Sangat Baik) diatas rata-rata IPP Unit Kerja Pusat BPOM sebesar 4,31 (Sangat Baik). Dengan demikian persentase capaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas sebesar **102,99%** dengan

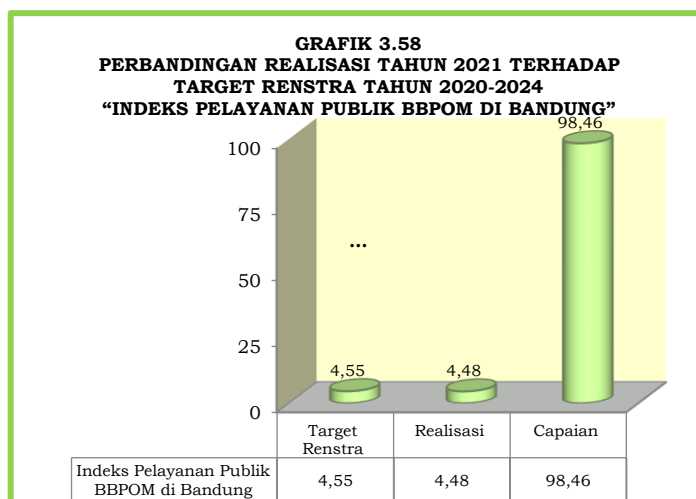
kriteria **Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020



Indeks Pelayanan Piblik BBPOM di Bandung pada tahun 2021 adalah 4,48 sedangkan tahun 2020 adalah 4,20 maka terjadi peningkatan sebesar 0,28.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

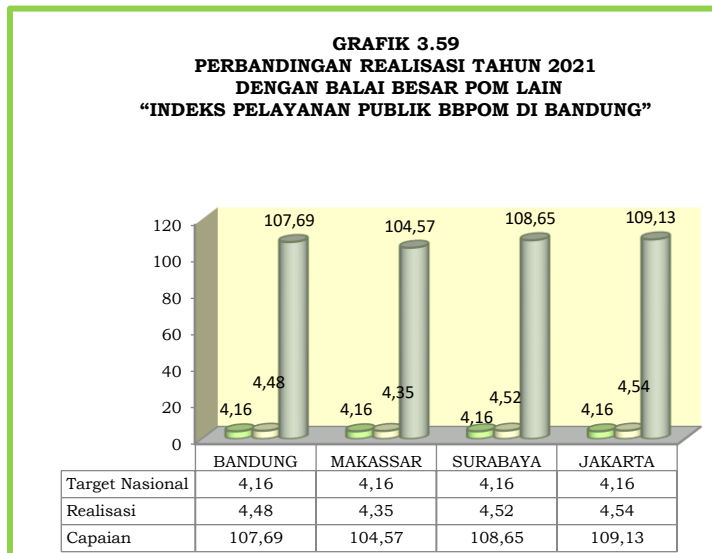


Target akhir periode Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 4,55. Jika dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja sebesar 98,46% dengan



kriteria Baik. Perlu peningkatan capaian pada tahun selanjutnya untuk mencapai target akhir renstra yang ditetapkan.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja dari Indeks Pelayanan Publik secara berturut-turut yaitu : Balai Besar POM di Jakarta (4,54), Balai Besar POM di Surabaya (4,52), Balai Besar POM di Bandung (4,48) dan Balai Besar POM di Makassar (4,35). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (4,16),

maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Jakarta (109,13%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.59.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN PADA TAHUN 2021

Peningkatan pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2021 disebabkan antara lain oleh :

- ☰ Peningkatan sarana dan prasarana ruang pelayanan publik. Ruang pelayanan publik telah terintegrasi satu pintu untuk seluruh layanan yang terdiri dari; (1) Layanan Informasi; (2) Layanan Pengujian; (3) Layanan Pengaduan; dan (4) Layanan Sertifikasi. Selain itu, ruang tunggu dilengkapi dengan *free coffee*, akses wifi gratis, kantin kejujuran, kotak saran, media cetak/media siar (TV), area bermain anak, ruang ibu menyusui dan berbagai akomodasi untuk penyandang disabilitas.
- ☰ Adanya maklumat pelayanan dan maklumat kebijakan standar pelayanan publik dan penerapan inovasi pelayanan publik di lingkungan BBPOM di Bandung yang telah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat antara lain: melalui aplikasi SIPETA (Sistem Informasi Pelayanan Tamu) yang dapat diakses oleh seluruh tamu BBPOM di Bandung dan spanduk di depan kantor BBPOM di Bandung dan penerapannya dilakukan secara konsisten serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.



- ☪ Beberapa inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh BBPOM di Bandung antara lain : (1) layanan permohonan pemeriksaan sarana oleh Balai (PSB) melalui : bit.ly/psbbandung; (2) layanan pengaduan dan informasi melalui program “KABAYAN” (Kepala Balai Melayani); (3) Aplikasi “LACAK” untuk layanan pengujian pihak ketiga; (4) formulir pengaduan melalui aplikasi SIPETA; (5) Program “KELOM GEULIS” (Kenalan Dengan BBPOM di Bandung Berbagai Edukasi Dan Layanan Informasi, Sae Pisan) melalui IG Live dan IG Radio. Seluruh inovasi pelayanan publik BBPOM di Bandung telah disosialisasikan melalui media sosial dan WAG Mal Pelayanan Publik Kota Bandung.
- ☪ Pada masa pandemik Covid-19, BBPOM di Bandung tetap menyelenggarakan berbagai kegiatan antara lain: Bimbingan Teknis Penerapan CPPOB Pada UMKM secara daring, Audit PSB baik secara onsite dengan adaptasi kebiasaan baru dan audit secara daring, serta penerbitan SKE 1 HK (SLA 2 HK).

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, yaitu:

- ☪ Membuat standar pelayanan publik yang lebih berdampak pada masyarakat maupun pelaku usaha, mensosialisasikannya dan melaksanakannya secara konsisten.
- ☪ Petugas pelayanan publik diberikan pelatihan terkait peningkatan teknis maupun sosio kultural sehingga semakin meningkat kompetensi dan pemahaman tentang pembangunan budaya kerja yang baik dan berdaya saing.
- ☪ Sarana prasarana yang lebih ditingkatkan lagi yaitu terkait akses pemberian informasi yang lebih mudah, cepat dan terjangkau sebagai contoh pengadaan call centre.
- ☪ Sistem informasi yang diberikan pada masyarakat lebih beragam baik melalui media cetak maupun elektronik. Penyebaran bahan-bahan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) baik melalui media cetak maupun elektronik lebih intensif. Pemberdayaan system informasi yang sudah ada seperti subsite Balai dibuat lebih informatif dan komunikatif.
- ☪ Sarana konsultasi dan pengaduan disamping diselenggarakan secara langsung juga dilakukan secara online/ daring dan diinformasikan kepada masyarakat secara lebih intensif. Kotak saran selain langsung juga bisa disampaikan secara digital.
- ☪ Inovasi-inovasi terkait pelayanan publik yaitu pelayanan pengujian (aplikasi LACAK), pemberian informasi dan pengaduan (KABAYAN) dan layanan sertifikasi SKE (Surat Keterangan Ekspor) pelaksanaannya secara konsisten dan update.



F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Bandung pada periode sebelumnya adalah:

- ☪ Secara konsisten melaksanakan maklumat pelayanan dan maklumat kebijakan standar pelayanan publik dan penerapan inovasi pelayanan publik di lingkungan BBPOM di Bandung, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- ☪ Melakukan inovasi pelayanan publik lainnya terutama untuk peningkatan profesionalisme SDM pelayanan publik.

Berdasarkan rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- ☪ Meningkatkan subsite Balai Besar POM di Bandung sehingga lebih informatif dan komunikatif
- ☪ Peningkatan sarana prasana/ fasilitas di ruang dan area layanan publik dalam hal kelengkapan, kemudahan, kenyamanan dan keamanannya yaitu ruang pelayanan terpadu, area parkir, toilet, loket layanan, wifi, kantin, AC dan lain-lain.
- ☪ Layanan konsultasi dan pengaduan selain diberikan di loket pelayanan juga diberikan secara online via whatsapp yaitu KABAYAN (kepala Balai melayani), WA grup pengujian dan via email bbpombandungpsb@gmail.com untuk pengiriman permohonan audit PSB (pemeriksaan sarana balai).

Petugas pelayanan publik mengikuti berbagai pelatihan teknis maupun sosio kultural untuk meningkatkan kompetensinya sehingga pemberian informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha lebih cepat, akurat dan update.

G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Dari hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Tim Penilai Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) BPOM pada tanggal 7 Juli 2021 di rekomendasikan pada masing-masing aspek berikut ini :

- ☪ Kebijakan Pelayanan : Penyusunan SP mengikutsertakan masyarakat yang mewakili berbagai unsur dan profesi antara lain: (1) tokoh masyarakat (2) akademisi, (3) dunia usaha, dan (4) lembaga swadaya masyarakat. Serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat; Agar ditambahkan data dukung publikasi katalog di area ruang pelayanan; SP yang ditetapkan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah disosialisasikan, dan melibatkan masyarakat dalam penyusunannya, serta melakukan monev berkelanjutan; Informasi tentang SP dapat diakses dengan bertanya kepada petugas secara tatap muka, membaca



di lokasi tempat layanan, melalui media sms/telepon, email, website/media sosial. Agar ditambahkan data dukung akses melalui SMS; Agar ditambahkan data dukung SP yang ditetapkan; Agar dilengkapi data dukung leaflet yang mencantumkan maklumat pelayanan. Pengisian Kuesioner oleh seluruh pengguna layanan baik secara langsung dan/atau online, baik yang permohonannya disetujui maupun ditolak. Dilengkapi data dukung yang sesuai (rekap data); Informasi SKM tersedia dan dipublikasi di berbagai tempat dan media informasi (tersedia di area ruang pelayanan, media sosial, website, baliho/ banner, leaflet/pamflet/brosur, buku saku/katalog, poster dan media cetak); Hasil SKM seluruh jenis pelayanan dalam bentuk saran dan rekomendasi ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagai acuan perbaikan layanan dan kebijakan layanan oleh pimpinan penyelenggara; Saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya sebelum laporan SKM diterbitkan. Agar dilengkapi data dukung yang menunjukkan bahwa hasil SKM telah ditindaklanjuti (dapat berupa money).

- ✎ Profesionalisme SDM : Ketersediaan pelaksana layanan dengan kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan, >80% dari nomenklatur ditetapkan. Agar dilengkapi data dukung jumlah kebutuhan pelaksana layanan, kompetensi, dan gap yang terjadi; Jam kerja layanan harian dari 08.00 – 16.00 tanpa jeda waktu istirahat pelayanan, baik untuk layanan informasi, konsultasi dan pengaduan serta Customer Service (dengan sistem istirahat bergilir bagi pegawai tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat istirahat). Adanya penambahan waktu ekstra pelayanan misal; Sabtu/Minggu/Loket Malam. Disampaikan data dukung yang menyatakan bahwa layanan dapat diakses pada waktu ekstra; Pelayanan agar dapat diberikan sangat cepat (tidak membiarkan pengguna layanan menunggu untuk dilayani); Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Layanan meliputi hak dan kewajiban, larangan KKN, larangan diskriminasi, sanksi dan penghargaan; Pemberian penghargaan diberikan kepada pegawai setiap 1 (satu) bulan; Pelaksana layanan mengenakan pakaian seragam khusus, Identitas Nama, PIN/Atribut/logo unit pelayanan, mempraktekkan 5S (Sambut dengan Senyum dan Salam didasari Semangat untuk memberikan Solusi). Data dukung atribut unit pelayanan agar dilengkapi.
- ✎ Sarana Prasarana : Sarana ruang tunggu dilengkapi fasilitas televisi, bahan bacaan, monitor antrian, AC/sirkulasi udara, air minum, dan fasilitas penunjang (hotspot/ wifi, area merokok terisolasi, serta tersedia ruang ibadah baik menyatu ataupun terpisah); Toilet disediakan terpisah antara pria dan wanita serta ada pilihan kloset duduk maupun jongkok dilengkapi wastafel dan toiletres.



- ☰ Sistem Informasi Pelayanan Publik : Sistem informasi pelayanan publik telah online dan telah memenuhi unsur profil penyelenggara, pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja Lembaga; Pemutakhiran informasi pelayanan publik dilakukan secara terus menerus setiap hari, agar dilengkapi data dukung yang sesuai (misal SOP pemutakhiran data); Informasi nonelektronik berupa poster/ spanduk/ leaflet/ buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll didokumentasikan dan dipublikasikan di area ruang pelayanan, ruang publik (contoh alun-alun, perempatan jalan dll), perpustakaan daerah, kantor pemerintah yang lain, dan didistribusikan ke stakeholder.
- ☰ Konsultasi dan Pengaduan : Arsip proses konsultasi terdokumentasi dan mudah diakses di website, majalah, dokumen/arsip lainnya agar dilengkapi data dukung yang sesuai; Arsip proses/hasil pengaduan terdokumentasi dan mudah diakses di website, majalah, dokumen/arsip lainnya.
- ☰ Inovasi : Tersedia inovasi, dilaksanakan lebih dari 1 tahun dan memberi manfaat pada masyarakat, berkelanjutan, dapat atau sudah direplikasi serta sudah diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik/sudah mendapat penghargaan (nasional/internasional).

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2

SASARAN KEGIATAN KE-5

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh capaian sebesar **99,82%** dengan kriteria **Baik**. Hasil Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.43.



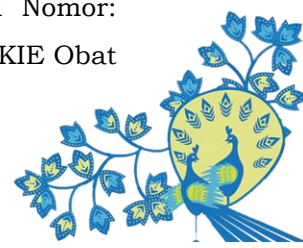
TABEL 3.27
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-5
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92	91,35	99,29%	Baik	
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	42,00	42,00	100,00%	Baik	
3. Jumlah desa pangan aman	19,00	19,00	100,00%	Baik	
4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8	8	100,00%	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			99,82%	BAIK	

1. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Beberapa jenis Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b) KIE langsung ke masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: (a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; (c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; (d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Pengolahan data kuesioner KIE dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan POM yang dilakukan setiap semester.

Penetapan hasil pengukuran indikator tersebut pada triwulan I, berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor: HM.11.02.22.221.04.21.586 Tanggal 23 April 2021 tentang Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 1 tahun 2021. Triwulan II, berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor: HM.11.02.22.224.07.21.04 Tanggal 06 Juli 2021 tentang Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 2 tahun 2021. Triwulan III, berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Utama Badan POM Nomor: HM.11.02.2.22.10.21.520 Tanggal 08 Oktober 2021 tentang Indeks Efektivitas KIE Obat



dan Makanan Triwulan 3 tahun 2021. Triwulan IV, berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Badan POM Nomor: B-HM.11.02.22.224.01.22.16 tanggal 7 Januari 2021 tentang Indeks Efektifitas Obat dan Makanan Triwulan 4 Tahun 2021. Data tiap triwulan merupakan data kumulatif sampai dengan triwulan yang dimaksud.

Pengukuran indikator tersebut menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4(empat) aspek KIE yang terdiri dari: (1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima; (3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan (4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan. Kategori penilaian yang digunakan pada tahun sebagai berikut:

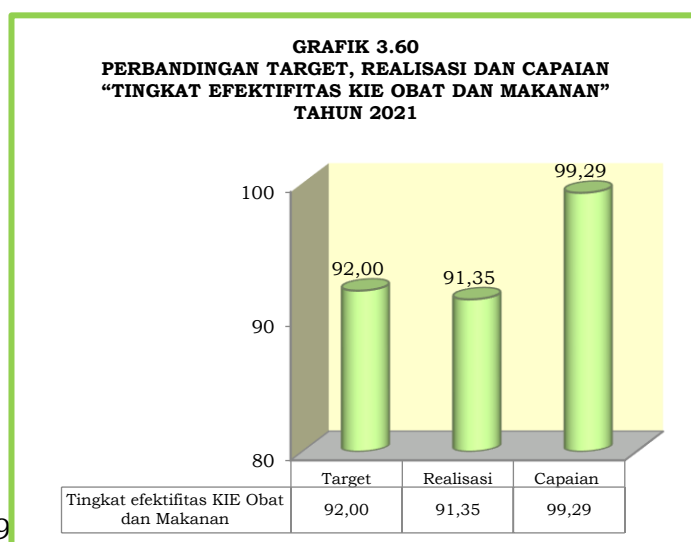
TABEL 3.28
KATEGORI PENILAIAN
“TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2021

Skor Indeks 100	Interprestasi Efektifitas
<65.00	Kurang Efektif
65.01 - 75.00	Cukup Efektif
75.01 - 85.00	Efektif
85.01 - 95.00	Sangat Efektif
95.01 - 100	Sangat Efektif Sekali

TABEL 3.29
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN”
2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92	91,35	99,29%	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021



Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini pada tahun 2021 pada awalnya adalah sebesar 89,18 kemudian dirubah menjadi 92. Realisasi tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2021 sebesar 91.35 (Sangat Efektif) dibawah nilai pada tingkat nasional sebesar 93,32

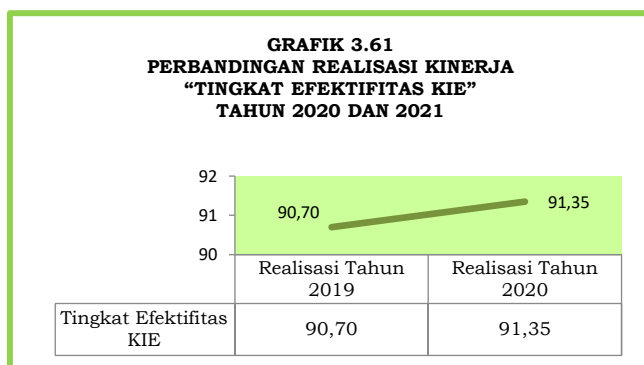


(Sangat Efektif). Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar **99,29%** dengan kriteria **Baik**. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.30
REALISASI
“TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2021**

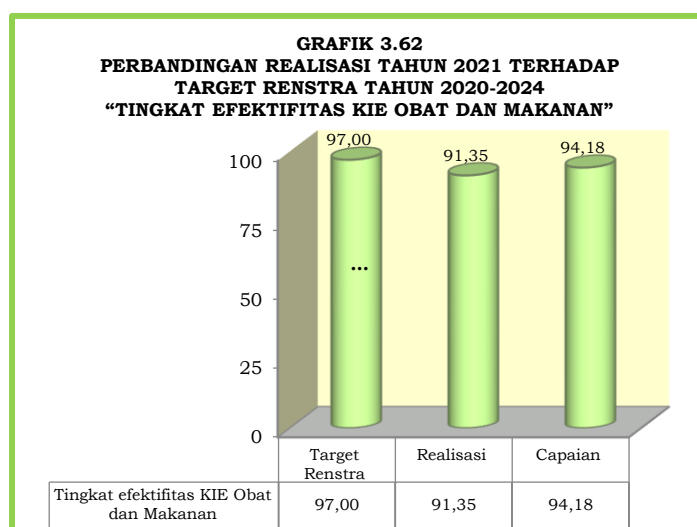
UNIT KERJA/ REALISASI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TAHUN 2021
BBPOM di Bandung	89,35	91,01	92,23	91,35	91.35

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020



Indikator Kinerja tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 adalah 90,70. Sedangkan tahun 2021 adalah 91,35 sehingga terjadi peningkatan indeks sebesar 0,7%

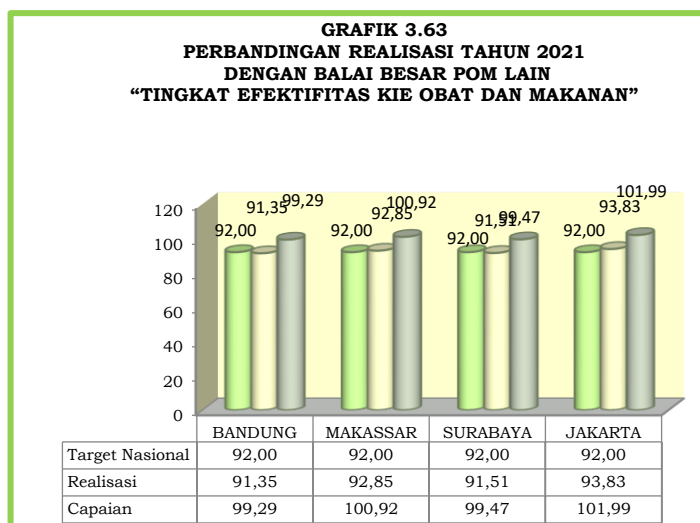
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Target akhir periode Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 97. Jika dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja sebesar **94,18%** dengan kriteria **Baik**.



D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja dari Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Jakarta (93,83), Balai Besar POM di Makassar (92,85), Balai Besar POM di Surabaya (91,51) dan Balai Besar POM di Bandung (91,35). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan

terhadap target nasional (92), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Jakarta (101,99%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.63.

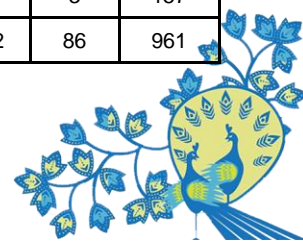
E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Peningkatan pencapaian kinerja sasaran disebabkan antara lain oleh:

- ☛ Balai Besar POM di Bandung menyediakan layanan konsultasi tidak hanya melalui layanan tatap langsung, namun melalui layanan dengan berbagai platform aplikasi diantaranya layanan WhatsApp dengan namana layanan “KABAYAN” (Kepala Balai Melayani), Layanan Telekonsultasi menggunakan Google Meet dengan nama layanan Silteung (Siap Memberikan Informasi untuk Seluruh Negeri). Disamping itu tim medsos Balai Besar POM di Bandung juga menerima konsultasi melalui *Direct Message* pada aplikasi Instagram dan Facebook.

TABEL 3.31
LAYANAN INFORMASI TAHUN 2021

NO	SARANA YANG DIGUNAKAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Balai Besar POM di Bandung	150	160	187	140	93	149	75	88	170	179	129	121	3656
1.	E-mail	20	12	39	15	1	20	10	3	9	16	9	3	157
2.	Langsung	85	119	108	106	70	82	2	9	99	113	82	86	961



3.	Telepon	27	15	29	5	12	29	1	4	19	18	7	3	169
4.	FAX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Surat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	SMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Media Sosial	17	14	11	12	10	18	20	3	9	13	0	14	141
8.	Mobile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Kotak Saran	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3
10.	Whatsapp	0	0	0	1	0	0	42	68	34	19	31	15	210
11.	Aplikasi Lain	108	140	148	162	118	150	172	186	159	259	230	183	2015

- ☪ KIE dilakukan melalui media sosial ditingkatkan facebook, Instagram, dengan program *one day one post* serta program 'KELOM GEULIS' (Kenalan Dengan BBPOM di Bandung Berbagai Edukasi Dan Layanan Informasi, Sae Pisan) melalui IG Live dan talkshow Radio.
- ☪ KIE kepada masyarakat luas secara dengan tatap muka dilakukan dengan tetap mematuhi protokol Kesehatan
- ☪ KIE yang dilaksanakan secara daring meliputi Webinar Keamanan Pangan untuk Para Pemilik Sarana Distribusi Pangan, Kader Keamanan Pangan Desa, Pedagang Pasar, Para Pelaku Usaha Pangan dan anggota Pramuka Penegak dan Penggalang. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama lintas sector terkait antara lain APRINDO, APPSI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan UKM, Kwarda Provinsi Jawa Barat, dan Kwarda Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Alternatif solusi yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu:

- ☪ Selama masa pandemik, KIE dapat dilakukan dengan berbagai media baik secara daring maupun luring.
- ☪ Peningkatan frekuensi KIE secara daring dapat dilakukan melalui media sosial berupa instagram, facebook, youtube; diantaranya dengan *one day one post*, melakukan repost informasi yang penting dari Kementrian/Lembaga lain.
- ☪ KIE dapat dilaksanakan melalui media cetak/radio/televise untuk memperluas cakupan masyarakat, misalnya melalui ILM atau iklan layanan masyarakat, dan talkshow ke Radio
- ☪ Kegiatan KIE dapat dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol Kesehatan; dan juga secara daring apabila pemberlakuan PPKM dari pemerintah diterapkan.
- ☪ Melakukan inovasi program KIE sesuai karakteristik masyarakat Jawa Barat sehingga informasi dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat



F. EVALUASI DAN ANALISIS TERKAIT TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Rekomendasi untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran BBPOM di Bandung pada periode sebelumnya adalah:

- ☰ Pelayanan informasi melalui media komunikasi lebih ditingkatkan, bukan hanya melalui infografis juga melakukan *Ig Live*, Webinar serta *talkshow* melalui radio.
- ☰ Ketersediaan Balai Besar POM di Bandung untuk hadir di Mall pelayanan terpadu yang sudah mulai beroperasi di Kota Bandung, Kab. Bandung dan Kota Bekasi diharapkan akan meningkatkan efektifitas KIE Obat dan Makanan.
- ☰ Peningkatan Kerjasama dengan lintas sektor

Berdasarkan rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- ☰ Melaksanakan KIE melalui Instagram, Facebook dan Youtube tentang issue obat dan makanan, issue Kesehatan dan informasi lainnya melalui program *one day one post*.
- ☰ Melaksanakan KIE melalui *Ig Live* dengan program Kelom Geulis (Kenalan dengan BBPOM Bandung Berbagi Edukasi dan Layanan Informasi Sae Pisan)
- ☰ Melaksanakan KIE melalui radio bekerjasama Sonora dan Pikiran Rakyat FM serta melalui media cetak bekerjasama dengan Jabar Express
- ☰ Melaksanakan webinar Keamanan Pangan untuk para kader keamanan Desa yang pernah diintervensi.
- ☰ Melaksanakan webinar Sosialisasi Keamanan Pangan bersama anggota Pramuka Penegak dan Penggalang bekerjasama dengan Kwarda dan Kwarda seJawa Barat.
- ☰ Melaksanakan KIE dengan Tokoh Masyarakat secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol Kesehatan
- ☰ Penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka kerja sama di Bidang Promosi dan Sosialisasi Keamanan Obat dan Makanan di Lingkungan Kepramukaan di Jawa Barat
- ☰ Gebyar KIE Obat dan Makanan Melalui Pemecahan Rekor Muri Lomba Film Pendek yang menghasilkan 1095 Film Pendek Keamanan Obat dan Makanan bekerja sama dengan Kwartir Daerah Pramuka Jawa Barat
- ☰ Menyelenggarakan Webinar untuk masyarakat umum (Webinar Hari Keamanan Pangan dunia, Webinar Menjadi Konsumen Cerdas)

Rekomendasi yang tidak dapat dilaksanakan:

- ☰ Mall pelayanan terpadu di kota Bandung baru diresmikan dan baru beroperasi di tahun 2022 serta keterbatasan jumlah personil di kelompok substansi



infokom sehingga tidak dapat memenuhi jadwal dari Mall Pelayanan Publik di 2 Kab/Kota lain

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan, yaitu:

- ☰ KIE melalui Instagram, Facebook dan Youtube tentang issue obat dan makanan, issue Kesehatan dan informasi lainnya melalui program *one day one post*.



KIE melalui media social Youtube



KIE melalui media social Facebook



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR POM DI BANDUNG

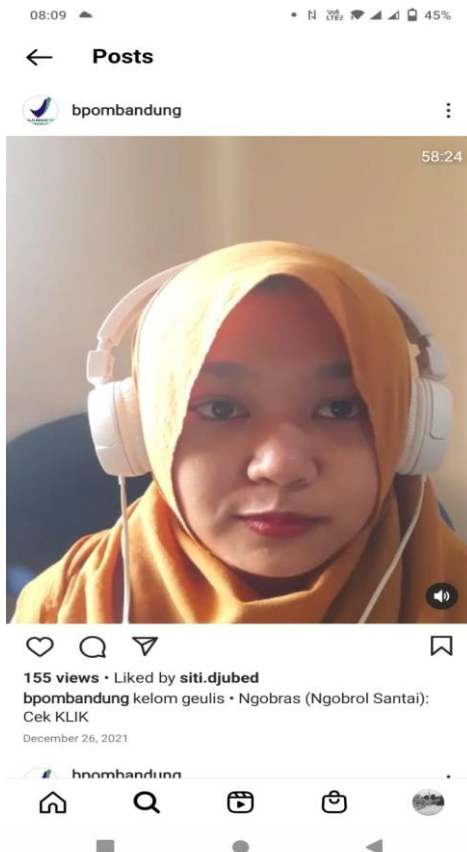


KIE melalui media sosial Instagram



KIE melalui media sosial Instagram

🕌 KIE melalui *Ig Live* dengan program Kelom Geulis (Kenalan dengan BBPOM Bandung Berbagi Edukasi dan Layanan Informasi Sae Pisan)



- ☪ KIE melalui radio bekerjasama Sonora, Pikiran Rakyat FM melalui media cetak bekerjasama dengan Jabar Express



- ☪ Penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka kerja sama di Bidang Promosi dan Sosialisasi Keamanan Obat dan Makanan di Lingkungan Kepramukaan di Jawa Barat





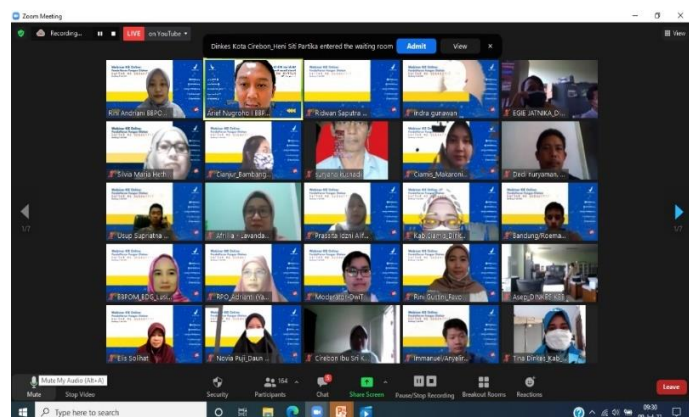
- Gebyar KIE Obat dan Makanan Melalui Pemecahan Rekor Muri Lomba Film Pendek yang menghasilkan 1095 Film Pendek Keamanan Obat dan Makanan bekerja sama dengan Kwartir Daerah Pramuka Jawa Barat



- KIE dengan Tokoh Masyarakat secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol Kesehatan



- Webinar KIE Online Pendaftaran Pangan MD




H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

2. JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman diukur berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Petunjuk Teknis Piagam Bintang Keamanan Pangan.

LABEL 3.32
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN”
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	42,00	42,00	100,00%	Baik	

Tahap kegiatan PJAS yang dilaksanakan adalah Advokasi dengan lintas sector, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan di Sekolah, sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman dan Pengawasan Sekolah yang sudah diintervensi Keamanan Pangan Anak Usia Sekolah yang dilaksanakan terhadap 42 sekolah di Kabupaten Karawang, Purwakarta, Sumedang, Majalengka, Cirebon dan Kota Cirebon. Secara rinci progress pelaksanaan kegiatan PJAS dapat dilihat pada tabel berikut:

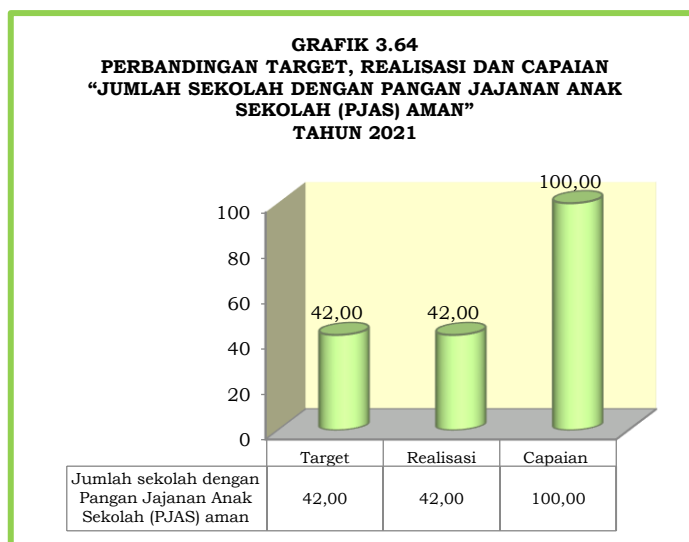
TABEL 3.33
PROGRESS PELAKSANAAN KEGIATAN PJAS
TAHUN 2021

Kegiatan	Pembobotan Progress (%)	Progres (Capaian DJA)				Total Progress
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1 Advokasi Lintas Sektor PJAS	20			20		20
2 Sosialisasi Keamanan Pangan	5			5		5
3 Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15			15		15
4 Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan	10				10	10
5 Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah						



5	Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah	5	5	5
6	Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	10	10	10
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	25	25	25
7	Pengawasan	10	10	10
TOTAL SKOR		100	0	0
		55	45	100

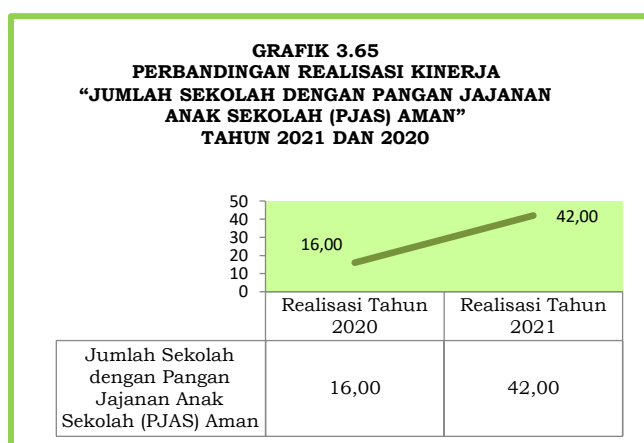
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021



Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini pada tahun 2021 adalah 42 sekolah. Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman tahun 2021 sebanyak 42 sekolah. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar **100%**

dengan kriteria **Baik**.

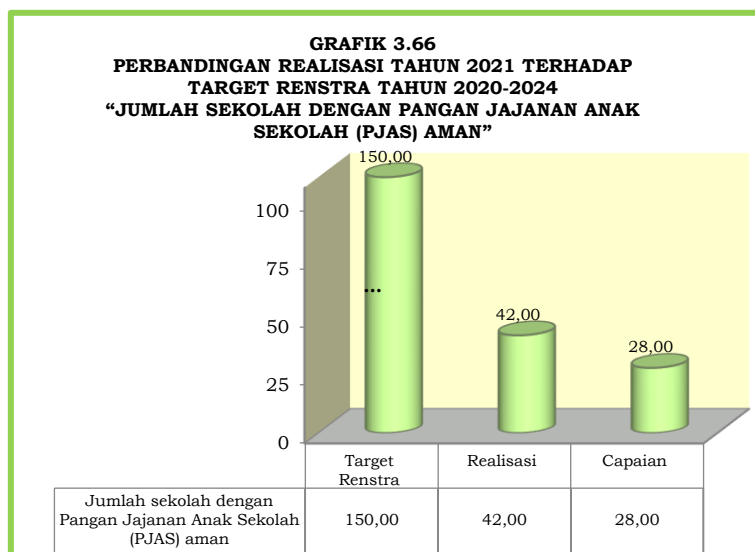
B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020



Indikator Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 adalah 16 Sekolah. Sedangkan tahun 2021 adalah 42 Sekolah. Jumlah tersebut merupakan jumlah kumulatif dari awal renstra tahun 2020



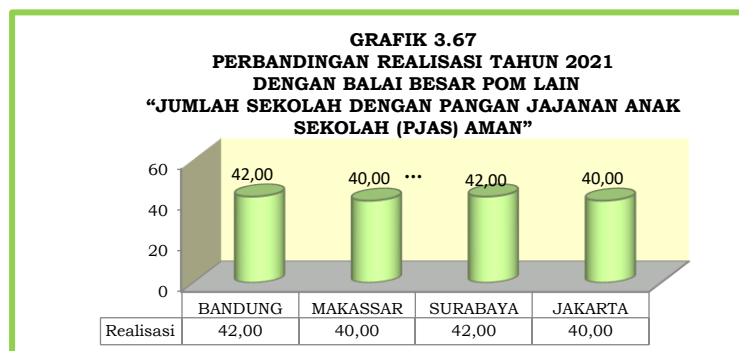
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Target akhir periode Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 150 sekolah. Jika dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja sebesar 28,00% Pada

tahun 2021, terjadi perubahan target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang seharusnya 104 sekolah dirubah menjadi 150 sekolah.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja dari Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman sebagai berikut: Balai Besar POM di Bandung (42), Balai Besar POM di Makassar (40), Balai

Besar POM di Surabaya (42) dan Balai Besar POM di Jakarta (40).

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG AKAN DILAKUKAN PADA TAHUN 2021

Peningkatan pencapaian kinerja sasaran disebabkan antara lain oleh:

- ☛ Kebijakan pemerintah selama masa pandemik Covid 19, salah satunya adalah physical distancing/sosial distancing dan adanya pembatasan social skala besar (PSBB) sehingga pelaksanaan tahapan kegiatan PJAS (Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah) dilaksanakan secara daring.



- ☪ Semua tahapan kegiatan PJAS yang melibatkan banyak orang tidak memungkinkan diselenggarakan secara luring, kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan sebagai cakupan perluasan dilaksanakan dalam beberapa kali penyelenggaraan karena terkendala sinyal sehingga jumlah sekolah yang diintervensi tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan (411 sekolah). Penyelenggaraan dilaksanakan pada tanggal 14-16 Juli 2021 sebanyak 249 sekolah (Kabupaten Purwakarata, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon), tanggal 8-9 September 2021 (Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis) dan tanggal 24 November 2021 (Kota Depok) sebanyak 194. Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan juga melibatkan peserta dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementrian Agama di Kabupaten/Kota setempat. Peserta terdiri dari Guru Pengelola Kantin atau UKS/Kepala sekolah, perwakilan Komite Sekolah dan siswa.
- ☪ Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan di Sekolah dilaksanakan secara daring pada tanggal 2 Agustus 2021 (Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta), tanggal 3 Agustus 2021 (Kabupaten MAjalengka, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Purwakarta) dan tanggal 4 Agustus 2021 (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu). Peserta bimbingan teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah terdiri dari guru UKS, pengelola kantin, kepala sekolah dan siswa. Sekolah memfasilitasi kegiatan dengan menyediakan ruangan untuk peserta dengan tetap menerapkan protokoler Kesehatan.
- ☪ Tahapan Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan dilaksanakan secara jarak jauh melalui media social menyebabkan kesulitan dalam memenuhi aspek penilaian Sertifikasi PJAS Aman karena pembentukan Tim Keamanan Pangan belum bisa dilaksanakan dengan alasan Kantin sekolah masih belum buka. Sosialisasi Keamanan Pangan oleh Kader Keamanan Pangan tidak bsa dilaksanakan dengan alasan belum bisa dilakukan pertemuan secara tatap muka.
- ☪ Tahapan Sertifikasi PJAS Aman dilaksanakan setelah dilakukan monitoring Kader Keamanan Pangan, semua sekolah bisa memperoleh Sertifikat PJAS Aman karena Komitmen dari Tim Kemanan Pangan akhirnya bisa memenuhi aspek penilaian Sertifikat PJAS Aman.

Alternatif solusi yang akan dilakukan pada tahun 2022 adalah:

- ☪ Kegiatan PJAS tetap dilakukan secara daring dan luring dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah daerah setempat terkait pandemi Covid-19.



E. EVALUASI DAN ANALISIS TERKAIT TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA TRIWULAN SEBELUMNYA

Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pada periode sebelumnya adalah:

- ☪ Melakukan perubahan pelaksanaan intervensi yang dilakukan para Kader di sekolah dengan Pola Baru dengan menerapkan Perilaku dan Sikap siswa lebih cerdas dalam memilih pangan aman.

Berdasarkan rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- ☪ Kader Keamanan Pangan Sekolah memberikan sosialisasi kepada siswa melalui mata pelajaran yang berhubungan dengan pangan aman dan kepada siswa anggota yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

Rekomendasi yang tidak dapat dilaksanakan pada:

- ☪ Melakukan perubahan pelaksanaan intervensi PJAS terhadap sekolah secara luring belum dapat dilaksanakan karena masih adanya pembatasan oleh Pemerintah Daerah setempat sehingga sekolah dan juga kantin sekolah belum dibuka Kembali.

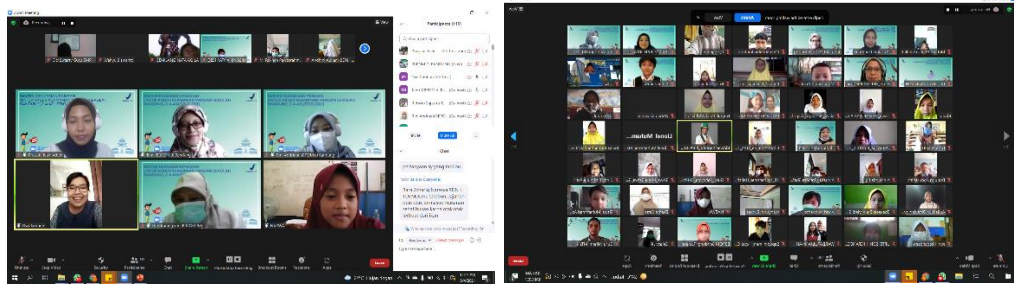
F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

- ☪ Kegiatan audiensi dan advokasi dengan lintas sector



- ☪ Komitmen dari Tim Keamanan Pangan Sekolah
- ☪ Kegiatan Bimtek Keamanan Pangan dan Piagam Bintang Keamanan Pangan





G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

3. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Jumlah desa pangan aman diukur berdasarkan jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain. Tahapan pelaksanaan kegiatan Pembentukan Desa Pangan Aman: (1) Advokasi Kelembagaan Desa; (2) Bimtek Kader Pembentukan Desa Pangan Aman; (3) Bimtek Komunitas; (4) Fasilitasi Keamanan Pangan; (5) Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan; (6) Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Desa Pangan; (7) Lomba Desa; dan (8) Pengawasan. Desa yang diintervensi meliputi 3 desa di Kabupaten Karawang (Desa Kalijati, Mekarbuana dan Lemahabang); 2 desa di Kabupaten Purwakarta (Desa Sindangsari dan Bojong Timur); 2 desa di Kabupaten Sumedang (Desa Cibunar dan Sukajaya); 2 Desa di Kabupaten Majalengka (Desa Ciborelang dan Rawa); 2 Desa di Kabupaten Cirebon (Desa Karang Sari dan Beber); 2 Kelurahan di Kota Cirebon (Kelurahan Pekiringan dan Pekalipan). Desa yang menjadi lokus stunting adalah Desa Cibunar.

**TABEL 3.34
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“JUMLAH DESA PANGAN AMAN”
TAHUN 2021**

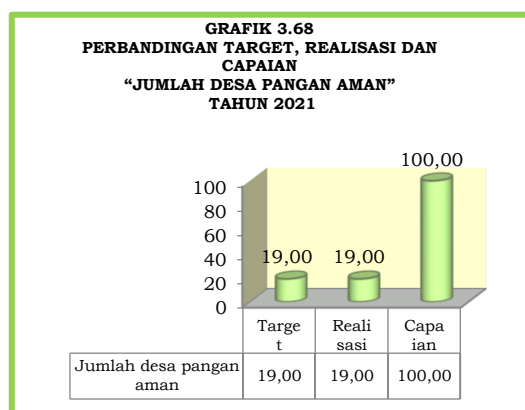
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah desa pangan aman	19,00	19,00	19,00%	Baik 



TABEL 3.35
PROGRESS PELAKSANAAN DESA PANGAN AMAN
TAHUN 2021

Kegiatan	Pembobotan Progress (%)	Progress (Capaian DJA)				Total Progress
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1 Adokasi Kelembagaan Desa	20			20		20
2 Peangadaan Paket Informasi Keamanan Pangan	5			5		5
3 Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15			15		15
4 Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15			15		15
5 Fasilitasi Keamanan Pangan	10			5	5	10
6 Fasilitasi Keamanan Pangan	10				10	10
7 Monitoring dan Evaluasi	15				15	15
8 Pengawasan Tahun Sebelumnya	10				10	10
TOTAL SKOR	100	0	0	60	40	100

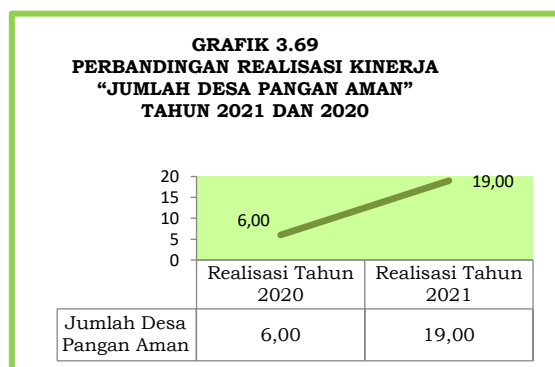
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021



Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini pada tahun 2021 adalah 19 desa. Realisasi jumlah desa pangan aman tahun 2021 sebanyak 19 desa. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar **100%** dengan kriteria **Baik**. Secara rinci progress pelaksanaan kegiatan Desa Pangan

Aman dapat dilihat pada tabel berikut.

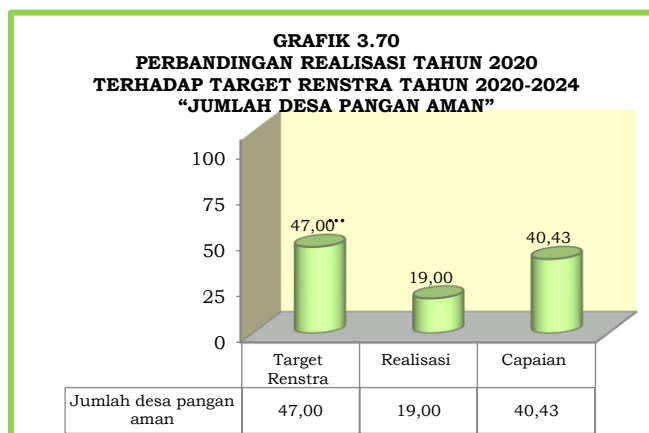
B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020



Indikator Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2021 sebanyak 19 desa. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar 6 Desa. Realisasi pada tahun 2021 merupakan jumlah kumulatif desa yang telah diintervensi dari awal periode renstra.

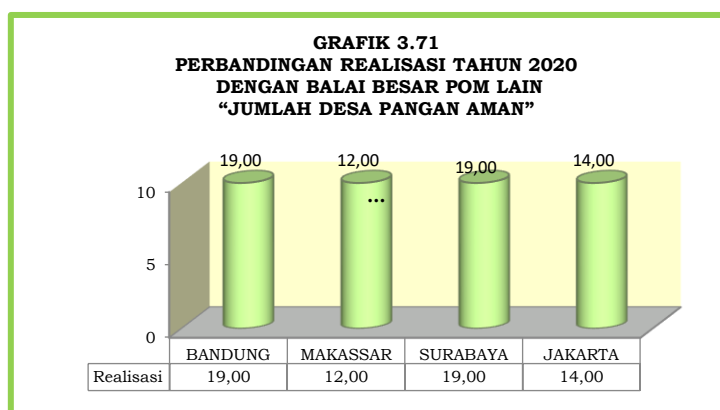


C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Target akhir periode Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 47 Desa. Jika dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja sebesar 40,43% Pada tahun 2021.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja dari Jumlah desa pangan aman sebagai berikut: Balai Besar POM di Bandung (19), Balai Besar POM di Makassar (12), Balai Besar POM di Surabaya (19) dan Balai Besar POM di Jakarta

(14).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Peningkatan pencapaian kinerja sasaran disebabkan antara lain oleh:

- ☪ Kebijakan pemerintah selama masa pandemik Covid 19, salah satunya adalah physical distancing/social distancing dan adanya pembatasan sosial skala besar (PSBB) sudah diperlonggar dengan adaptasi kebiasaan baru (AKB) sehingga tahapan kegiatan Desa Paman dapat dilaksanakan. Selain itu adanya teknologi pertemuan secara daring menggunakan platform zoom meeting memungkinkan kegiatan masih dapat dilaksanakan.
- ☪ Tahapan kegiatan Desa Paman yang melibatkan banyak orang dialihkan menjadi pertemuan secara daring dan pertemuan luring (hybrid) tetap dapat dilaksanakan namun tetap menerapkan protokol Kesehatan yang sangat ketat dan hanya dilaksanakan di desa masing-masing sedangkan petugas BBPOM melaksanakan secara daring.



Alternatif solusi yang dilakukan pada tahun 2021 adalah:

- ☰ Melaksanakan kegiatan desa pangan aman secara hybrid (daring dan luring) dengan tetap mengikuti protokol Kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan/*handsanitizer* pada kegiatan antara lain:
 - a. Advokasi Keamanan Pangan dengan lintas sektor (daring)
 - b. Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) (hybrid)
 - c. Bimtek komunitas desa dan Komunitas Pelaku Usaha Pangan Desa (hybrid)
 - d. Fasilitasi Keamanan Pangan yang dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Desa, Sanitarian serta petugas Penyuluh Keamanan Pangan (PKP)/ *District Food Inspector* (DFI) dari Dinas Kesehatan.
 - e. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan berupa sampling dan uji cepat menggunakan Rapid Test Kit.
 - f. Monitoring dan Evaluasi dengan lintas sektor untuk melihat keberhasilan program keamanan pangan desa serta merencanakan tindaklanjut program keamanan pangan desa (daring)

F. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pada periode sebelumnya adalah:

- ☰ Melaksanakan kegiatan Advokasi Keamanan Pangan dengan lintas sektor, Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), Bimtek komunitas desa dan Komunitas Pelaku Usaha Pangan Desa (PUPD), Fasilitasi Keamanan Pangan; Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan dan Pengawasan pada masing – masing desa target serta melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Desa Pangan dan Lomba Desa dengan tetap mematuhi protokol Kesehatan.
- ☰ Tahapan kegiatan Desa Pangan selanjutnya terhadap 13 desa target bisa diselesaikan tepat waktu.

Berdasarkan rekomendasi tersebut telah dilakukan tindaklanjut pada tahun 2021 sebagai berikut:

- ☰ Melaksanakan kegiatan desa pangan aman dengan tetap mengikuti protokol Kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan/*handsanitizer* pada kegiatan antara lain:
 - a. Advokasi Keamanan Pangan dengan lintas sektor
 - b. Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)
 - c. Bimtek komunitas desa dan Komunitas Pelaku Usaha Pangan Desa (PUPD)
 - d. Fasilitasi Keamanan Pangan yang dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Desa, Sanitarian serta petugas Penyuluh Keamanan Pangan (PKP)/ *District Food Inspector* (DFI) dari Dinas Kesehatan.



- e. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan berupa sampling dan uji cepat menggunakan Rapid Test Kit.
- f. Monitoring dan Evaluasi dengan lintas sektor untuk melihat keberhasilan program keamanan pangan desa serta merencanakan tindaklanjut program keamanan pangan desa.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

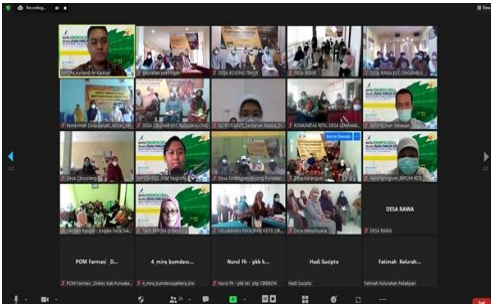
🕌 Kegiatan Audiensi dan Advokasi dengan lintas sektor terkait



🕌 Kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan




🕌 Bimtek Komunitas Desa Dan Pelaku Usaha Pangan Desa



🕌 Fasilitasi Keamanan Pangan



 Workshop Monitoring dan Evaluasi Keamanan Pangan



H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

4. JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya diukur berdasarkan jumlah pasar yang mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya, mengalami penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, serta mempunyai rencana program pengawasan pada tahun berikutnya.

TABEL 3.36
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS”
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8	8	100	Baik	

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar, tahun 2021 BPOM melakukan revitalisasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan strategi program yaitu advokasi, pelatihan, pengawasan, pemberdayaan komunitas pasar, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Secara rinci progress pelaksanaan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dapat dilihat pada tabel berikut.



TABEL 3.37
PROGRESS PELAKSANAAN KEGIATAN PANGAN AMAN
DARI BAHAN BERBAHAYA
TAHUN 2021

	Kegiatan	Pembobotan Progress (%)	Progres (Capaian DJA)				Total Progress
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Advokasi	20			20		30
2	Survei Pasar	5				5	5
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15			15		15
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar	20				10	10
5	Penyuluhan	5			5		5
6	Kampanye	5			5		5
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20				20	20
8	Lomba Pasar Aman	10				10	10
TOTAL SKOR		100	12	0	58	30	100

Tahun 2021, terdapat 6 (enam) pasar yang diintervensi oleh Balai Besar POM di Bandung, yaitu Pasar Pagi Kota Cirebon, Pasar Sumber Kabupaten Cirebon, Pasar Desa Ciborelang Kabupaten Majalengka, Pasar Rakyat Johar Kabupaten Karawang, Pasar Wado Kabupaten Sumedang, dan Pasar Wanayasa Kabupaten Purwakarta. Sementara itu untuk pasar yang telah diintervensi tahun 2020, yaitu Pasar Desa Cilimus Kabupaten Kuningan dan Pasar Bangkir Kabupaten Indramayu tetap dilakukan pengawalan dalam kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

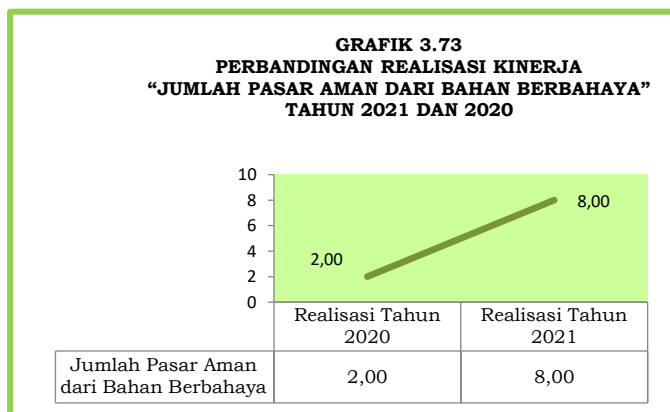
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021



Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini pada tahun 2021 adalah 8 (delapan) pasar. Realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2021 sebanyak 8 pasar. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

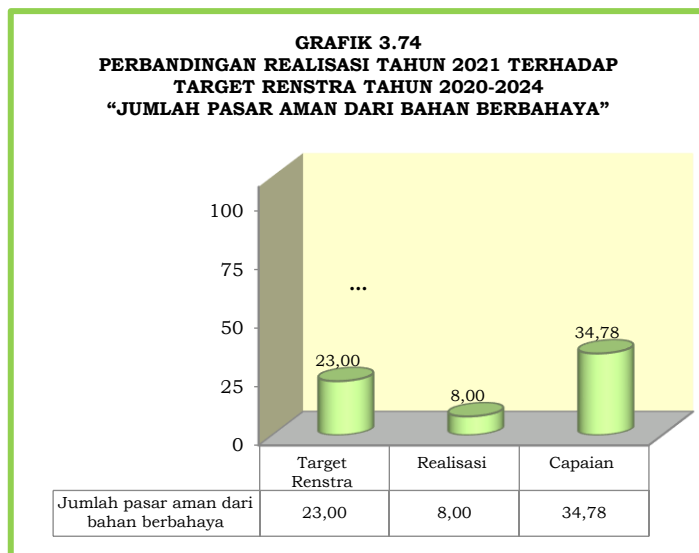


B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020



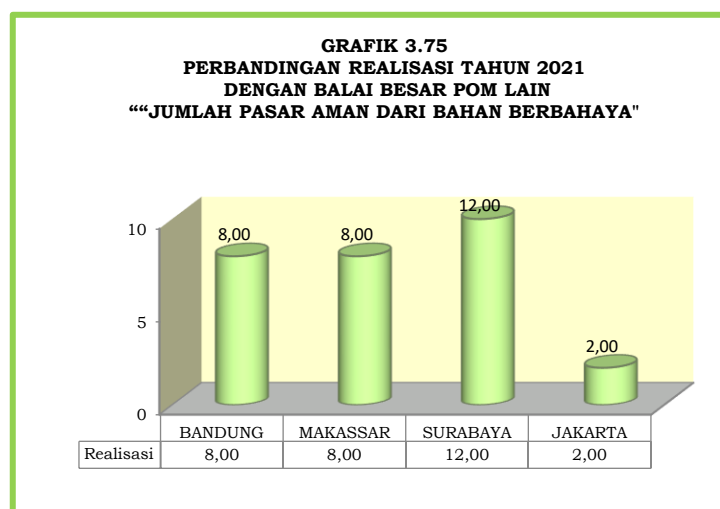
Indikator jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di Provinsi Jawa Barat tahun 2021 sebanyak 8 (delapan) pasar. Sedangkan tahun 2020 sebesar 6 (enam) pasar. Jumlah pasar tahun 2021 merupakan jumlah kumulatif dari periode awal renstra.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Target akhir periode Rencana Strategis tahun 2020 - 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 23 pasar. Jika dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja sebesar 34,78% Pada tahun 2021.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja dari jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebagai berikut: Balai Besar POM di Bandung 8 (delapan) Pasar, Balai Besar POM di Makassar 8 (delapan) Pasar, Balai Besar POM di Surabaya 12 (dua belas) Pasar dan Balai Besar POM di

Jakarta 2 (dua) Pasar.



E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Peningkatan pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2021 disebabkan antara lain oleh:

- ☪ Kebijakan pemerintah selama masa pandemi Covid-19, salah satunya adalah *physical distancing/social distancing*. Adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah diperlonggar sehingga beberapa tahapan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dapat dilaksanakan secara luring. Dimana kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dilaksanakan di pasar yang diintervensi dengan melibatkan banyak orang, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- ☪ Tahapan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang sudah dilaksanakan hingga TW IV meliputi tahap survei pasar dalam rangka implementasi pasar pangan aman berbasis komunitas, bimbingan teknis bagi pengelola pasar, penyuluhan pedagang pasar dan kampanye Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di 6 (enam) pasar yang diintervensi tahun 2021, serta tahap monitoring dan evaluasi tahap I dan tahap II baik di 2 (dua) pasar yang dikawal (diintervensi tahun 2020) di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu, serta 6 (enam) pasar yang diintervensi tahun 2021 di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang dengan progress 100%.
- ☪ Tahapan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang dilaksanakan pada TW IV meliputi Survei Pasar dalam rangka Implementasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang dengan progress 5%; tahap Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahap II dengan progress 20%; serta lomba pasar pangan aman berbasis komunitas dengan progress 10%.

Alternatif solusi yang akan dilakukan pada tahun 2022 adalah:

- ☪ Oleh karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19, maka tahapan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan serta mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah setempat.

F. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA TRIWULAN SEBELUMNYA

Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pada periode sebelumnya adalah:

- ☪ Pelaksanaan tahapan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas akan dilaksanakan dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat sehingga terlaksana 100%.



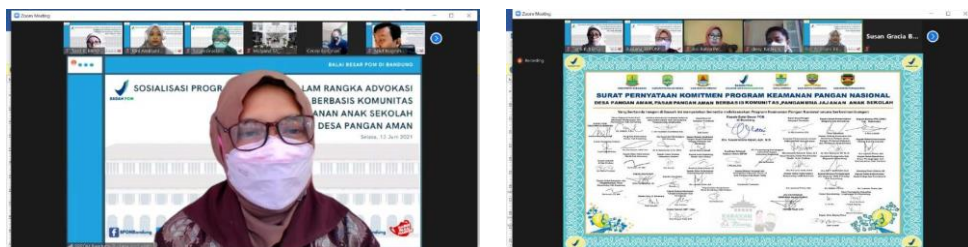
- ☰ Melakukan koordinasi intensif dengan stakeholder untuk melakukan intervensi ke pedagang, pembeli di pasar, sehingga pasar yang diintervensi bisa menerapkan secara mandiri program pasar aman dari bahan berbahaya serta dapat direplikasi oleh pasar lainnya di Kabupaten setempat dan bisa masuk nominasi Lomba Pasar Aman 2021.

Berdasarkan rekomendasi tersebut telah dilakukan tindaklanjut sebagai berikut:

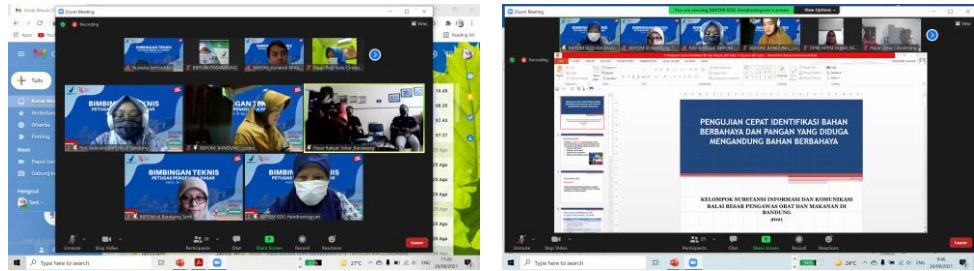
- ☰ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasar pangan aman berbasis komunitas untuk 6 (enam) pasar yang diintervensi tahun 2021 di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, serta 2 (dua) pasar pengawalan di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan standar protokol Kesehatan yang ketat.
- ☰ Pada tahap monev ini, petugas pengelola pasar diharapkan dapat melakukan pengawasan secara mandiri terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui pengambilan contoh dan pengujian cepat menggunakan test kit. Petugas BBPOM di Bandung melakukan kunjungan ke setiap pasar baik yang diintervensi baru maupun pasar yang dikawal untuk memantau hasil pelaksanaan monev yang dilaksanakan oleh petugas pengelola pasar di pasar yang dikelolanya masing-masing.

H. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

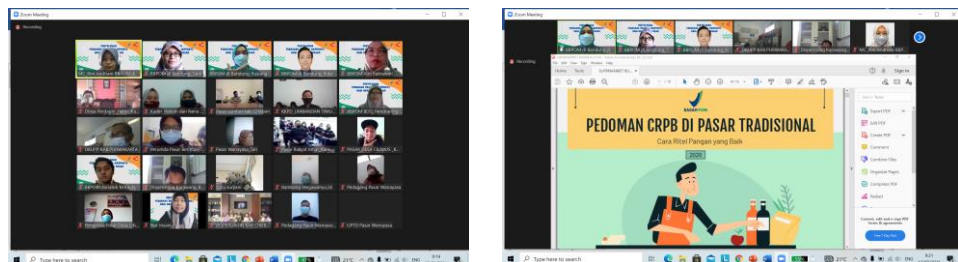
- ☰ Kegiatan advokasi dengan lintas sektor



🕌 Kegiatan Bimtek Petugas Pengelola Pasar



🕌 Kegiatan Penyuluhan Pedagang Pasar dan Kampanye Komunitas Pasar dalam rangka Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas



🕌 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas



G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA




Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.



**SASARAN
KEGIATAN
KE-6**
**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN
PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN
DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) dan diukur pada akhir tahun. Dari perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **89,42%** dengan kriteria **Cukup**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3.38
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-6
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100,00%	87,03%	87,03%	Cukup	
2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100,00%	91,82%	91,82%	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN				CUKUP	


1. PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan cara menjumlahkan persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dan persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar kemudian dibagi 2 (dua). Persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar adalah jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi Jumlah target sampel Obat dikali 100%. Sedangkan persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar adalah jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100%.

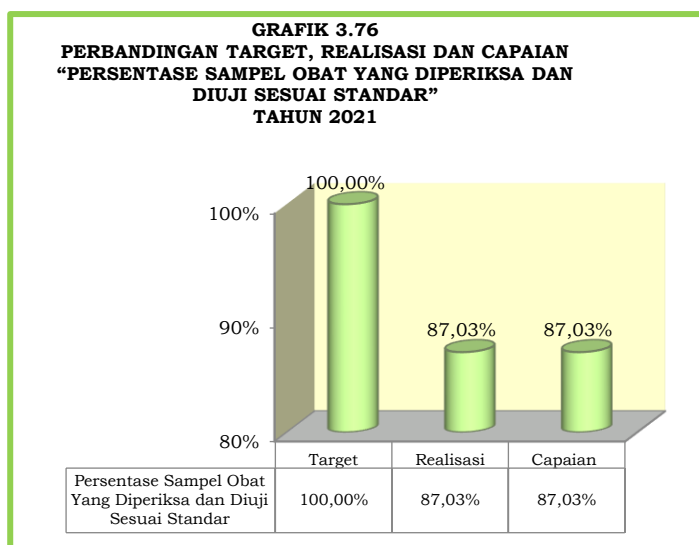
Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Definisi operasional sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.



TABEL 3.39
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR”
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100,00%	87,03%	87,03%	Cukup 

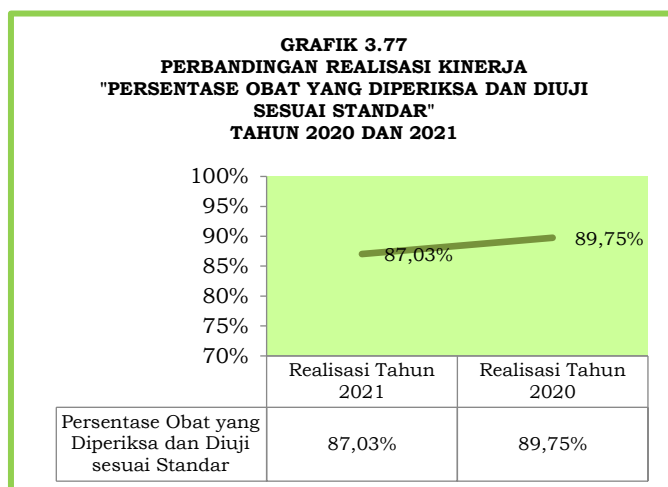
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021



Pada tahun 2021, jumlah target sampel obat yang disampling sebanyak 1995 sampel dengan rincian jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 1995 sampel (100,00%) dan jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar sebanyak 1932 sampel (74,05%). Dari data tersebut, diperoleh nilai

persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 87,03%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar **87,03%** dengan kriteria **Cukup**.

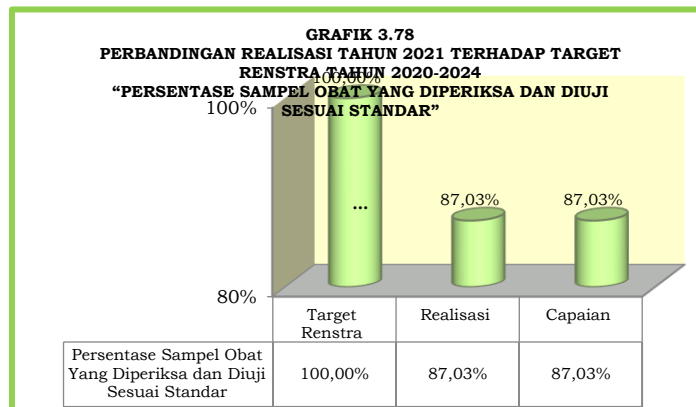
B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020



Persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2021 sebesar 87,03% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 89,75%. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan realisasi untuk indikator kegiatan ini. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 3.2.



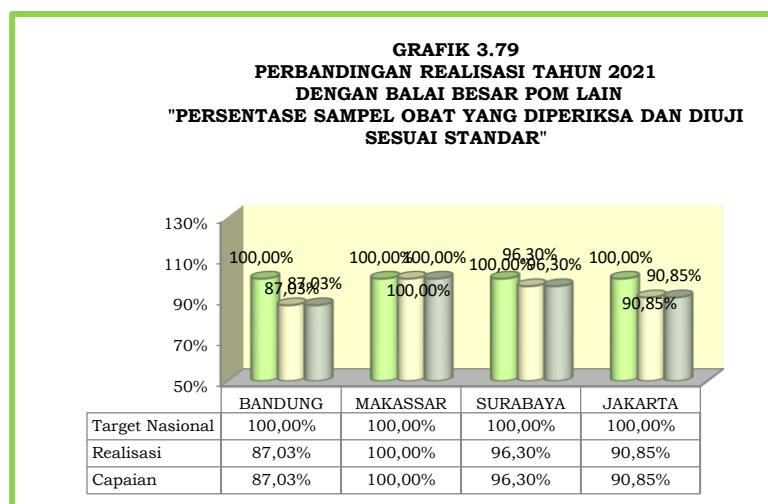
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Pada tahun 2020, target indikator sasaran tersebut yang ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 100%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja

sebesar 87,03% Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.78

E. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu : Balai Besar POM di Makassar (100%), Balai Besar POM di Surabaya (96,30%),

Balai Besar POM di Jakarta (90,85%) dan Balai Besar POM di Bandung (87,03%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (100,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Makassar (100,00%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.16.

D. ANALISIS KEGAGALAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Kegagalan pencapaian indikator ini pada tahun 2021 disebabkan oleh:

- ☛ Adanya kondisi pandemi Covid 19 pada tahun 2021 mengakibatkan dilakukannya perubahan sistem kerja, yaitu adanya sistem *work from home*. Selain itu, ada beberapa personil laboratorium yang terkonfirmasi positif sehingga diharuskan menjalani isolasi mandiri dalam jangka waktu yang cukup lama.
- ☛ Keterbatasan kemampuan salah satu alat laboratorium dalam proses pengujian sehingga terjadi antrian dalam melakukan pengujian pada alat lain.



- ✎ Terdapat beberapa parameter pengujian yang harus dilakukan pengulangan dikarenakan metode pengujian yang kurang handal terhadap berbagai jenis matriks.
- ✎ Adanya kegiatan reakreditasi yang memerlukan persiapan dan tindakan perbaikan terhadap temuan.
- ✎ Adanya keterbatasan dalam pemeliharaan dan perbaikan alat rusak diantaranya keterbatasan anggaran dan pembatasan mobilitas teknis terutama yang berasal dari luar kota dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
- ✎ Pada bulan Juli diterapkan PPKM Darurat se Jawa dan Bali sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Jawa dan Bali dimana Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang berada di wilayah PPKM Darurat pada sector non esensial menjalankan tugas kedinasan di rumah (WFH) secara penuh atau 100% (seratus persen)
- ✎ Dengan adanya PPKM Darurat pada bulan Juli tersebut menyebabkan tidak ada kegiatan sampling dan pengujian, sehingga target sampling bulan Juli dialihkan ke bulan Agustus sampai November 2021, hal tersebut membuat beban pengujian menjadi bertambah.
- ✎ Adanya beberapa alat pengujian yang bermasalah seperti alat KCKT dan *microvaawe* sehingga menghambat proses pengujian sampel

Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2021, antara lain:

- ✎ Koordinasi sampling dan pengujian yang lebih baik melalui pembuatan whatsapp grup (WAG), sehingga tidak terjadi penumpukan pengujian pada saat bersamaan.
- ✎ Pembuatan jadwal untuk proses pengujian dan penggunaan alat uji yang lebih tepat, sehingga lebih efisien dan efektif.
- ✎ Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.
- ✎ Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Makanan meningkat.



E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :

- ☰ Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.
- ☰ Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung adalah peningkatan kompetensi dan kapabilitas personel melalui pelatihan, kalibrasi/verifikasi peralatan laboratorium, jaminan mutu hasil pengujian melalui uji profisiensi dan uji kolaborasi, validasi dan verifikasi metode analisa serta akreditasi laboratorium.
- ☰ Telah dilaksanakan Bimtek CPKB Junior pada tanggal 24-27 Agustus 2021 secara daring.



Gambar 3.15 Kegiatan Bimbingan Teknis CPKB

- ☰ Pada tahun 2021 telah dilakukan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis personil kimia obat melalui pelatihan dan webinar, yaitu 1). Sosialisasi ISO 9001:2015; 2). Sosialisasi ISO 37001; 3) Awareness ISO 17025:2017; dan 4). *Chromatography and Mass Spectrometry for Life Science Science*; 5) Pelatihan Pengujian Rapid Test untuk Senyawa Obat dan Pengujian Narkotika, Psikotropika menggunakan Instrumen GC-MS; 6) Pelatihan dan Sosialisasi Roadmap Pengembangan Baku Pembanding; 7) Seminar Hasil Strategi Percepatan Pemenuhan Baku Pembanding melalui Kolaborasi Academic-Business_Government (ABG); 8) Webinar tentang Kromatografi Gas (KG) dan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT). 9). Bimbingan Teknis Verifikasi Penetapan Kadar Selenium Sulfida Dalam Kosmetik Sediaan Sampo Secara Spektrometri Serapan Atom-Nyala (AAS); Bimbingan Teknis Verifikasi dan Identifikasi Antihistamin dalam Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Sediaan Padar dan Cair Secara GC-MS.





Gambar 3.16 Foto kegiatan Bimbingan Teknis Internal Laboratorium

- ☪ Pelaksanan pemeriksaan sarana produksi dioptimalkan secara daring dan luring seiring sudah menurunnya level PPKM untuk mencapai target pemeriksaan sarana produksi.
- ☪ Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang dilakukan secara rutin. Rapat Monev Kinerja Bulanan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung dan dihadiri oleh seluruh Koordinator yang diselenggarakan secara Luring dan Daring.

F. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Rekomendasi perbaikan ke depan adalah sebagai berikut :

- ☪ Dalam rangka mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung maka Laboratorium Balai Besar POM di Bandung harus handal dengan dilengkapi oleh alat laboratorium yang lengkap, sehingga seluruh parameter uji kritis yang ditetapkan dalam standar pedoman sampling dan timeline telah sesuai dengan pedoman/SOP yang telah ditetapkan.
- ☪ Pada tahun 2021 masih terkendala pandemic Covid-19, sehingga masih dilakukan penyesuaian jam kerja dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja yang direncanakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kerja Balai Besar POM di Bandung sehingga target tahun 2021 dapat tercapai. Dengan penyesuaian ini, dilakukan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji, sehingga pengujian dapat berjalan efisien dan efektif.



- ☪ Meningkatkan kompetensi manajerial dan teknis personil pengujian melalui pelatihan dan webinar, Bimbingan Teknis Internal. Dengan adanya pelatihan dan webinar ini meningkatkan pengetahuan dari personel penguji kimia pangan.
- ☪ Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik pemeriksaan sampel makanan maupun pengujian makanan sehingga pemeriksaan dan pengujian makanan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA


Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

1. PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan cara menjumlahkan persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dan persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar kemudian dibagi 2 (dua). Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar adalah jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi Jumlah target sampel Makanan dikali 100%. Sedangkan persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar adalah jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100%.

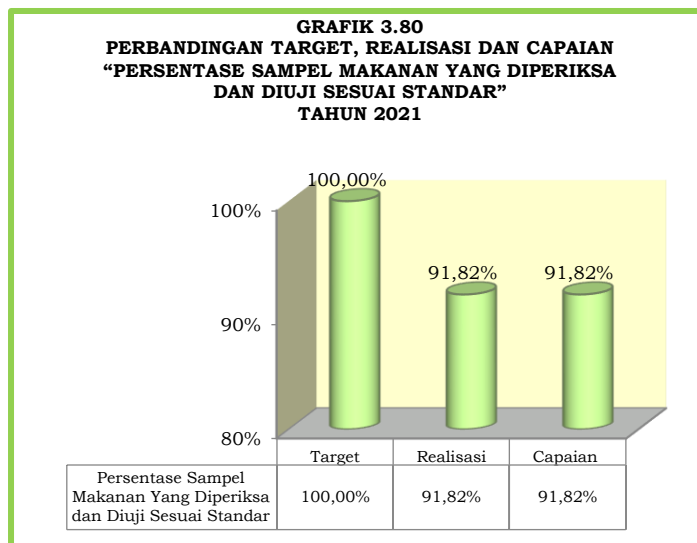
Definisi operasional sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

TABEL 3.40
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA
DAN DIUJI SESUAI STANDAR”
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar	100,00%	91,82%	91,82%	Baik	



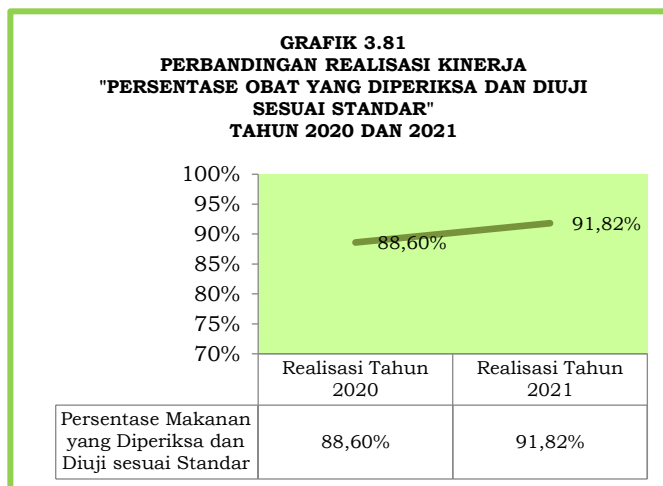
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021



Pada tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 100%. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2021 sebesar 91,82%, dengan rincian jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebesar 100,11% (sebanyak 904

sampel dibandingkan terhadap jumlah target sampel Makanan yang diperiksa sebanyak 903 sampel) dan jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar sebesar 83,52% (sebanyak 928 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel Makanan yang diuji sebanyak 1111 sampel). Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar **91,82%** dengan kriteria **Baik**.

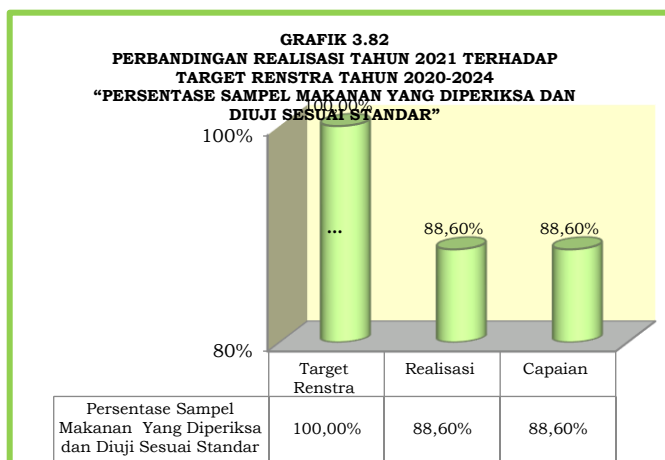
B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020



Persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2021 sebesar 91,82% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 88,60%. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan realisasi untuk indikator kegiatan ini. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 3.81.



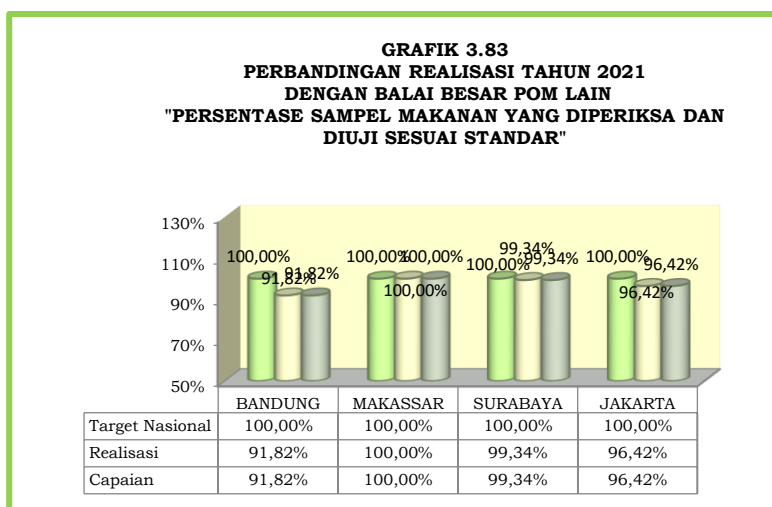
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Pada tahun 2021, target indikator sasaran tersebut yang ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 100%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja sebesar 91,82% Secara lengkap dapat

dilihat pada gambar 3.82.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu : Balai Besar POM di Makassar (100%), Balai Besar POM di Surabaya (99,34%), Balai Besar POM di

Jakarta (96,42%) dan Balai Besar POM di Bandung (91,82%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (100,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Makassar (100,00%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.16.

E. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Keberhasilan pencapaian indikator ini pada tahun 2021 disebabkan oleh:

- ☛ Target yang ditetapkan utk sampel yang diperiksa adalah 100,00% dan realisasinya sebesar 100,11% (904 sampel dari 903 sampel yang ditargetkan). Sedangkan untuk sampel yang diuji, target yang ditetapkan 100,00% dan



realisasinya mencapai 83,53% (928 sampel dari 1111 sampel yang diperiksa dan diuji).

- ☪ Dukungan dari tersedianya sarana dan prasarana penunjang berperan besar dalam peningkatan capaian sasaran kegiatan ini.
- ☪ Kondisi pandemi Covid 19 masih berlangsung sampai dengan triwulan III tahun 2021, sehingga masih berlaku adanya sistem work from home. Pengaturan sistem kerja ini diatur sedemikian rupa sehingga jam kerja tetap efektif dan efisien. Hal ini ditandai dengan tercapainya sasaran kegiatan ini.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2021, antara lain:

- ☪ Koordinasi sampling yang melibatkan fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian yang lebih baik, sehingga tidak terjadi penumpukan pengujian pada saat bersamaan serta pemecahan permasalahan atau kendala yang terjadi pada saat proses sampling di lapangan.
- ☪ Pembuatan jadwal untuk proses pengujian dan penggunaan alat uji yang lebih tepat, sehingga lebih efisien dan efektif.
- ☪ Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.
- ☪ Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Makanan meningkat.

H. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :

- ☪ Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung adalah peningkatan kompetensi dan kapabilitas personel melalui pelatihan, kalibrasi/verifikasi peralatan laboratorium, jaminan mutu hasil pengujian melalui uji profisiensi dan uji kolaborasi, validasi dan verifikasi metode analisa serta akreditasi laboratorium.
- ☪ Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial. Pada tahun 2021 telah dilakukan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis personil kimia pangan melalui pelatihan dan webinar, yaitu 1). Sosialisasi ISO



9001:2015; 2). Sosialisasi ISO 37001; 3) Awareness ISO 17025:2017; 4). *Untargeted Screening of Artificial colors in food with HRM High Resolution Mass Spectrometry*; dan 5). *Focus on Narcotic Analysis*; 6). Penetapan Kadar Logam Pb dalam Yoghurt secara AAS; 7). *Advances in Dissolution Testing: Bathless Dissolution Testers and Universal Media Preparation Systems*, 8). Bimbingan Teknis Internal Kimia Pangan dengan judul Penetapan Kadar Logam Pb dan Cd dalam Garam beryodium secara AAS.



Gambar 3.17 Foto kegiatan Bimbingan Teknis Internal Laboratorium

- ☛ Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang dilakukan secara rutin. Rapat Monev Kinerja Bulanan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung dan dihadiri oleh seluruh Koordinator yang diselenggarakan secara Luring dan Daring.

I. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Rekomendasi perbaikan kinerja ke depan adalah sebagai berikut :

- ☛ Dalam rangka mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung maka Laboratorium Balai Besar POM di Bandung harus handal dengan dilengkapi oleh alat laboratorium yang lengkap, sehingga seluruh parameter uji kritis yang ditetapkan dalam standar pedoman sampling dan timeline telah sesuai dengan pedoman/SOP yang telah ditetapkan.
- ☛ Pada tahun 2021 masih terkendala pandemic Covid-19, sehingga masih dilakukan penyesuaian jam kerja dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja yang direncanakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kerja Balai Besar POM di Bandung sehingga target tahun 2021 dapat tercapai. Dengan penyesuaian ini,



dilakukan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji, sehingga pengujian dapat berjalan efisien dan efektif.

- ☰ Meningkatkan kompetensi manajerial dan teknis personil pengujian melalui pelatihan dan webinar dan Bimbingan Teknis Internal. Dengan adanya pelatihan dan webinar ini meningkatkan pengetahuan dari personel penguji kimia pangan.
- ☰ Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik pemeriksaan sampel makanan maupun pengujian makanan sehingga pemeriksaan dan pengujian makanan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA



Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

SASARAN KEGIATAN KE-7

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung. Dari perhitungan 1 (satu) indikator tersebut, diperoleh capaian sebesar **128,32%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.41.

TABEL 3.41
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-7
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65,00%	83,40%	128,32%	Tidak Dapat Disimpulkan 
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			128,32%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN 

PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang



terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain: (a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan); (b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)); (c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) dan (d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum). Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.

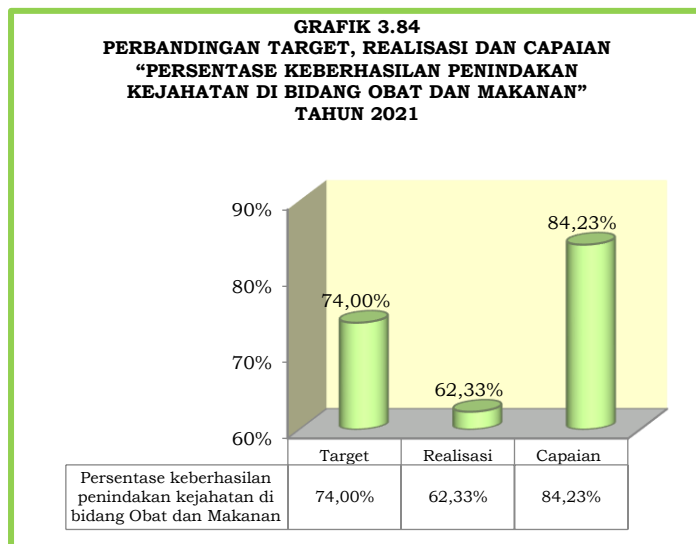
Cara untuk menghitung persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$$

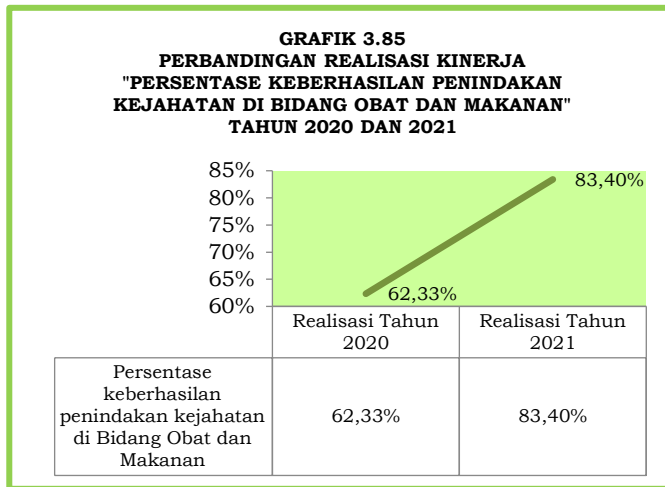
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021



Pada tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 65,00%. Realisasi kinerja untuk sasaran kegiatan ke-7 sebesar 83,40% sehingga capaian indikator sasaran kegiatan ke-7 sebesar **128,32%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.



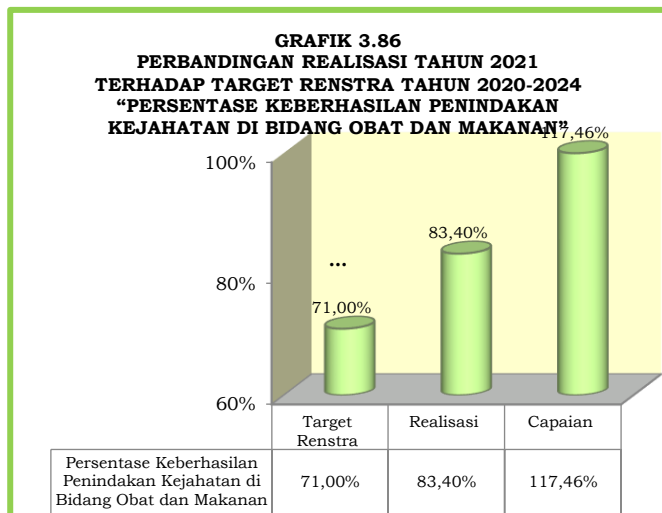
B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020



Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini pada tahun 2020 adalah sebesar 65,00%, realisasi kerja 83,4% sehingga nilai pencapaiannya sebesar **128,31%**. Jika kita bandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 dengan 2021 melalui data diatas, terlihat adanya peningkatan capaian kinerja yang signifikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan capaian kinerja pada tahun 2021 yg akan dibahas lebih lanjut pada analisis keberhasilan.

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini pada tahun 2021 adalah sebesar 74%, sedangkan realisasi kinerja sasaran ini pada tahun 2020 adalah sebesar 62,33% sehingga nilai pencapaiannya sebesar 84%. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah

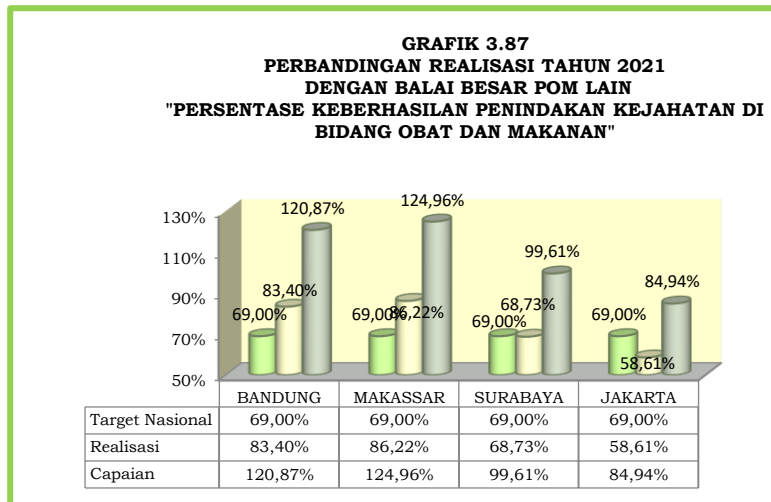
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Target indikator sasaran tersebut yang ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 71%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja sebesar 117,46%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.86



D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja dari Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan dibandingkan terhadap target nasional secara berturut-turut dari yang tertinggi sebagai berikut :

Balai Besar POM di Makassar (86,22%), Balai Besar POM di Bandung (83,40%), Balai Besar POM di Surabaya (99,61%) dan Balai Besar POM di Jakarta (58,61%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (69,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Makassar (124,96%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.87.

E. ANALISIS KEBERHASILAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Faktor yang mendukung peningkatan dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah :

- ✦ Penambahan petugas penindakan yang mendukung kegiatan investigasi, cegah tangkal dan penyidikan. Perpindahan pegawai di kelompok substansi Penindakan berpengaruh terhadap proses kegiatan kelompok substansi penindakan yang cukup maksimal dalam pelaksanaannya. Kelompok substansi penindakan Balai Besar POM di Bandung mendapatkan tambahan 4 personel petugas. 2 petugas berasal dari kelompok substansi lain di Balai Besar POM di Bandung dan 2 petugas berasal dari Unit kerja lain dalam proses redistribusi pegawai di lingkungan Badan POM.
- ✦ Terbentuknya jejaring informasi baru terkait pengawasan obat dan makanan. Jejaring informasi yg sebelumnya hilang, sudah mulai bisa dijalin kembali dengan desain jaringan informasi yang baik. Hal ini sangat berpengaruh dan mendukung terhadap kinerja kelompok substansi penindakan dalam mencapai targetnya. Jejaring informasi yang baik akan menghasilkan informasi yang akurat dan valid sehingga mendukung keberhasilan penyidikan di kelompok substansi penindakan.



- ☪ Kemampuan koordinasi dari petugas semakin meningkat dan bertambahnya jumlah petugas yang dapat melakukan koordinasi dengan baik sehingga membantu percepatan dalam penyelesaian berkas perkara
- ☪ Koordinasi dilakukan secara berjenjang terhadap lintas sektor dalam lingkup Criminal Justice System (CJS) sehingga permasalahan dalam pemberkasan dapat diatasi dengan segera dan mempercepat pencapaian target

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran adalah :

- ☪ Kelompok Substansi Penindakan Balai Besar POM di Bandung terus membangun jejaring informasi dengan desain baru yaitu tidak berfokus kepada satu pegawai. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan intelijen, pegawai yg ditugaskan diharapkan mampu mendapat informan baru guna membangun jaringan yg lebih luas
- ☪ Memaksimalkan sinergitas internal Kelompok Substansi Penindakan Balai Besar POM di Bandung dengan Kelompok Substansi lain di BBPOM di Bandung sehingga dihasilkan kualitas penyidikan yang baik
- ☪ Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Intelijen dan Direktorat Cyber dalam penelusuran tindak pidana bidang obat dan makanan dalam penjualan online

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Dalam mendukung tercapainya sasaran, yaitu: “Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Bandung” dilaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu: (1) Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan dan (2) Dukungan Investigasi dan Penyidikan Obat dan Makanan. Kedua kegiatan tersebut dalam rangka menjalankan fungsi Balai Besar POM di Bandung sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu : pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; serta pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber.



🕌 Penyidikan Obat dan Makanan

Pada tahun 2021, jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan sebanyak 10 perkara. Perkara adalah kasus yang ditindak lanjuti secara pro justicia berdasarkan hasil gelar perkara. Sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDPnya kepada Kejaksaan melalui Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pro justicia memiliki arti demi hukum, untuk hukum atau undang-undang. Secara formal administratif, pro justicia menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum adalah tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian dan pemeriksaan.

Proses penegakan hukum atau penyidikan terhadap tindak pidana obat dan makanan yang dilakukan PPNS Balai Besar POM di Bandung merupakan sanksi terberat setelah sanksi administratif dalam pemberian sanksi terhadap pelaku yang melanggar undang-undang bidang obat dan makanan. Dalam tindak pidana obat dan makanan terdapat dua unsur penting yaitu unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). *Actus reus* merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang sedangkan *mens rea* merupakan sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana. Dalam penyidikan kasus obat dan makanan yang dilakukan oleh PPNS BBPOM di Bandung, *mens rea* ini yang menjadikan pertimbangan penting dalam gelar kasus untuk menetapkan seseorang atau pelaku yang melanggar undang-undang bidang obat dan makanan untuk dilakukan proses lanjut berupa penyidikan.

Dengan adanya sanksi pidana sesuai dengan undang-undang bidang obat dan makanan maka diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan serta dapat memberikan peringatan kepada pelaku usaha obat dan makanan lainnya agar dalam berusaha di bidang obat dan makanan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyidikan BBPOM di Bandung pada tahun 2021 terdiri atas 10 perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan yang telah melalui tahapan sebagai berikut:



TABEL 3.42
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN
DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2021

UPT	Tahapan	s.d Desember / Triwulan IV										
		Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
		Perkara tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan	Perkara Carry Over							
BBPOM di Bandung	SPDP	10	16	1	2	1.00		0.15	15.00%	83.40%	100.00%	83.40%
	Tahap I			1	2	0.90	0.54	0.4	35.62%			
	P21			1	4	0.80	0.46	0.3	23.43%			
	Tahap II			7	8	0.70	0.31	0.15	9.36%			
	Total	10	16	10	16							

Pada proses penyidikan tindak pidana obat dan makanan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil BBPOM di Bandung selama Tahun 2021 telah melakukan penyidikan terhadap 10 perkara tindak pidana obat makanan dengan nilai ekonomi Rp. 11.477.027.792.-, (Sebelas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri dari: 4 kasus obat, 4 kasus obat tradisional, 2 kasus pangan. Rincian nilai ekonomi barang bukti perkara BBPOM di Bandung pada Tahun 2021 adalah tercantum dalam Tabel 3.43.

TABEL 3.43
NILAI EKONOMI BARANG BUKTI PERKARA
BBPOM DI BANDUNG
TAHUN 2021

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah Kasus	Nilai Ekonomi
1.	Obat	4	Rp1,407,841,592.00
2.	Obat Tradisional	4	Rp9,734,067,000.00
3.	Pangan	2	Rp335,119,200.00
	Jumlah	10	Rp. 11.477.027.792.-

Intelijen

Kegiatan intelijen adalah rangkaian kegiatan untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dengan sumber informasi dari masyarakat, temuan hasil pemeriksaan, pengaduan masyarakat melalui Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi, pengembangan kasus yang ditangani, serta penelusuran melalui media online. Kegiatan intelijen yang dilakukan pada tahun 2021 terhadap 65 sarana yang diduga terdapat tindak pidana bidang obat dan makanan. Selanjutnya dilakukan operasi intelijen terhadap 18 sarana untuk dilakukan pendalaman untuk memastikan terjadinya tindak pidana bidang obat dan makanan. Setelah dilakukan kegiatan operasi intelijen ditindaklanjuti dengan kegiatan penindakan dengan output kasus pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan sebanyak 11 kasus,



terdiri dari 10 kasus Pro-justitia, dan 1 kasus dilimpahkan ke Denpom Siliwangi Jawa Barat.

☛ Cegah Tangkal

Kegiatan cegah tangkal BBPOM di Bandung dilakukan juga dengan dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor antara lain Polda Jawa Barat, Polresta Bandung dan BNN propinsi Jawa Barat terkait persebaran komoditas obat dan makanan tidak memenuhi standar termasuk produk tanpa izin edar dengan kesepakatan akan saling memberikan informasi mengenai adanya kejahatan di bidang obat dan makanan. Telah dilakukan identifikasi kerawanan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung dengan pengembangan kasus dan koordinasi internal dengan bidang lain serta koordinasi eksternal dengan lintas sektor terkait.

BBPOM di Bandung pada tanggal 25 Oktober 2021, telah melakukan kegiatan cegah tangkal terhadap keberlanjutan peredaran Suplemen Kesehatan yang tidak memiliki izin edar didasarkan informasi dari Direktur Intelijen Obat dan Makanan Badan POM bahwa terdapat perdagangan Suplemen Kesehatan tidak memiliki izin edar Merk Bronson di Kab Bandung. BBPOM di Bandung pada tanggal 22 April 2021, juga telah melakukan kegiatan cegah tangkal terhadap keberlanjutan peredaran produk pangan yang rusak/ kedaluarsa didasarkan laporan masyarakat bahwa terdapat perdagangan produk pangan yang rusak (bekas banjir) dan kedaluarsa di PT. Indomarco Prismatama DC Bekasi. Estimasi produk pangan olahan rusak dan kedaluarsa yang ditemukan di Gudang Indomarco Adi Prisma adalah senilai Rp. 897.099.284,-.



☛ Pemantauan Siber

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan obat dan makanan yang beredar di Jawa Barat dengan wilayah yang merupakan wilayah kerja BBPOM di Bandung, petugas Kelompok Substansi Penindakan telah melakukan



penelusuran secara daring terhadap produk obat dan makanan serta sarana penjualannya. Tindak lanjut terhadap penelusuran secara daring adalah dilakukan pengajuan kepada Direktorat Siber untuk melakukan tindak lanjut berupa profiling atau takedown terhadap akun penjual di market place. Selama tahun 2021 telah dilakukan pengawasan siber terhadap 204 akun E-commerce dan 18 akun Sosmed dan tindak lanjut berupa permohonan take down ke Direktorat Siber Badan POM berjumlah 118 akun E-commerce dan tindak lanjut profiling berjumlah 104 akun E-commerce.

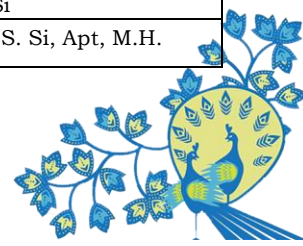
☛ Dukungan Investigasi dan Penyidikan Obat dan Makanan

1.1. *Peningkatan Kompetensi SDM Penindakan*

Peningkatan kompetensi SDM baik dari segi kompetensi teknis ataupun manajerial telah dilaksanakan terhadap petugas Kelompok Substansi Penindakan Balai Besar POM di Bandung dalam rangka pemenuhan kompetensi petugas sesuai standar dalam melaksanakan tugasnya. Program peningkatan kompetensi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kompetensi petugas dan program ini dilaksanakan juga untuk pemerataan kompetensi diantara petugas di Kelompok Substansi Penindakan. Pada Tahun 2021 terdapat kegiatan peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang telah dilaksanakan oleh petugas Kelompok Substansi Penindakan sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini.

TABEL 3.44
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENINDAKAN

Pendidikan/Pelatihan/Workshop/Bimbingan Teknis-Manajerial	Peserta
Pelatihan Open Source Intelligence Technique (OSINT)	1. Alex Sander, S.Farm Apt.,MH. 2. Tegar Setya Dharma, S.H.
Pembentukan Petugas Intelijen Badan POM (Lanjutan) TA 2021	1. Komang Andaru Pradhipta, S.H.
Perkuatan Mekanisme Operasi Tahun Anggaran 2021 tanggal 22-23 November 2022	1. Lintang Kusumawardani, S.H. 2. Rani, S.Si, Apt.
Pelatihan Teknis Penanganan Kasus di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan Badan POM TA.2021 tanggal 08-09 Desember 2022	1. Lintang Kusumawardani, S.H. 2. Rani, S.Si, Apt.
Bimbingan Teknis Penyusunan LAPKIN	1. Lutfi Rizki Andriansyah, S.Sos
Pemetaan Wilayah Rawan Kasus Kejahatan Obat dan Makanan tanggal 14 Juli 2021	1. Lutfi Rizki Andriansyah, S.Sos
In House Training Penyidikan tanggal 29-30 November 2021	1. Alex Sander, S.Farm Apt.,MH. 2. LINTANG KUSUMAWARDANI, SH 3. Rani, S.Si, Apt.
Workshop Manajemen Intelijen Soreang	1. Alex Sander, S.Farm Apt.,MH. 2. Angga Nugraha S.Si
Pelatihan Teknis Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang	1. Ayi Mahpud Sidik, S. Si, Apt, M.H.



(TPPU) di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan 7 – 10 Desember 2021	

1.2. KOORDINASI DAN SINERGISME ICJS

Pelaksanaan pertemuan peningkatan koordinasi dan sinergisme dalam rangka Integrated Criminal Justice System (ICJS) dilakukan dalam pertemuan-pertemuan terbatas seiring dengan masa Covid-19 di wilayah Jawa Barat. Pada tanggal 30 September 2021 dilakukan pertemuan koordinasi dan sinergisme dalam lingkup terbatas bersama Aspidum Kejati Jabar, Kasie TPUL dan Kasie Narkotika dengan materi pembahasan Sinergisme BBPOM di Bandung dan Kejati Jabar dalam penyidikan kasus obat dan makanan di wilayah Jawa Barat.

Pada 26 November 2021 juga dilakukan pertemuan koordinasi dan sinergisme dalam lingkup terbatas bersama Direktur Direktorat Narkoba Polda Jabar dan Direktur Intelijen Badan POM dengan materi sinergisme Badan POM dan POLRI khusus di wilayah Polda Jabar dalam rangka kegiatan penyidikan dan tukar menukar informasi terkait penyalahgunaan obat-obat tertentu.



G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi untuk pencapaian sasaran ini terdapat pada triwulan sebelumnya dan rekomendasi tahun 2021 adalah pada koordinasi dan kerjasama dalam penindakan obat dan makanan serta penyesuaian kegiatan penyidikan dengan menggunakan teknologi.

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada tahun 2021 terhadap rekomendasi yang telah diberikan adalah sebagai berikut :



- ✎ Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dalam CJS (Criminal Justice System) dilakukan secara intensif guna mendukung kelancaran penindakan dan dalam usaha percepatan dalam proses penyelesaian berkas perkara. Koordinasi berupa penyamaan dalam langkah penindakan di tempat kejadian perkara dan proses pemberkasan bersama Korwas Polda Jabar. Koordinasi dengan Kejati Jabar dalam rangka mendukung percepatan pemberkasan kasus obat dan makanan yang ditangani PPNS Balai Besar POM di Bandung serta penyamaan pemahaman dalam penerapan Undang-undang tentang Cipta Kerja.
- ✎ Peningkatan Kerjasama dengan lintas sektor dalam CJS (Criminal Justice System) dilakukan dengan melibatkan Kejati Jabar dalam kegiatan penindakan guna menyamakan pemahaman dalam pemberkasan tindak pidana obat dan makanan sehingga dapat membantu percepatan dalam penyelesaian berkas perkara.
- ✎ Penyesuaian kegiatan penyidikan dengan menggunakan teknologi adalah dilakukan dengan bekerjasama dengan Direktorat Cyber Badan POM guna mendukung kelancaran proses penyidikan dan pemberkasan yang dilakukan oleh PPNS Balai Besar POM di Bandung. Penggunaan teknologi tersebut juga dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan intelijen dalam rangka penelusuran kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Bandung.
- ✎ Peningkatan kompetensi sumber daya manusia petugas penindakan BBPOM di Bandung dilakukan dalam rangka mendukung maksimalnya kegiatan penyidikan dengan penggunaan teknologi antara lain Pelatihan Open Source Intelligence Technique (OSINT). Peningkatan kompetensi SDM petugas BBPOM di Bandung dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai dengan perkembangan teknologi guna memaksimalkan kinerja dalam mencapai target penindakan dalam rangka mendukung pengawasan obat dan makanan yang efektif dan efisien.

H. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Didasarkan realisasi capaian kinerja Balai Besar POM di Bandung pada tahun 2021 adalah 83,40 % yang nilainya lebih tinggi dibandingkan realisasi capaian kinerja tahun 2020 adalah 62,33 % maka peningkatan tersebut menunjukkan kinerja yang baik dalam pencapaian target dengan memaksimalkan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki oleh kelompok substansi penindakan BBPOM di Bandung. Meskipun terjadi peningkatan realisasi capaian kinerja yang tinggi yang telah dicapai oleh Kelompok Substansi Penindakan Balai Besar POM di Bandung tetapi tantangan kedepan dalam kegiatan penindakan bidang obat dan



makanan tetap akan muncul dan diperlukan strategi untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah baik. Kedepan terdapat tantangan yaitu semakin berkembangnya modus kejahatan tindak pidana bidang obat dan makanan seiring dengan perkembangan teknologi serta tantangan lainnya adalah perpindahan cara distribusi obat dan makanan dari sebelumnya offline menjadi online.

Dari tantangan tersebut diperlukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan yaitu :

1. peningkatan kemampuan sumber daya manusia secara berkelanjutan dalam mengatasi perkembangan modus kejahatan tindak pidana bidang obat dan makanan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi
2. menjaga soliditas dan sinergisme lintas sektor ICJS dalam memaksimalkan upaya penindakan tindak pidana bidang obat dan makanan

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2

SASARAN KEGIATAN KE-8

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 2 (dua) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) dan diukur pada akhir tahun anggaran. Dari perhitungan diperoleh capaian sebesar **98,53%** dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.45.

TABEL 3.45
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-8
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
1. Indeks RB BBPOM di Bandung	82,80	82,66	99,83%	Baik	
2. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	83,00	80,70	97,23%	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			98,53%	BAIK	



1. INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

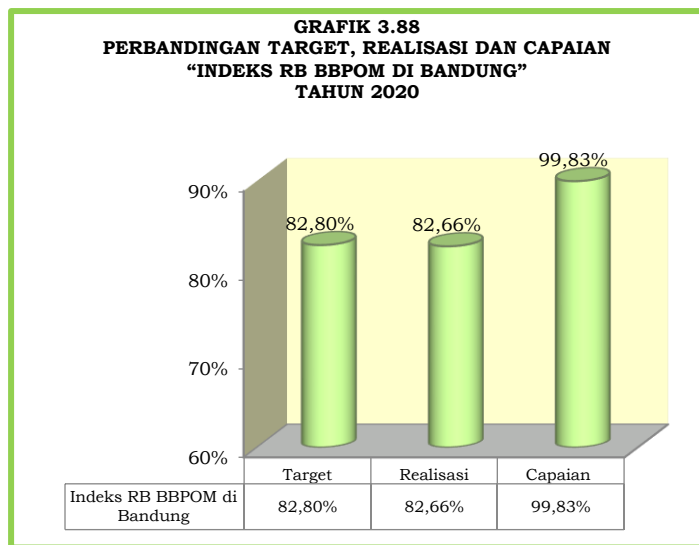
Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: (1) Manajemen Perubahan: bobot 5%; (2) Penataan Tatalaksana: bobot 5%; (3) Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 15%; (4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%; (5). Penguatan Pengawasan: bobot 15%; dan (6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%. Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: (1) Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%; (2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

TABEL 3.46
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Indeks RB BBPOM di Bandung	82,80	82,66	99,83%	Baik	



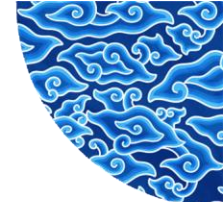
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021



Pada tahun 2021, target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2021 sebesar 82,80. Pada tahun 2021 Indeks RB BBPOM di Bandung sebesar 82,66 berdasarkan Surat Inspektur Utama Badan POM Nomor : PI.06.06.7.72.12.21.62 tanggal 23 Desember 2021 Perihal: Hasil Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan POM Tahun 2021. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar **99,83%** dengan kriteria **Baik**. Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada BBPOM di Bandung untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada BBPOM di Bandung sebesar 91,80 dengan rincian sebagai berikut :





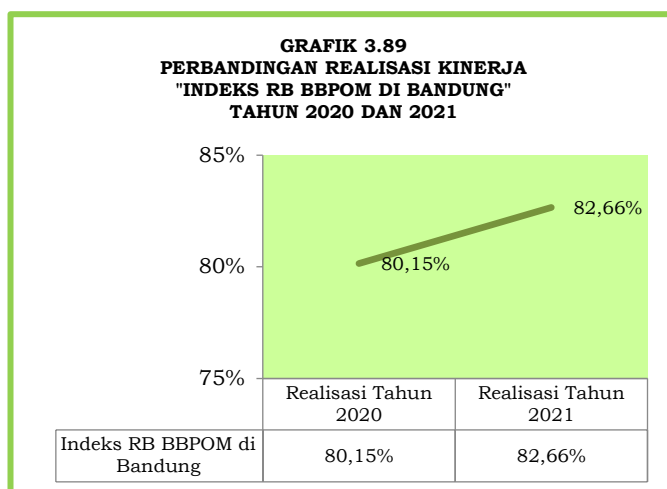
TABEL 3.47
HASIL EVALUASI PMPZI BBPOM DI BANDUNG TAHUN 2021

PENILAIAN		Nilai	%	Keterangan
A.	PROSES (60)			
I.	MANAJEMEN PERUBAHAN (8)	7,78	97,25%	MS
II.	PENATAAN TATALAKSANA (7)	7,00	100,00%	MS
III.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10)	8,25	82,46%	MS
IV.	PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)	9,48	94,81%	MS
V.	PENGUATAN PENGAWASAN (15)	13,06	87,08%	MS
VI.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	9,43	94,25%	MS
TOTAL PENGUNGKIT		54,99		MS
B.	HASIL (40)			
	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN	18,85	94,26%	MS
I.	1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	13,95	93,00%	MS
	2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)	4,90	98,02%	TMS
II.	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	17,95	89,75%	MS
	1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (15)	17,95	89,75%	MS
TOTAL HASIL		36,80		
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI		91,80		

Sehubungan adanya perbedaan hasil penilaian TPI dengan KemenPANRB untuk penetapan WBK/WBBM yang cukup tinggi maka nilai komponen pengungkit PMPZI dikonversikan dengan rata-rata penilaian BB/BPOM dan oleh KemenPANRB dibagi nilai rata-rata TPI pada tahun 2021. Dari konversi tersebut (0,834) menghasilkan Indeks RB BBPOM di Bandung sebesar 82,66 sebagai salah satu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja.



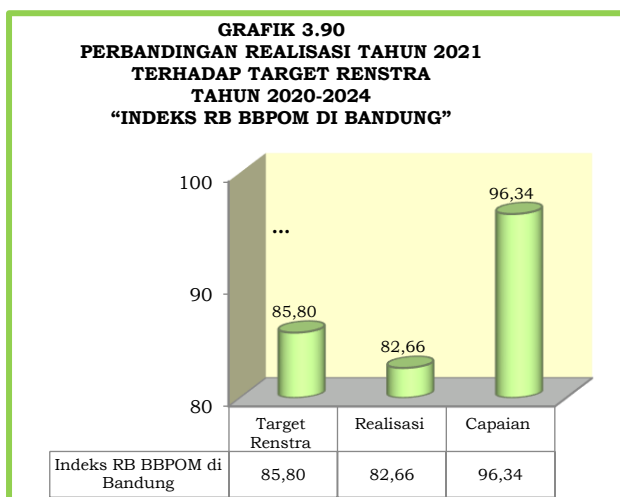
B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020



Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini pada tahun 2020 adalah sebesar 91,00, sedangkan realisasi kinerja sasaran ini pada tahun 2021 adalah sebesar 80,15% sehingga nilai pencapaiannya sebesar 88,08%. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator

sasaran ini adalah sebesar 82,80%, realisasi kinerja 82,66% sehingga nilai pencapaiannya sebesar **99,83%**. Jika kita bandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 dengan 2021 melalui data diatas, terlihat adanya peningkatan realisasi kinerja sebesar 2,51%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

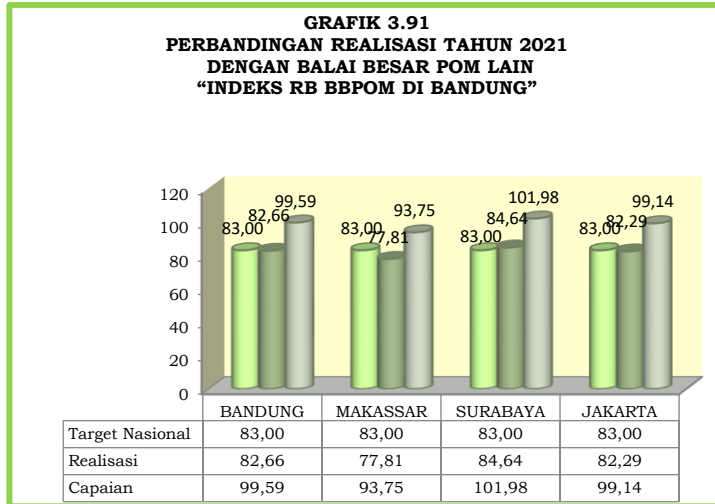


Pada tahun 2021, target indikator sasaran tersebut yang ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 85,80%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja sebesar 84,37%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.90.

E. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL

Realisasi kinerja dari Indeks RB BBPOM di Bandung secara berturut-turut dari yang tertinggi sebagai berikut: Balai Besar POM di Surabaya (84,64), Balai Besar





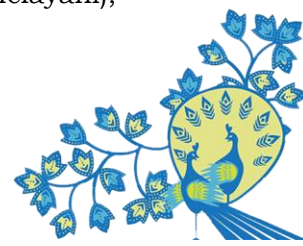
POM di Bandung (82,66), Balai Besar POM di Jakarta (82,29) dan Balai Besar POM di Makassar (77,81). Jika realisasi kinerja dibandingkan dengan target nasional (83,00) maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Surabaya (101,98%). Dari keempat

Balai Besar POM tersebut terdapat 3 Balai yang telah meraih predikat WBK yaitu Balai Besar POM di Surabaya (tahun 2017) dan Balai Besar POM di Jakarta (tahun 2020) dan Balai Besar POM di Bandung (tahun 2021).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM tahun 2021, Balai Besar POM di Bandung berhasil meraih predikat WBK. Keberhasilan pencapaian pada tahun 2021 ini disebabkan oleh:

- ☪ Pembangunan ZI dilakukan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan unit kerja. Terhadap pelaksanaann rencana kerja dilakukan monitoring dan evaluasi setiap Triwulan termasuk terhadap capaian target prioritas;
- ☪ Komitmen terhadap perubahan telah dibangun dengan baik oleh seluruh anggota organisasi. Hal ini menunjukkan kontribusi dari Agent of Change (AoC) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN bersama dengan Kepala Balai yang berperan sebagai role model perubahan dan pelaksanaan nilai organisasi;
- ☪ Kebijakan keterbukaan informasi publik telah diterapkan, hasil monitoring dan evaluasi telah dilakukan tindak lanjut;
- ☪ Telah mengembangkan berbagai inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik maupun inovasi yang mendorong efisiensi pengelolaan kinerja dan penguatan integritas, antara lain Portal Geulis (Gate for BBPOM di Bandung), SiMangga (Sistem Informasi Monitoring Anggaran), Bandung Information Center (BIC), SIDAKEP (Sistem Data Kepegawaian, Kabayan (Kepala Balai Melayani), SIADO (Sistem Administrasi Dokumen);



- ☪ Disamping mengembangkan berbagai inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, BBPOM di Bandung telah menetapkan Standar Pelayanan unit kerja dan mengimplementasikan sistem reward/punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan.
- ☪ Hasil survei Persepsi Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,59 (syarat 3,2) dan survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,72 (syarat 3,6) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2022, antara lain :

- ☪ Dari 101 rekomendasi hasil pengawasan eksternal dan internal, terdapat 99 (sembilan puluh sembilan) rekomendasi telah ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS) dengan persentase 98,02% dan masih terdapat 2 (dua) rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Belum Sesuai Saran (BSS) sehingga BBPOM di Bandung disarankan perlu memprioritaskan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal;
- ☪ Belum terdapat inovasi dalam penerapan sistem pengendalian intern unit kerja sehingga BBPOM di Bandung perlu untuk membuat inovasi dalam penerapan sistem pengendalian intern unit kerja;

Secara umum belum dilakukan analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan unit kerja sehingga BBPOM di Bandung disarankan untuk terus melakukan pengembangan inovasi baik yang sudah ada maupun inovasi baru, sesuai dengan karakteristik unit kerja dan kebutuhan stakeholder serta melaksanakan analisis dampak kemanfaatan inovasi yang telah dikembangkan terhadap perbaikan unit kerja.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- ☪ Sosialisasi dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM kepada seluruh pegawai BBPOM di Bandung tahun 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 05 Februari 2021 secara luring dan daring.





Gambar 3.18
Kegiatan Sosialisasi dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

- ☛ Forum Group Discussion Konsultasi Publik dan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor yang diselenggarakan pada tanggal 04 Maret 2021 secara luring dan daring.



Gambar 3.19
Forum Group Discussion Konsultasi Publik

- ☛ Penganjangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2021 dengan mengundang seluruh lintas sektor terkait secara luring dan daring.



Gambar 3.20
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

- ☛ Sinergitas bersama Lintas Sektor terkait dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung.



Audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat



Audiensi dengan Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat



Pengawasan Takjil Bersama Wakil Bupati Bandung



Komunikasi, Informasi, dan Edukasi bersama Tokoh Masyarakat

Gambar 3.21
Sinergitas bersama Lintas Sektor

- ☛ Gebyar KIE 1095 Film Pendek Obat dan Makanan, BBPOM di Bandung bekerjasama dengan Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Jawa Barat Tahun 2021 dan mendapatkan anugerah Rekor MURI pada tanggal 03 September 2021.



Gambar 3.22
Gebyar KIE 1095 Film Pendek Obat dan Makanan

- ☛ Inovasi Pelayanan Publik antara lain LACAK PASTI, KELOM GEULIS, KABAYAN, SIPETA, SI ITEUNG, WARTA POPA, MELODI POPA, Kerjasama TV dan Radio Desa dalam Iklan Layanan Masyarakat, KIE melalui lomba Film Pendek oleh Pramuka Penggalang dan Penegak Se Jawa Barat, Layanan



Sertifikasi secara Daring, Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam rangka Jemput Bola. Beberapa inovasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat pada subsite BBPOM di Bandung yang berisi berbagai link aplikasi dan media pelayanan publik seperti LACAK PASTI, BIC, KABAYAN, SI ITEUNG, LAPOR, Sertifikasi UMKM JUARA dll. Dan terintegrasi dengan BANDUNG SMART CITY smartcity.bandung.go.id.

- ☰ Inovasi Internal yang dapat diakses portal GEULIS seperti SIADO, SIMANGGA, SIDAKEP, BIC, SIPT, SIASN, SIPETA, KMS dll.
- ☰ Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja tersebut secara berkala (bulanan).
- ☰ Pemanfaatan berbagai media sosial yang dimiliki BBPOM di Bandung sebagai media komunikasi publik untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang program dan kegiatan, kinerja dan KIE Obat dan Makanan yang terkini dll.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi untuk meningkatkan pembangunan ZI sebelumnya adalah:

- ☰ Melaksanakan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi BBPOM di Bandung yang telah disusun secara konsisten.
- ☰ Monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Reformasi Birokrasi BBPOM di Bandung secara berkala

Upaya perbaikan yang telah dilakukan pada Tahun 2021 antara lain:

- ☰ Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan BBPOM di Bandung Tahun 2021 yang melibatkan seluruh personel organisasi.
- ☰ Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tahun 2021 dengan 12 program prioritas yang telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai.
- ☰ Pencanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2021 dengan mengundang seluruh lintas sektor terkait secara luring dan daring.
- ☰ Melaksanakan Desk Tahap I dan II Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
- ☰ Pemenuhan data dukung LKE Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
- ☰ Monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tahun 2021 secara berkala (bulanan).
- ☰ Inovasi Layanan Publik dan Internal pada setiap area perubahan.




G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

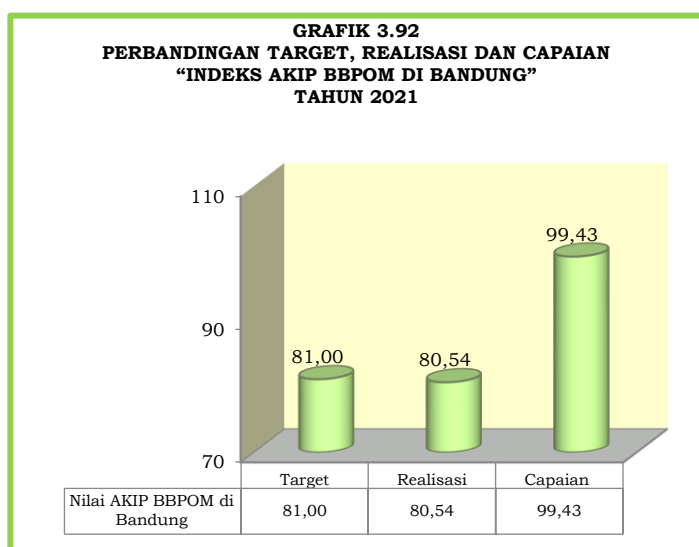
2. INDEKS AKIP BBPOM DI BANDUNG

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai AKIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Indikator Nilai AKIP tersebut dihitung melalui penilaian evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Besar POM di Bandung yang dilakukan oleh Inspektorat Badan POM RI.

TABEL 3.48
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS AKIP BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP BBPOM di Bandung	83,00	80,70	97,23%	Baik 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021



Target yang ditetapkan pada indikator ini pada tahun 2021 adalah sebesar 83,00. Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP, maka implementasi SAKIP Tahun 2021 Pada Balai Besar POM di Bandung

dapat dikategorikan A (80,70) atau Memuaskan. Dengan demikian nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **97,23%** dengan kriteria **Baik**.

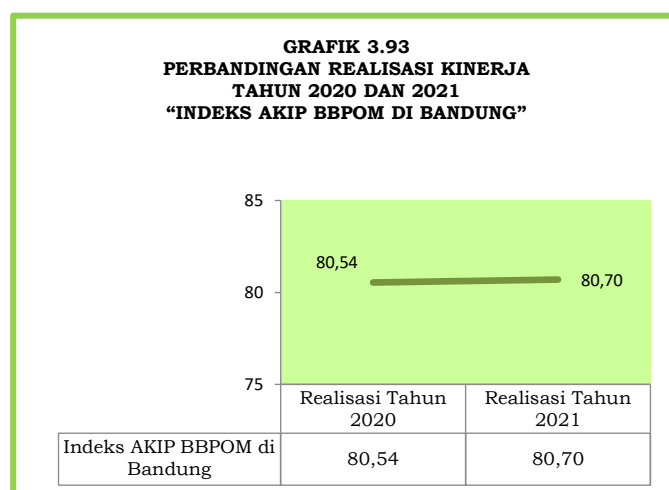


Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada BBPOM di Bandung untuk : 1) Menilai penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta pencegahan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN); 2) Menilai pelaksanaan program dan kegiatan pada Balai Besar POM di Bandung; 3) Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi; 4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya; 5) Memberikan informasi kinerja pada Balai Besar POM di Bandung; dan 6) Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas pada BBPOM di Bandung. Rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP adalah sebagai berikut :

TABEL 3.49
HASIL EVALUASI SAKIP BBPOM DI BANDUNG
TAHUN 2021

	<i>Komponen Yang Dinilai</i>	<i>Bobot (%)</i>	<i>Nilai</i>
a.	Perencanaan Kinerja	30	27,68
b.	Pengukuran Kinerja	25	20,00
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,48
d.	Evaluasi Internal	10	6,58
e.	Pencapaian Kinerja	20	12,97
	Nilai Hasil Evaluasi	100	80,70
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

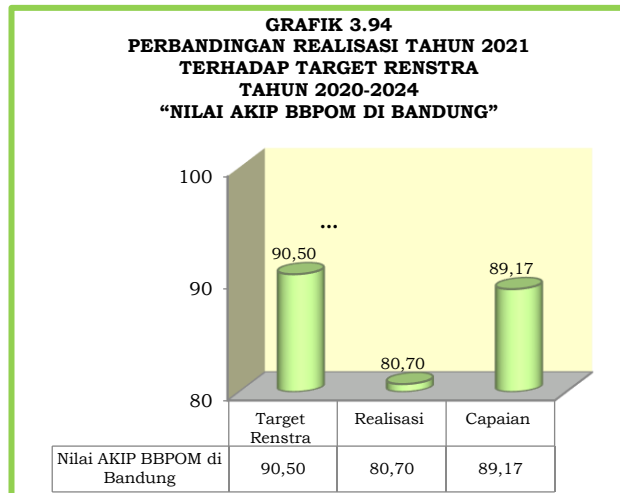
B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020



Indeks AKIP BBPOM di Bandung pada tahun 2021 adalah 80,70 sedangkan tahun 2020 adalah 80,54 maka terjadi peningkatan sebesar 0,16.

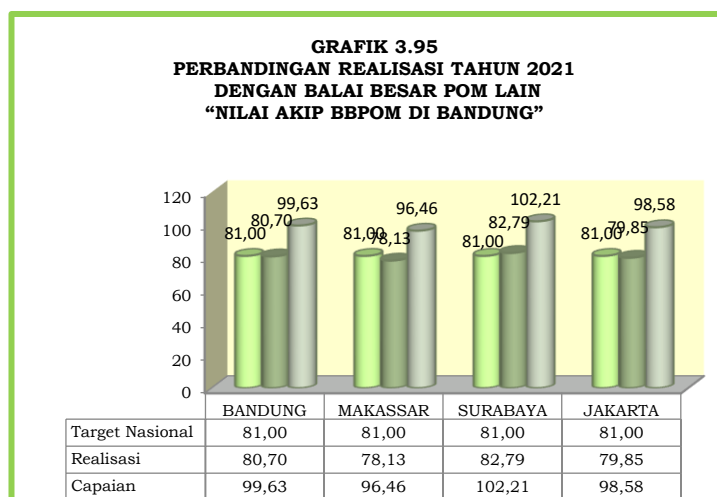


C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Target akhir periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang ditetapkan sebesar 90,50. Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja sebesar 89,17% Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.1.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja dari Nilai AKIP secara berturut-turut dari yang tertinggi sebagai berikut: Balai Besar POM di Surabaya (82,79), Balai Besar POM di Bandung (80,70), Balai Besar POM di Jakarta (79,85) dan Balai Besar POM di Makassar (78,13). Jika realisasi kinerja

dibandingkan dengan target nasional (81,00) maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Surabaya (102,21%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG AKAN DILAKUKAN PADA TAHUN 2021

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- ☘ Perencanaan yang matang dan dengan target-target serta ukuran yang jelas dan mudah dievaluasi sehingga dapat memberi dampak kepada masyarakat saat ini.
- ☘ Pelaporan kinerja dan anggaran yang dilakukan secara berkala.
- ☘ Monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang dilakukan setiap bulan.



- ☪ Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran BBPOM di Bandung dalam menerapkan SAKIP secara konsisten.

Alternatif solusi yang telah dilakukan pada tahun 2021 untuk meningkatkan nilai AKIP BBPOM di Bandung adalah sebagai berikut :

- ☪ Penetapan Keputusan Kepala BBPOM di Bandung Nomor. HK.02.02.12A.12A5.05.21.51 tentang Tim Manajemen Kinerja Organisasi BBPOM di Bandung, yang melibatkan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja.
- ☪ SOP Mikro POM.12.01/CFM.02/SOP.01/IK.12A.01 Manajemen Kinerja Organisasi yang mengatur mekanisme perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja.
- ☪ Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran secara berkala (bulanan)
- ☪ Pengukuran capaian kinerja dilakukan oleh Tim Manajemen Kinerja sesuai SOP Mikro Manajemen Kinerja Organisasi dan Manual IKU melalui MANEKIN (Dialog Kinerja Organisasi dan Dialog Kinerja Individu).
- ☪ Pelaporan Kinerja Triwulan dan Tahunan disusun sesuai pedoman dan dilaporkan secara tepat waktu.
- ☪ Pemberian *Reward* dan *Punishment* atas capaian kinerja sesuai Keputusan Kepala BBPOM di Bandung Nomor. HK.02.02.103.1031.09.20.1976A tentang *Reward* dan *Punishment* atas Capaian Kinerja.
- ☪ Seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja telah dipublikasikan di subsite dan media social BBPOM di Bandung.

H. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2021 sebagai berikut:

- ☪ Sosialisasi penggunaan Aplikasi Simangga tahun 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 01 Februari 2021 secara daring.
- ☪ Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 08 Februari 2021 secara daring dengan narasumber dari BPKP.
- ☪ Sosialisasi Keuangan tahun 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 09 Februari 2021 secara daring dengan narasumber dari KPPN Bandung II.
- ☪ *Focus Grup Discussion* Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan pada tanggal 10-11 Februari 2021 secara daring dengan narasumber dari KemenPAN dan RB.
- ☪ Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dilakukan setiap bulan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung yang dihadiri oleh Tim Manajemen Kinerja yang diselenggarakan secara luring dan



daring. Kegiatan bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran serta merumuskan rencana tindak lanjut untuk kegiatan bulan berikutnya.

- ☰ Desk Evaluasi SAKIP BBPOM di Bandung yang diselenggarakan pada tanggal 09 Juni 2021 dan 23 Juni 2021.

I. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Perlu dilakukan pembahasan terkait rekomendasi Inspektorat Utama Badan POM untuk meningkatkan efektivitas penerapan SAKIP pada BBPOM di Bandung. Rekomendasi yang disampaikan Inspektur Utama melalui surat Inspektur Utama Badan POM Nomor PI.04.7.71.12.21.97 tanggal 31 Desember 2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

☰ Perencanaan

- Melakukan reuiu Dokumen Renstra secara berkala menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM.
- Menetapkan target kinerja jangka menengah, jangka pendek dan triwulanan dengan memenuhi kriteria penetapan target yang baik berdasarkan basis data yang memadai, dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi.

☰ Pengukuran

- Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta menyampaikan masukan dan perbaikan atas pemanfaatan dan penggunaan aplikasi *e-performance* Badan POM.
- Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

☰ Pelaporan

- Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.

☰ Evaluasi Internal

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan,



rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.

- Melengkapi rencana aksi tindak lanjut yang dituangkan pada laporan evaluasi berkala dan/atau laporan kinerja interim dengan Person In Charge (PIC) maupun timeline penyelesaian tindak lanjut.

☛ Capaian Kinerja :

- Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal secara optimal.

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA



Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

SASARAN KEGIATAN KE-9

TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG BERKINERJA OPTIMAL

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) dan diukur pada akhir tahun anggaran. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.73.

TABEL 3.50
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-9
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	79	84,78	107,32%	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			107,32%	BAIK	

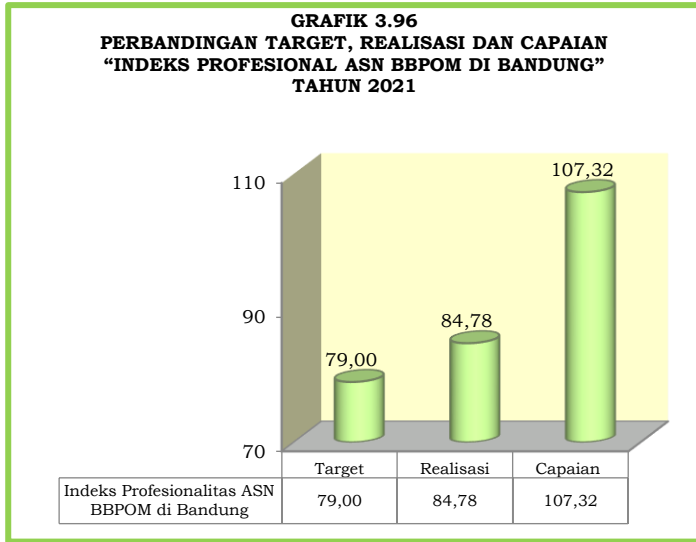
INDEKS PROFESIONAL ASN BBPOM DI BANDUNG

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: (1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai; (2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah



dilaksanakan; (3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan (4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami. Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT yang dipersiapkan oleh Biro Umum dan SDM Badan POM.

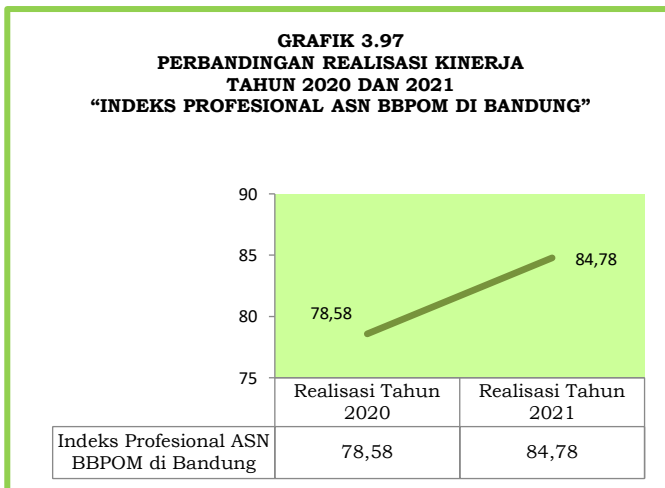
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021



Target yang ditetapkan pada indikator ini pada tahun 2021 adalah sebesar 79. Pengukuran IP-ASN tahun 2021 diukur pada akhir tahun menggunakan aplikasi <https://siasn.pom.go.id/sirensdm/ip-asn>. Berdasarkan rekapitulasi data di admin BBPOM di Bandung, untuk capaian

IP-ASN BBPOM di Bandung adalah 84,78. Apabila mengacu kepada target tahun 2021, maka nilai pencapaian sasaran adalah **107.32 %** dengan kriteria **Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020

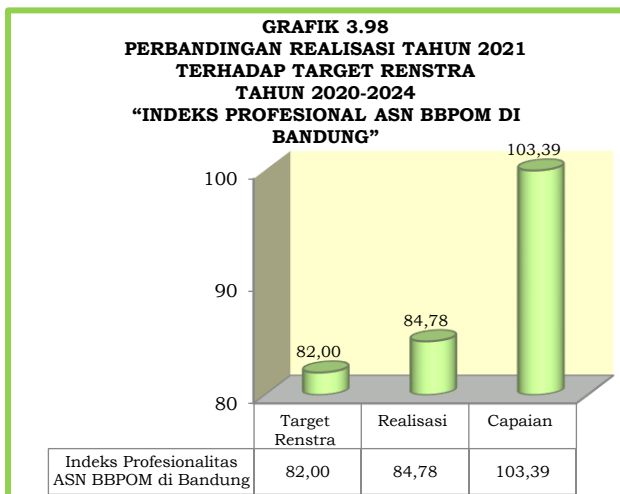


Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini pada tahun 2020 adalah sebesar 75,00, sedangkan realisasi kinerja sasaran ini pada tahun 2020 adalah sebesar 78,58% sehingga nilai pencapaiannya sebesar 104,77%. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini

adalah sebesar 79,00, realisasi kinerja 84,78% sehingga nilai pencapaiannya sebesar **107,32%**. Jika kita bandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 dengan 2021 melalui data diatas, terlihat adanya peningkatan realisasi kinerja sebesar 6,20%.

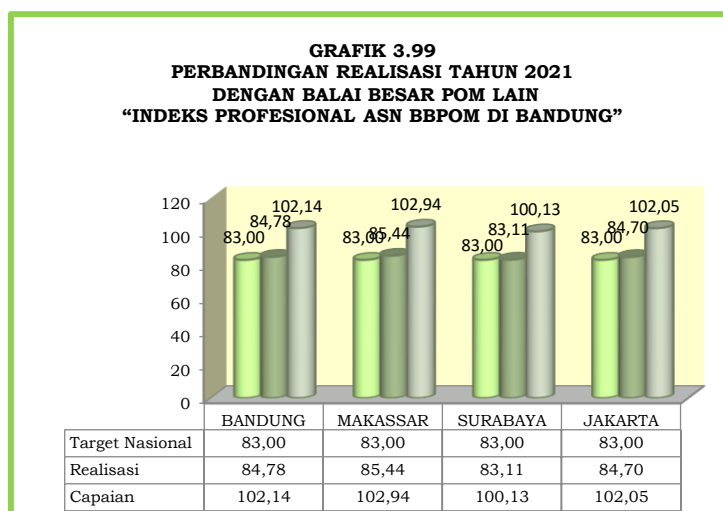


C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Target akhir periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang ditetapkan sebesar 82,00. Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja sebesar 103,39% Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.98.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja dari Indeks professional ASN secara berturut-turut dari yang tertinggi sebagai berikut: Balai Besar POM di Makassar (87,44), Balai Besar POM di Bandung (84,78), Balai Besar POM di Jakarta (84,70) dan Balai Besar POM di Surabaya (83,11). Jika

realisasi kinerja dibandingkan dengan target nasional (83,00) maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Makassar (102,94%).



E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN PADA TAHUN 2021

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh Biro SDM Badan POM mengacu kepada survei melalui google form yang diisi oleh Seluruh Pegawai Badan POM, termasuk pegawai BBPOM di Bandung. Hasil survei tersebut kemudian diverifikasi oleh Tim Kepegawaian masing-masing Unit Kerja untuk kemudian dilaksanakan desk online untuk Penetapan Hasil Akhir.

Berikut diuraikan parameter yang mempengaruhi besaran Indeks:

- ☰ Parameter Kualifikasi Pendidikan (25%), Penilaian terhadap tingkat Pendidikan Pegawai masing-masing adalah sebagai berikut: S3 (25); S2 (20); S1/D4 (15); D3 (10); D1/D2/SLTA (5); <SLTA (1). Secara umum, Pegawai BBPOM di Bandung memiliki tingkat Pendidikan yang memadai, BBPOM di Bandung memfasilitasi peserta Tugas Belajar serta Ijin Belajar untuk meningkatkan kualifikasi Pendidikan. Pada tahun 2021 terdapat sejumlah 5 Pegawai sedang menjalani Tugas Belajar.
- ☰ Parameter Kompetensi (40%), Penilaian terhadap Pengembangan Kompetensi terdiri atas Keikutsertaan Pegawai dalam Diklat Pimpinan (untuk Pejabat Struktural)/ Diklat Fungsional (untuk Pejabat Fungsional), Diklat Teknis 20 JP, dan Seminar/Workshop. Secara umum, capaian keikutsertaan Pegawai BBPOM di Bandung cukup memadai, Pemenuhan persyaratan target SKP Pengembangan Kompetensi 20 JP untuk seluruh pegawai sangat berpengaruh dalam peningkatan kompetensi. Selain itu, program Uji Kompetensi untuk Pejabat Fungsional, terutama PFM, juga berpengaruh dalam peningkatan Kompetensi Pegawai
- ☰ Parameter Kinerja (30%), Penilaian berdasarkan capaian Sasaran Kinerja Pegawai di SIASN, yaitu SKP dan Penilaian Perilaku 91 - 100 (30); 76 - 90 (25); 61 - 75 (15); 51 - 60 (5); 50 (1). Capaian Kinerja seluruh Pegawai seluruhnya baik berdasarkan Penilaian atasan langsung, sangat dipengaruhi kompetensi manajerial masing-masing atasan.
- ☰ Parameter Disiplin (5%), Penilaian berdasarkan kriteria sebagai berikut: Tidak Pernah Hukuman Disiplin (5); Pernah Hukuman Disiplin Ringan (3); Pernah Hukuman Disiplin Sedang (2); Pernah Hukuman Disiplin Berat (1). Pencegahan Pelanggaran Disiplin, melalui sosialisasi Peraturan Disiplin berperan dalam pemahaman dan pelaksanaan Disiplin Pegawai BBPOM di Bandung.

F. EVALUASI DAN ANALISIS TERKAIT TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi kinerja antar lain:



- **Kualifikasi Pendidikan:**
Usulan calon peserta tugas belajar dan ijin belajar batch 4 Tahun 2021 ke PPSDM; Monitoring dan Evaluasi Peserta Tugas Belajar secara berkala.
- **Kompetensi:**
Monitoring dan Evaluasi rencana Pengembangan Kompetensi serta capaian JP seluruh Pegawai; Pelaksanaan Uji Kompetensi Pegawai Pejabat Fungsional PFM; dan Pemetaan Kompetensi Pjabat Fungsional PFM
- **Kinerja:**
Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjutnya capaian SKP TW3 tahun 2021;
- **Disiplin:**
Pelaporan absen dan kehadiran ke Biro Umum SDM tepat waktu; Pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Sosialisasi Peraturan Disiplin, Kode Etik, dan kode perilaku secara berkala.

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA



Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

SASARAN KEGIATAN KE-10


MENGUATNYA LABORATORIUM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator, yaitu 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (diukur pada akhir tahun anggaran) dan 2) Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal. Dari perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran tersebut sebesar **84,67%** dengan kriteria **Cukup**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.51.

**TABEL 3.51
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-10
TAHUN 2021**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79,00%	76,50%	94,84%	Baik	
2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2,00	1,45	72,50%	Cukup	



INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			84,67%	CUKUP 

1. PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI SESUAI STANDAR GLP

Pada tahun 2020 telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan POM yang berlaku untuk tahun 2020-2024. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) ini merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL di Badan POM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM.

Penilaian kemampuan laboratorium dilakukan terhadap 3 (tiga) parameter yaitu pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Kompetensi dan Standar Peralatan. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) dengan menggunakan tools penilaian sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1115 tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Laboratorium Badan POM.

Metode penilaian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penilaian Standar Ruang Lingkup (SRL)

Pemenuhan terhadap SRL pengujian menggunakan bukti Catatan Pengujian/Lembar Catatan Pengujian (CP/LCP). Hasil Uji Profisiensi yang inlier. Hasil Uji Kolaborasi yang diikuti untuk pengujian terkait. Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh parameter yang mempunyai angka 1 dan dibagi dengan target kemudian dikalikan dengan 100%.

2. Penilaian Standar Kompetensi

Komponen penilaian kompetensi terdiri dari Pengetahuan dan Keterampilan. Bukti fisik untuk aspek pengetahuan adalah sertifikat pelatihan/bukti pelatihan/bukti diseminasi/surat keterangan supervisi tentang pelatihan terkait. Bukti fisik untuk keterampilan berupa CP/LCP pengujian minimal melakukan satu kali pengujian terkait parameter yang dimaksud/Laporan Pengujian hasil supervisi.

☛ Hitung nilai kompetensi masing-masing personel yang terdapat pada Formulir Informasi Kompetensi. Hasil sudah dinyatakan dalam persen (%).

☛ Hasil perhitungan kompetensi personel dari masing-masing laboratorium direkap pada Rekapitulasi Persentase Pemenuhan Kompetensi Personel.

☛ Hasil Rekapitulasi masing-masing Laboratorium kemudian digabungkan pada Profil Kompetensi Personel Penguji.




3. Penilaian Standar Peralatan

- ☰ Untuk perhitungan persentase masing-masing alat adalah jumlah alat yang dimiliki dibagi dengan standar dikalikan 100%.
- ☰ Untuk jumlah alat yang angka persentasenya lebih dari 100% maka angka yang digunakan adalah 100%.
- ☰ Pemenuhan standar peralatan dihitung dengan menjumlah persentase seluruh peralatan dibagi dengan jumlah jenis peralatan yang tercantum pada standar.

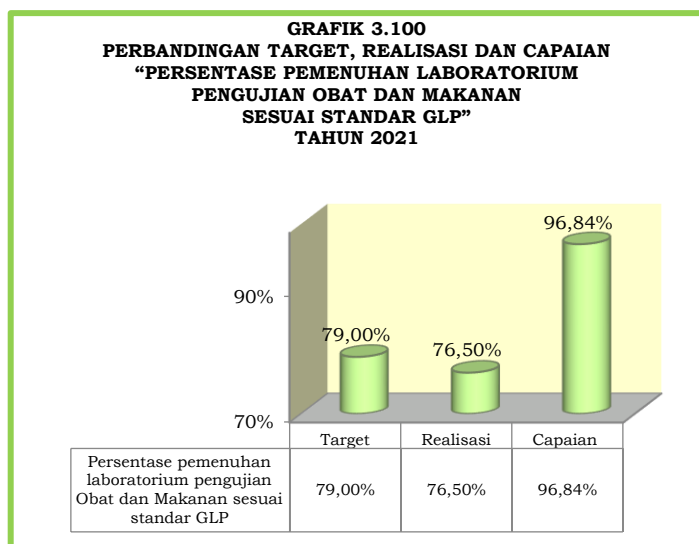
Hasil penilaian ketiga parameter tersebut di atas kemudian dirata-ratakan, dan menjadi nilai capaian indikator sasaran kegiatan ini. Hasilnya dapat dilihat pada tabel No 3.52.

TABEL 3.52
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN
SESUAI STANDAR GLP”
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79,00%	76,50%	96,84%	Baik 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Pada tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 79,00%. Berdasarkan hasil penilaian dari P3OMN, Persentase pemenuhan

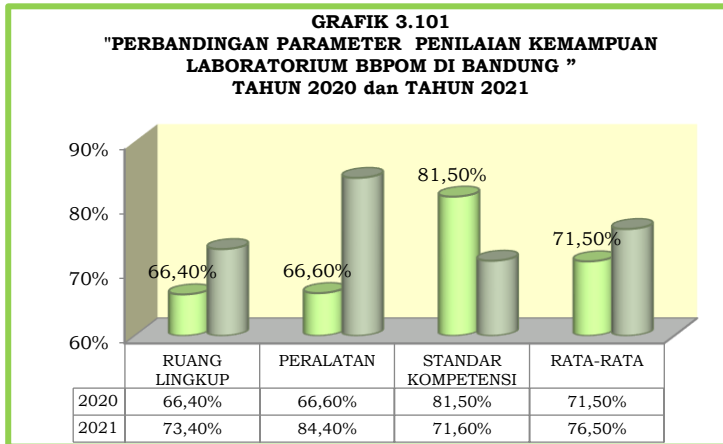


laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai Besar POM di Bandung tahun 2021 sebesar 76,50%, dengan rincian sebagai berikut: persentase pemenuhan standar ruang lingkup sebesar 73,5%; persentase pemenuhan standar kompetensi sebesar 84,4% dan persentase pemenuhan

standar peralatan sebesar 71,6%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **96,84%** dengan kriteria **Baik**.



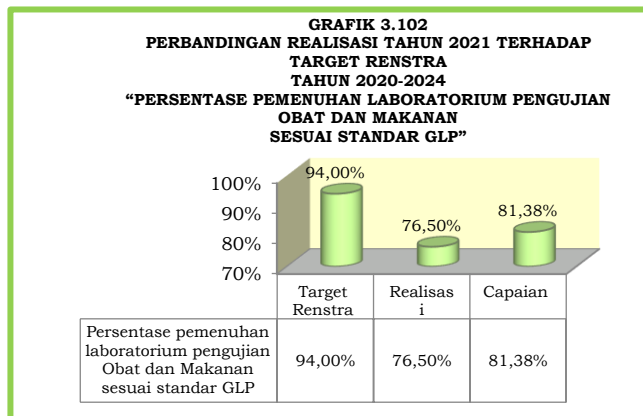
B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020



Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan pada tahun 2021 sebesar 76,50% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 71,50%. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan realisasi untuk indikator kegiatan

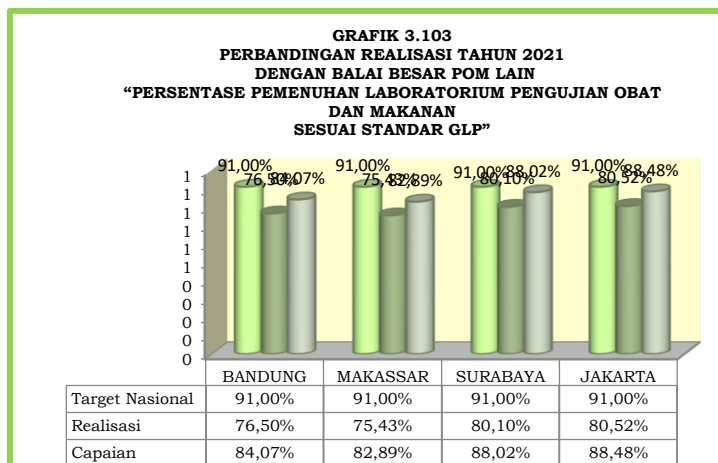
ini. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 3.2. Dengan rincian parameter penilaian kemampuan laboratorium seperti tertera dalam grafik 3.48

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebesar 94,00%, jika dibandingkan dengan target tersebut maka capaian kinerja sebesar 81,38%. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada gambar.....

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja dari Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan secara berturut-turut dari yang tertinggi sebagai berikut: Balai Besar POM di Jakarta (80,52%), Balai Besar POM di Surabaya (70,10%), Balai Besar



POM di Bandung (76,50%) dan Balai Besar POM di Makassar (75,43%). Jika realisasi kinerja dibandingkan dengan target nasional (91,00%) maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Jakarta (88,48%).

E. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Ketidakberhasilan pencapaian indikator sasaran ini disebabkan oleh :

☰ Pada tahun 2021 pemenuhan SKL yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1). Peningkatan Standar Ruang Lingkup : Penambahan kemampuan uji laboratorium kimia obat sebesar 57,40%; laboratorium kimia kosmetik sebesar 82,00%; laboratorium kimia obat tradisional dan suplemen kesehatan sebesar 79,70%; laboratorium kimia pangan 75,00%; dan laboratorium mikrobiologi 73,40%. Sehingga rata-rata nilai pemenuhan Standar Ruang Lingkup sebesar 73,50%
- 2). Peningkatan Standar Kompetensi : persentase pemenuhan standar kompetensi sebesar 84,40% dengan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan atau webinar sesuai standar kompetensi personel yang ditetapkan.
- 3). Peningkatan Standar Alat Laboratorium : Sampai dengan triwulan IV telah dilaksanakan pemenuhan penambahan beberapa alat laboratorium untuk meningkatkan alat laboratorium sesuai standar GLP. Persentase pemenuhan standar peralatan untuk pengujian kimia sebesar 69,60%, persentase pemenuhan standar peralatan untuk pengujian mikrobiologi sebesar 73,50%. Sehingga rata-rata nilai pemenuhan peralatan sebesar 71,60%

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada pada tahun 2021, antara lain :

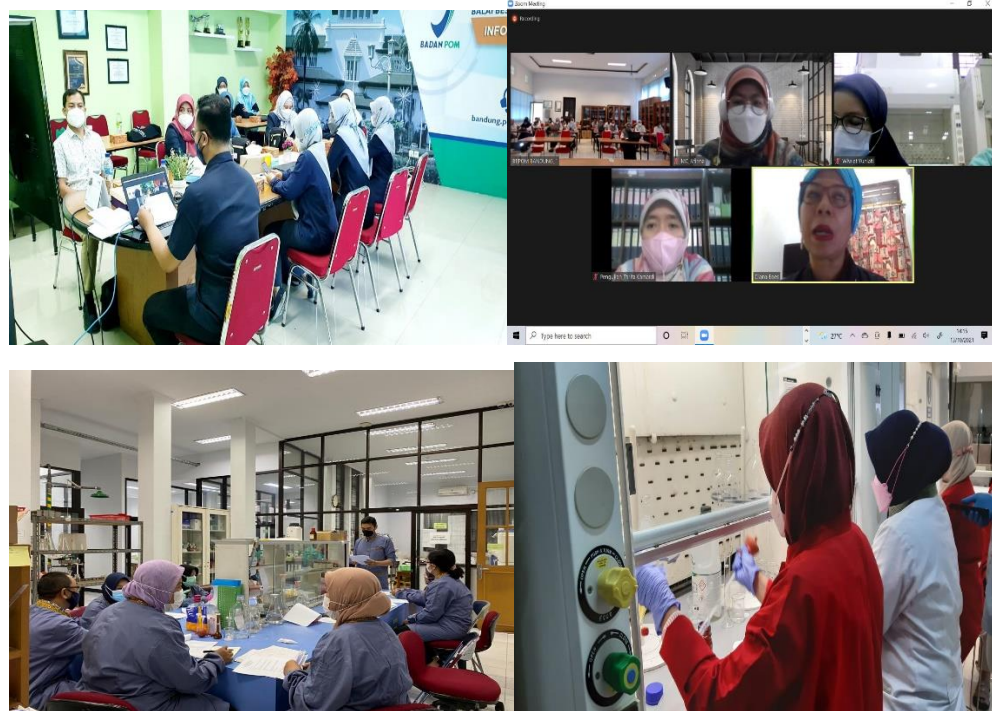
- ☰ Peningkatan standar ruang lingkup secara bertahap sesuai roadmap triwulan I, II, III dan IV tahun 2021.
- ☰ Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.
- ☰ Peningkatan Standar Alat Laboratorium secara bertahap sesuai roadmap triwulan I, II, III dan IV tahun 2021.



F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

- ✎ Penambahan kemampuan uji laboratorium kimia obat (penambahan 23 ruang lingkup); laboratorium kimia kosmetik (penambahan 16 ruang lingkup); laboratorium kimia obat tradisional dan suplemen kesehatan (penambahan 4 ruang lingkup); laboratorium kimia pangan (penambahan 3 ruang lingkup); dan laboratorium mikrobiologi (penambahan 12 ruang lingkup).
- ✎ Kegiatan pelatihan, bimbingan teknis internal dan webinar untuk meningkatkan pengetahuan personil pengujian, antara lain Awareness ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017, bimbingan teknis internal laboratorium obat yaitu Skrining dan Uji Konfirmasi sampel Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif (NAPZA) secara *Gas Chromatography-Mass Spectroscopy (GCMS)*, Bimbingan Teknis internal laboratorium kosmetik, yaitu Penetapan Kadar Selenium Sulfida Dalam Kosmetik Sediaan Sampo Secara Spektrometri Serapan Atom-Nyala (AAS); Bimbingan Teknis Internal laboratorium Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yaitu Identifikasi Antihistamin dalam Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Sediaan Padat dan Cair Secara GC-MS, bimbingan teknis internal laboratorium kimia pangan yaitu penetapan kadar cemaran logam Pb dan Cd dalam garam secara AAS, serta bimbingan teknis internal laboratorium mikrobiologi yaitu Pengujian Covid Menggunakan Real Time PCR (Polymerase Chain Reaction). Pelatihan analisis instrument laboratorium pangan, yaitu penetapan kadar cemaran logam Pb dalam yoghurt secara AAS, pelatihan analisis instrument laboratorium obat, yaitu Pengujian Rapid Test untuk Senyawa Obat dan Pengujian Narkotika dan Psikotropika Menggunakan Instrument GC-MS, serta webinar *Advances in Dissolution Testing: Bathless Dissolution Testers and Universal Media Preparation Systems*.





Gambar 3.23 Foto Kegiatan Bimbingan Teknis Internal Laboratorium

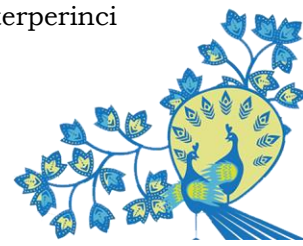
☰ Pada tahun 2021 telah dilaksanakan pemenuhan penambahan beberapa alat laboratorium untuk meningkatkan alat laboratorium sesuai standar GLP. Pada fungsi Pengujian Kimia, ada penambahan sebanyak 8 jenis alat (Microwave Digester, fume hood, water bath, shaker, luxmeter, chemical storage, wireless thermohygrometer dan lemari pendingin). Pada fungsi Pengujian Mikrobiologi ada penambahan sebanyak 3 alat (air sampler, Vitek dan peristaltic pump) serta 35 alat terkait laboratorium uji COVID-19, yaitu Real Time PCR dan alat-alat pendukung lainnya seperti micropipette, spin down, autoklaf dan Laminar Air Flow (PCR Cabinet).

G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

- ☰ Meningkatkan nilai pemenuhan peralatan dengan menambahkan pengadaan Alat Laboratorium yang dilaksanakan di tahun 2022.
- ☰ Meningkatkan pengembangan kompetensi ini sudah masuk ke dalam rencana pengembangan kompetensi di tahun 2022.

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



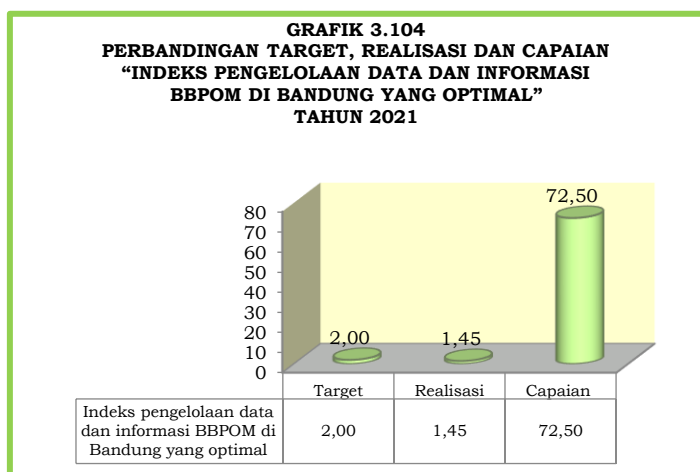
2. INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen: (1). Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: SIPT, SPIMKer Data Keracunan. (2). Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

TABEL 3.53
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL”
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2,00	1,45	72,50	Cukup	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

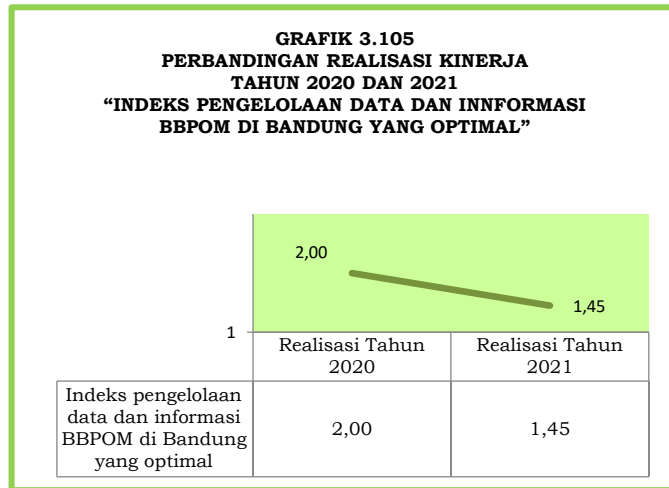


Pada tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 2,00, sedangkan realisasinya sebesar 1,45. Dengan rincian, pada komponen Nilai Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi sebesar 1,5 dan komponen Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan



di BOC sebesar 1,4. Sehingga capaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **72,50 %** dengan kriteria **Cukup**.

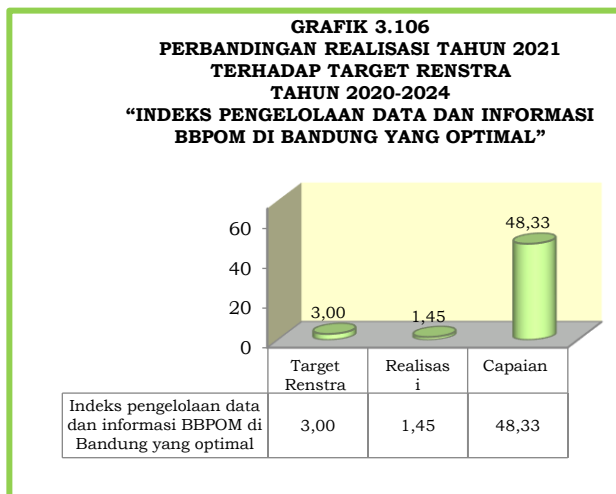
B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020



Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini pada tahun 2020 adalah sebesar 1,51, sedangkan realisasi kinerja sasaran ini pada tahun 2020 adalah sebesar 2,00 sehingga nilai pencapaiannya sebesar 132,45%. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah

sebesar 2,00, realisasi kinerja 1,45 sehingga nilai pencapaiannya sebesar **72,50%**. Jika kita bandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 dengan 2021 melalui data diatas, terlihat adanya penurunan realisasi kinerja sebesar 0,55.

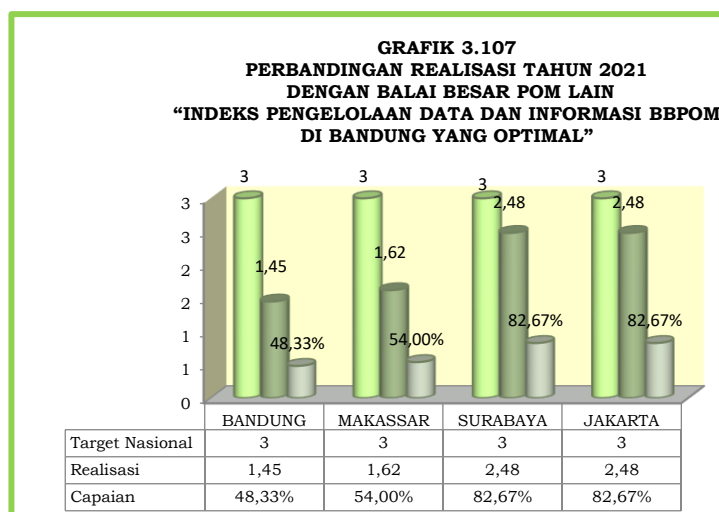
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Target akhir periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang ditetapkan sebesar 3,00. Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja sebesar 48,33% Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.106.



D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja dari Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal secara berturut-turut dari yang tertinggi sebagai berikut: Balai Besar POM di Surabaya dan Balai Besar POM di Jakarta (2,48), Balai Besar POM di Makassar (1,62) dan

Balai Besar POM di Bandung (1,45). Jika realisasi kinerja dibandingkan dengan target nasional (3,00) maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Jakarta dan Balai Besar POM di Surabaya (82,67%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN PADA TAHUN 2021

Penyebab kecenderungan penurunan kinerja pada triwulan IV tahun 2021, sebagai berikut:

- ☛ Pemanfaatan email: Masih belum optimal pemanfaatan email corporate oleh pegawai pada TW IV, yaitu rata-rata 70.39 %, seperti tampak dari tabel berikut:

	TW IV		
	Oktober	November	Desember
total_akun_individu	147	147	146
total_akun_unit	1	1	1
total_individu_aktif	97	83	91
total_individu_login	97	83	91
total_unitbalai_aktif	1	1	1
Aspek Login (%)	19.80	16.94	18.70
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	40	40	40
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	19.80	16.94	18.70
Perhitungan (%)	79.59	73.88	77.40
Perhitungan per TW	70.39		
Nilai Indeks	2		



Hal tersebut disebabkan, pegawai lebih banyak menggunakan akses email gmail untuk akses komunikasi. Selain itu, dilaporkan banyak pegawai lupa password email corporate dan kesulitan meminta reset password.

- ☰ Akses BOC dan Login BOC: Pada TW IV ada peningkatan akses dan login BOC, namun karena secara kumulatif, nilai pemanfaatan BOC masih rendah (25,67%). Hal tersebut disebabkan data yang tersaji di BOC kurang lengkap apabila dibandingkan yang ada di pemilik data masing-masing di Pusat maupun di Balai
- ☰ Akses Sharing Folder: Pada TW IV ada kecenderungan peningkatan akses sharing folder rata-rata 96.67 dengan Indeks 2 (dua), sebagian besar akses shared folder adalah untuk download label produk e-Registration Pangan Olahan. Tim TIK belum sepenuhnya memanfaatkan penyimpanan shared folder karena keterbatasan akses serta mengoptimalkan penyimpanan di server internal BBPOM di Bandung (source pusat data)
- ☰ Berita Aktual: Pada TW IV ada kecenderungan peningkatan jumlah viewer berita aktual menjadi 4.159 dari 2.026 viewer, namun jumlah berita yang diunggah cenderung tetap yaitu 10 berita. Peran penting tim media sosial untuk pemanfaatan subsite bandung.pom.go.id serta sosialisasi serta informasi di media sosial masih perlu terus ditingkatkan untuk lebih optimalnya akses subsite tersebut.

	TW III	TW IV
Jumlah Upload	11	10
Jumlah Viewer	2026	4159
Perhitungan Rata2 Berita	3.66666667	3.33333333
Perhitungan Rata2 Pengunjung	184.1818182	415.9
Indeks Per TW	2	2

- ☰ SPIMKER dan SIPT: Secara umum untuk SPIMKER dan SIPT telah dilaksanakan dengan baik pada TW IV; Untuk SPIMKER pemanfaatan cukup tinggi, yaitu 98%; namun untuk SIPT pada TW IV, pemanfaatan hanya mencapai 52.23%, seperti tampak pada tabel berikut.

Tahun	Triwulan	% Sarana	% Sampling	% Pengujian	Rata-rata	Nilai Indeks	Komposit SIPT (80%)
2021	1	71.48	0	0	71.48	2	1.6
2021	2	68.78	38.21	0	53.50	1	0.8
2021	3	40.87	80.95	54.77	58.86	1	0.8
2021	4	53.45	73.74	29.51	52.23	1	0.8

Tindak lanjut yang telah dilakukan:

- ☰ Pemanfaatan email: Sosialisasi berkala pemanfaatan email kepada seluruh pegawai melalui Nota Dinas; Integrasi Lembar Potongan Gaji yang dikirimkan



melalui email; Koneksi aplikasi internal dengan akun email corporate seluruh pegawai; serta akses wajib aplikasi mySAPK menggunakan email corporate

- ☰ Akses BOC dan Login BOC: Tertib administrasi akses dan login BOC, serta update data secara berkala sesuai oleh PIC tim TIK
- ☰ Sosialisasi Shared Folder, akses Berita Aktual oleh seluruh pegawai ditingkatkan.
- ☰ Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi berkala capaian input SIPT serta diharapkan ada peningkatan nilai Indeks setelah nilai komposit pemanfaatan SIPT TW4 telah di terbitkan.

F. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA SEBELUMNYA

- ☰ Peningkatan koordinasi dengan PUSDATIN untuk optimalisasi SIPT serta peningkatan komunikasi kepada seluruh pegawai BBPOM di Bandung untuk optimalisasi email corporate semakin ditingkatkan dengan monitoring perbulan.
- ☰ Peningkatan monitoring terhadap akses dan pemanfaatan koneksi BOC dan shared folder oleh penanggungjawab TIK dilaksanakan perbulan.

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA


Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

SASARAN KEGIATAN KE-11



TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG SECARA AKUNTABEL

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran tersebut sebesar **100,01%** dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.54.

**TABEL 3.54
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-11
TAHUN 2021**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95,10	90,78	95,46%	Baik 




INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (95,00%)	Efisien (99,33%)	104,56%	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			105,01%	BAIK	

1. NILAI KINERJA ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG

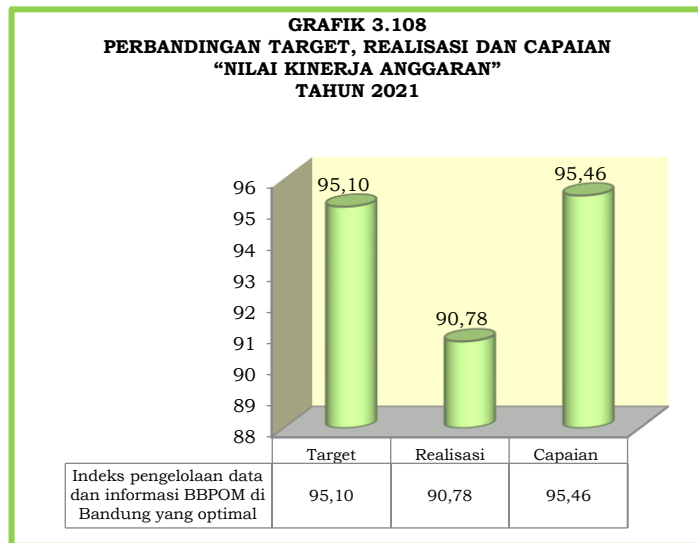
Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:(1) Revisi DIPA; (2) Deviasi Halaman III DIPA; (3) Pengelolaan UP; (4) Rekon LPJ Bendahara; (5) Data Kontrak; (6) Penyelesaian Tagihan; (7) Penyerapan Anggaran; (8) Retur SP2D; (9) Perencanaan Kas (Renkas); (10) Pengembalian/Kesalahan SPM; (11) Dispensasi Penyampaian SPM; (12) Pagu Minus; dan (13) Konfirmasi Capaian Output.

TABEL 3.55
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“NILAI KINERJA ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95,10	90,78	95,46%	Baik	



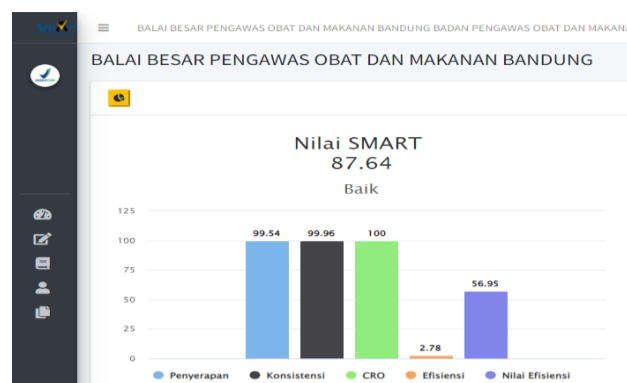
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021



Pada tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar 95,10. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung tahun 2021 sebesar 90,78, dengan rincian, nilai EKA sebesar 87,64 dan nilai IKPA sebesar 95,46. Dengan demikian capaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas

adalah sebesar **95,46%** dengan kriteria **Baik**.

GAMBAR 3.84
“NILAI EVALUASI KINERJA ANGGARAN (EKA) BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2021



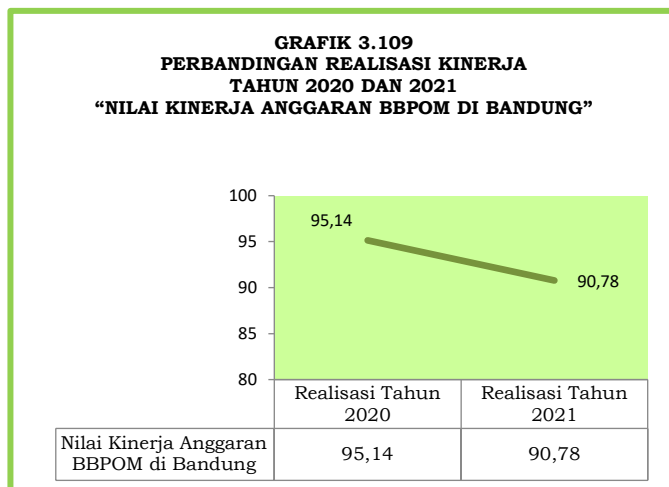
TABEL 3.56
“NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)
BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2021

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																																	
No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan			Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	Nilai EKA (SMART)											
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM	Penyerapan Anggaran				Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai EKA								
1	095	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	Nilai	87.50	80.56	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	85.55	100.00	100.00	99.66	0.00	90.00	90.72	95%	95.49	99.54	99.96	100.00	2.78	87.64							
			Bobot	5	5	5	10	8	5	5	5	15	10	17	5	0	5																
			Nilai Akhir	4.38	4.03	5.00	10.00	8.00	5.00	5.00	12.83	10.00	17.00	4.98	0.00	4.50																	
			Nilai Aspek		89.35			100.00				96.30				90.00																	

Disclaimer:
 Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output



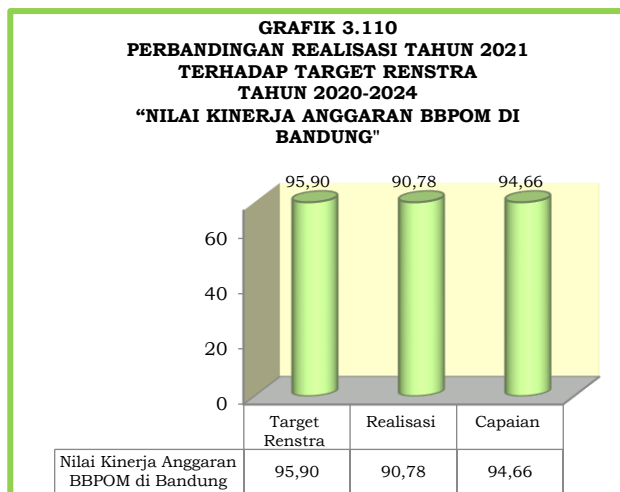
B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020



Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini pada tahun 2020 adalah sebesar 93,00, sedangkan realisasi kinerja sasaran ini pada tahun 2020 adalah sebesar 95,14 sehingga nilai pencapaiannya sebesar 102,30%. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator

sasaran ini adalah sebesar 95,10, realisasi kinerja 90,78 sehingga nilai pencapaiannya sebesar 95,46%. Jika kita bandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 dengan 2021 melalui data diatas, terlihat adanya penurunan realisasi kinerja sebesar 4,36.

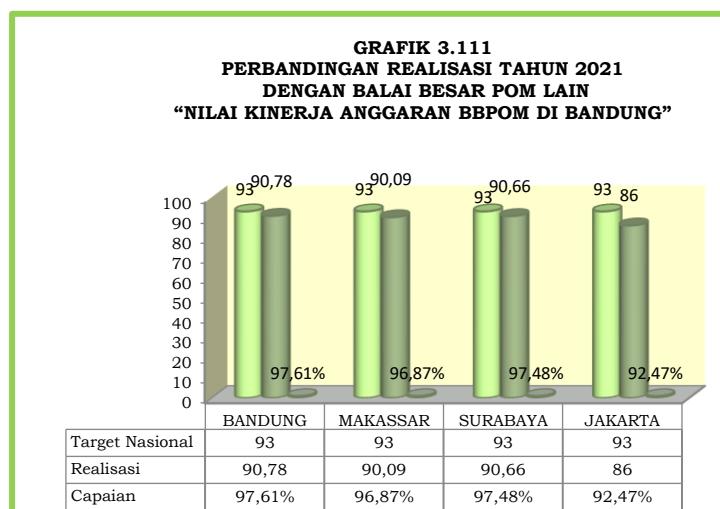
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Target akhir periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang ditetapkan sebesar 95,90. Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja sebesar 94,66% Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.110.



D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja dari nilai kinerja anggaran secara berturut-turut dari yang tertinggi sebagai berikut: Balai Besar POM di Bandung (90,78), Balai Besar POM di Surabaya (90,66), Balai Besar POM di Makassar (90,09) dan Balai Besar

POM di Jakarta (86,00). Jika realisasi kinerja dibandingkan dengan target nasional (93,00) maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Bandung (97,61%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keb keberhasilan pencapaian kinerja disebabkan antara lain oleh:

- ☰ Meningkatnya capaian rincian output, salah satu penyebabnya adalah kebijakan penerapan PPKM Darurat Jawa Bali diturunkan menjadi penerapan PPKM Level 3 untuk sebagian besar Provinsi Jawa Barat, sehingga sebagian besar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun. Sehingga realisasi dari seluruh rincian output mencapai target yang telah ditetapkan dan terdapat 3 (tiga) rincian output yang telah terealisasi melebihi 100% antara lain: KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM (128,74%); Sampel Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM (100,13%); dan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM (101,40%).
- ☰ Selain itu, pada triwulan III sebelumnya terdapat pemotongan APBN-P Tahap IV TA 2021 yang menyebabkan penurunan target rincian output secara proporsional.



TABEL 3.57
PERUBAHAN TARGET RINCIAN OUTPUT
BBPOM DI BANDUNG

NO	RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET (AWAL)	TARGET (REVISI)
1	3165.ADD.001 - Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Lembaga	1	1
2	3165.AEA.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	Kegiatan	3	1
3	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh BB/BPOM	Layanan	7	7
4	3165.BDC.001-KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	Orang	10,900	18,000
5	3165.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	Layanan	1	1
6	3165.BMB.001-Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	Layanan	26	26
7	3165.CAB.001 - Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Paket	2	1
8	3065.CAB.002 - Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	Paket	1	1
9	3165.CAB.003 - Layanan Prasarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Unit	1	1
10	3165.QCD.U02 - Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM	Perkara	16	10
11	3165.QDB.001 - Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Lembaga	42	42
12	3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	Lembaga	19	19
13	3165.QDB.003 - Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Lembaga	8	8
14	3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	Produk	1,003	753
		Produk	1,251	969
15	3165.QIA.005 - Sampel Obat, Obat Bahan Alam Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai Standar oleh BB/BPOM	Produk	2,659	1,995
		Produk	3,426	2,609
16	3165.QIA.008 - Sampel Pangan Fortifikasi yang diperiksa oleh BB/BPPOM	Produk	150	150
		Produk	150	150
17	3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	Lembaga	400	302
18	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	Lembaga	1,525	1,069
19	6384.EAA.004 - Layanan Perkantoran UPT	Layanan	1	1

- ☰ Meningkatnya serapan anggaran BBPOM di Bandung berdasarkan SAS pada triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp.50.313.686.634,- (99,65%) terhadap pagu tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 50.490.769.000,-. Selain itu, pada triwulan III terdapat pemotongan anggaran BBPOM di Bandung sebanyak 2 (dua) kali yaitu: *Refocusing* dan Realokasi Belanja K/L TA 2021 sebesar Rp. 1.875.829.000,- dan Pemotongan APBN-P Tahap IV TA 2021 sebesar Rp. 3.068.000.000,-.



Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

- ☪ Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran setiap rincian output dan sasaran kegiatan setiap bulan.
- ☪ Percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dengan melakukan perubahan metode pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya secara luring menjadi daring atau hybrid.
- ☪ Revisi anggaran mengenai penghematan Belanja Tunjangan Kinerja THR dan Gaji ke 13 TA 2021 sebesar Rp. 1.654.911.790,-, *Refocusing* dan Realokasi Belanja K/L TA 2021 sebesar Rp. 1.875.829.000,- dan Pemotongan APBN-P Tahap IV TA 2021 sebesar Rp. 3.068.000.000,-.
- ☪ Peningkatan kinerja pengelolaan APBN pada satker BBPOM di Bandung, antara lain: penyampaian laporan capaian output tepat waktu, pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu, penyampaian data kontrak dan LPJ Bendahara tepat waktu, penyelesaian tagihan tepat waktu.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja sebagai berikut:

- ☪ Kegiatan Sosialisasi penggunaan Aplikasi Simangga tahun 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 01 Februari 2021 secara daring.
- ☪ Kegiatan Sosialisasi Keuangan tahun 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 09 Februari 2021 secara daring dan diikuti oleh 75 peserta dari BBPOM di Bandung, Loka POM di Kota Tasikmalaya dan Loka POM di Kabupaten Bogor, dengan narasumber dari KPPN Bandung II. Tujuan penyelenggaraan ini adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait peraturan-peraturan pengelolaan keuangan yang terkini dan mendapatkan saran dalam peningkatan Nilai EKA dan IKPA.

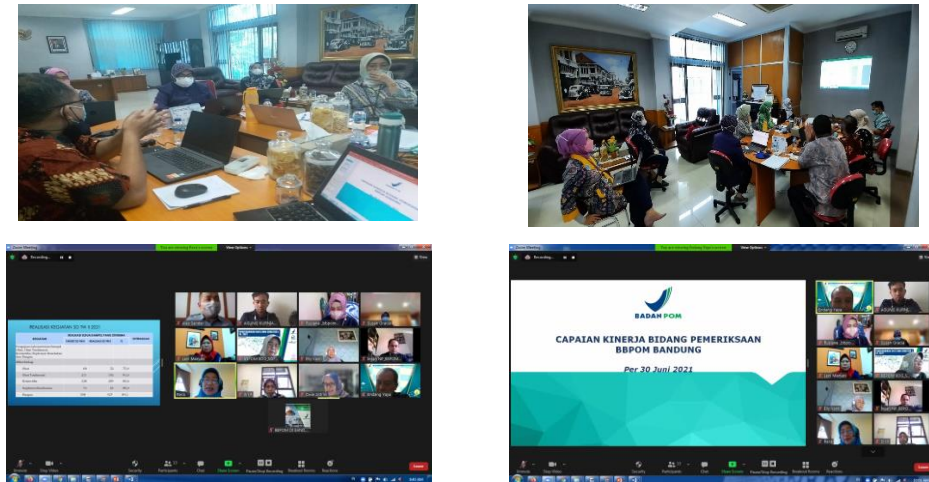


Gambar 3.24
Kegiatan Sosialisasi Keuangan tahun 2021

- ☪ Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dilakukan setiap bulan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung yang dihadiri oleh Tim Manajemen Kinerja yang diselenggarakan secara luring dan daring. Kegiatan bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian



kinerja dan anggaran serta merumuskan rencana tindak lanjut untuk kegiatan bulan berikutnya.



Gambar 3.25
Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran

G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Rekomendasi untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran BBPOM di Bandung pada periode sebelumnya adalah:

- ✦ Melakukan langkah-langkah untuk memenuhi seluruh indikator pembentuk EKA dan IKPA.
- ✦ Melakukan review terhadap *Plan of Action* yang telah disusun agar pada triwulan IV dapat mencapai target serapan anggaran sebesar 99% sesuai Surat Edaran Nomor: HK.02.02.2.21.04.21.11 tentang Target Rencana Penarikan Dana (RPD) Per Triwulan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021.
- ✦ Mempercepat proses pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk paket pekerjaan yang belum dilelang, serta melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
- ✦ Mempercepat pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat.
- ✦ Mempercepat kegiatan penanganan covid-19 (pengadaan penambah daya tahan tubuh, alat pelindung diri, disinfektan, dll) untuk seluruh pegawai.
- ✦ Melakukan realokasi anggaran untuk kegiatan yang berpotensi tidak terlaksana sampai dengan akhir tahun menjadi kegiatan lain yang berdaya ungkit (peningkatan kompetensi, pemeriksaan Kesehatan dan dukungan penyelenggaraan WFH).
- ✦ Melakukan monev berkala untuk memastikan kegiatan terlaksana sesuai dengan jadwal dan POA yang ditetapkan.
- ✦ Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan cara:
 - a. Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran.



- b. Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar.
- c. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.

Berdasarkan rekomendasi tersebut telah dilakukan tindaklanjut sebagai berikut:

- ☸ Beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk memenuhi indikator pembentuk EKA dan IKPA antara lain: penyampaian laporan capaian output tepat waktu, pertanggungjawab UP dan TUP tepat waktu, penyampaian data kontrak dan LPJ Bendahara tepat waktu, penyelesaian tagihan tepat waktu.
- ☸ Review terhadap POA dan RPD yang telah disusun pada triwulan IV agar kegiatan dan serapan anggaran dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dan melakukan realokasi/optimalisasi terhadap kegiatan dan anggaran yang tidak dapat terealisasi 100% untuk kegiatan lain.
- ☸ Koordinasi dengan pihak penyedia terkait penyelesaian pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang telah dikontrak sebelum waktu pelaksanaan kontrak berakhir dan segera melakukan pembayaran setelah pekerjaan diselesaikan.
- ☸ Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan KIE Obat dan Makanan agar dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah disepakati.
- ☸ Percepatan proses pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Penanganan Covid 19 sesuai dengan kebutuhan seluruh pegawai Balai Besar POM di Bandung dan pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung.
- ☸ Melakukan realokasi/optimalisasi terhadap anggaran kegiatan yang tidak terealisasi 100% untuk kegiatan lainnya antara lain peningkatan kompetensi SDM dan kegiatan lainnya.
- ☸ Menyelenggarakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang diselenggarakan setiap bulan untuk menetapkan tindaklanjut yang dilakukan pada bulan berikutnya.
- ☸ Upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagai: Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai POA dan RPD yang disusun serta percepatan penyampaian dokumen/pertanggungjawaban keuangan sesuai timeline yang telah ditetapkan.

Rekomendasi untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran BBPOM di Bandung pada periode selanjutnya adalah:

- ☸ Melakukan langkah-langkah untuk memenuhi seluruh indikator pembentuk EKA dan IKPA.
- ☸ Menyusun *Plan of Action* (POA) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) tahun 2022 agar dapat mencapai target capaian kinerja sesuai dengan RAPK Tahun 2022



dan target serapan anggaran sesuai Surat Edaran Nomor: HK.02.02.2.21.04.21.11 tentang Target Rencana Penarikan Dana (RPD) Per Triwulan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021.


G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

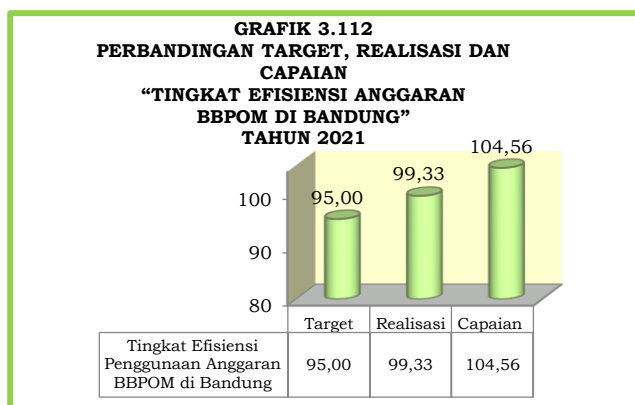
2. TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

TABEL 3.58
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (95,00%)	Efisien (99,33%)	104,56%	Baik 

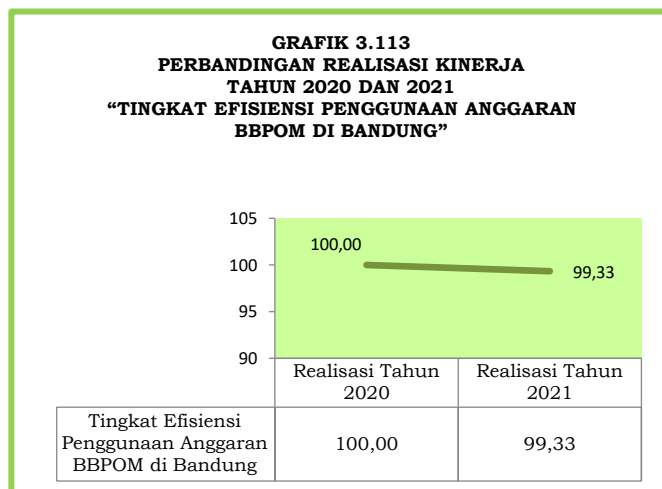
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021



Pada tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar 95,00. Tingkat Efisiensi Anggaran BBPOM di Bandung tahun 2021 sebesar 99,33. Dengan demikian capaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **104,56%** dengan kriteria **Baik**.



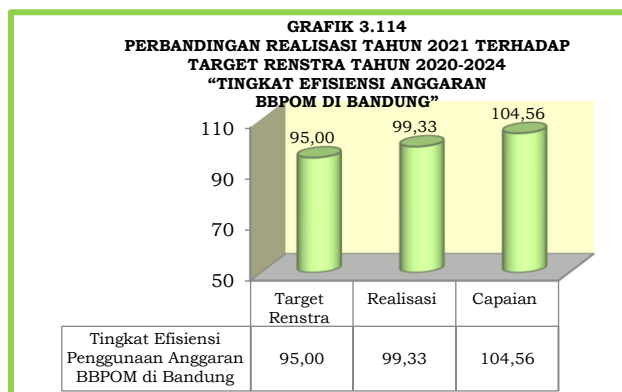
C. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020



Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini pada tahun 2020 adalah sebesar 92,00, sedangkan realisasi kinerja sasaran ini pada tahun 2020 adalah sebesar 100,00 sehingga nilai pencapaiannya sebesar 108,70%. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah

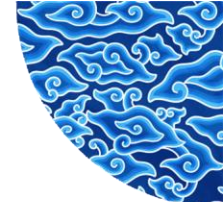
sebesar 95,00, realisasi kinerja 99,33 sehingga nilai pencapaiannya sebesar 104,56%. Jika kita bandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 dengan 2021 melalui data diatas, terlihat adanya penurunan realisasi kinerja sebesar 0,67.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

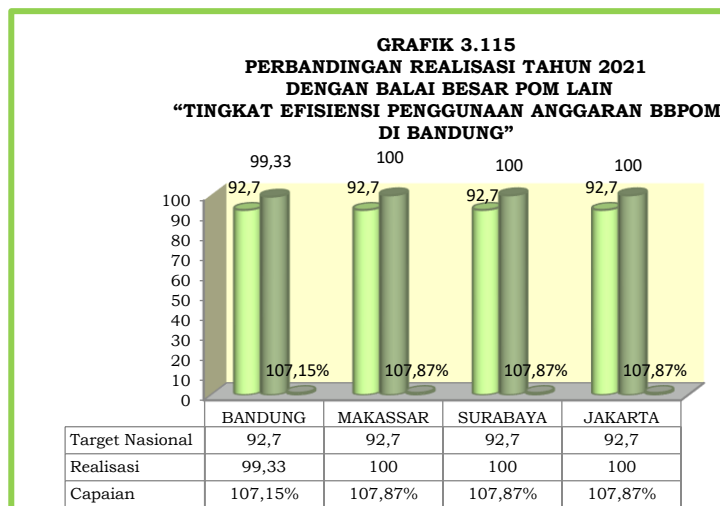


Target akhir periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang ditetapkan sebesar 95,00. Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja sebesar 104,56% Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.114.





E. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja dari tingkat efisiensi penggunaan anggaran secara berturut-turut dari yang tertinggi sebagai berikut: Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Makassar (100,00), dan Balai Besar POM di

Bandung (99,33). Jika realisasi kinerja dibandingkan dengan target nasional (92,70) maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Makassar (107,87%).

F. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2021 disebabkan antara lain oleh:

- ☰ Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran yang dilakukan setiap bulan untuk mengetahui progress pelaksanaan kegiatan, mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi serta untuk merumuskan rencana tindaklanjut pada periode selanjutnya.

Alternative solusi yang telah dilakukan, yaitu:

- ☰ Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran setiap output dan sasaran kegiatan setiap bulan.
- ☰ Realokasi dan refocusing anggaran serta optimalisasi anggaran dari sisa kontrak untuk kegiatan prioritas lain seperti penambahan daya listrik dalam rangka peningkatan kapasitas laboratorium dan instalasi penyambungan listrik gedung, KIE dengan Tokoh Masyarakat, inovasi Lomba Film Pendek KIE Obat dan Pangan Aman, serta pengadaan alat pengolah data dan peralatan fasilitas perkantoran.



**G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja sebagai berikut:

- ☰ Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan setiap bulan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung yang dihadiri oleh Tim Manajemen Kinerja Organisasi yang diselenggarakan secara luring dan daring. Kegiatan bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan merumuskan rencana tindak lanjut untuk kegiatan bulan berikutnya serta monitoring terhadap progress realisasi anggaran dan mengukur tingkat efisiensi kegiatan dan sasaran kegiatan.

**H. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN
(REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)**

Rekomendasi untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran BBPOM di Bandung adalah:

- ☰ Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran setiap rincian output dan sasaran kegiatan secara berkala.
- ☰ Percepatan pelaksanaan kegiatan khususnya pengadaan Barang dan Jasa percepatan pertanggungjawab keuangan.
- ☰ Optimalisasi anggaran dari sisa dana kegiatan atau kontrak karena target telah tercapai untuk kegiatan lain.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



3.2

REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2021, anggaran Balai Besar POM di Bandung sebesar Rp.57.089.510.000,-. Namun, pada Bulan Mei 2021 dilakukan revisi penghematan tunjangan kinerja THR dan Gaji ke 13 BBPOM di Bandung sebesar Rp. 1.654.911.790,-. Sehingga anggaran BBPOM di Bandung menjadi Rp. 55.434.598.000,-. Dan pada Bulan Juli 2021 dilakukan *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, pada pemotongan APBN-P Tahap III TA 2021 untuk BBPOM di Bandung dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 1.875.829.000,- dan pemotongan APBN-P Tahap IV TA 2021 untuk BBPOM di Bandung dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 3.068.000.000,-. Sehingga anggaran BBPOM di Bandung berkurang menjadi Rp. 50.490.769.000,-, dengan rincian: (1) Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.322.445.000,-; dan (2) Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.168.324.000,-. Pada triwulan IV tahun 2021, realisasi berdasarkan Omspan sebesar Rp. 50.258.696.474,- (99,54%), namun berdasarkan SAS sebesar Rp. 50.315.182.634,- (99,65%), dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 3.59
REALISASI ANGGARAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG
BERDASARKAN OMSPAN TAHUN 2021



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	432753 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	PAGU	21,103,254,000	21,243,030,000	8,144,485,000	0	0	0	0	0	0	50,490,769,000
		REALISASI	21,007,761,018 (99.55%)	21,109,549,671 (99.37%)	8,141,385,785 (99.96%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50,258,696,474 (99.54%)
		SISA	95,492,982	133,480,329	3,099,215	0	0	0	0	0	0	232,072,526
GRAND TOTAL		PAGU	21,103,254,000	21,243,030,000	8,144,485,000	0	0	0	0	0	0	50,490,769,000
		REALISASI	21,007,761,018 (99.55%)	21,109,549,671 (99.37%)	8,141,385,785 (99.96%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	50,258,696,474 (99.54%)
		SISA	95,492,982	133,480,329	3,099,215	0	0	0	0	0	0	232,072,526



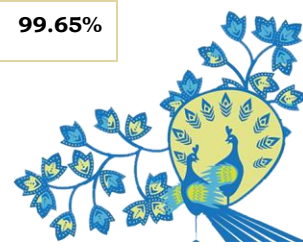
TABEL 3.60
REALISASI ANGGARAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG
BERDASARKAN SAS TAHUN 2021

PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Program Pengawasan Obat dan Makanan	24.322.445.000,-	24.208.756.554,-	99.53
Program Dukungan Manajemen	26.168.324.000,-	26.106.426.080,-	99.76
TOTAL	50.490.769.000,-	50.315.182.634,-	99.65

Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan sasaran kegiatan dan alokasi anggaran dan realisasinya berdasarkan indikator sasaran kegiatan:

TABEL 3.61
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TAHUN 2021

NO.	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	787,170,000	785,475,577	99.78%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	300,829,000	296,325,760	98.50%
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	273,207,000	273,206,800	100.00%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	2,080,540,000	2,075,524,677	99.76%
5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6,663,275,000	6,597,856,693	99.02%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1,323,723,000	1,320,600,155	99.76%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	999,603,000	997,418,917	99.78%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	763,858,000	762,097,700	99.77%
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	22,492,534,000	22,434,630,532	99.74%
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	10,845,709,000	10,821,233,568	99.77%
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	3,960,321,000	3,950,812,255	99.76%
	TOTAL	50,490,769,000	50,315,182,634	99.65%



Penyerapan anggaran per sasaran kegiatan pada tahun 2021 dari yang terbesar secara berurutan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan Ketiga yaitu: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 273,207,000,- dan realisasi sebesar Rp. 273,206,800,-, dengan capaian 100.00%.
2. Sasaran Kegiatan Kesatu yaitu: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 787,170,000,- dan realisasi sebesar Rp. 785,475,577,-, dengan capaian 99.78%.
3. Sasaran Kegiatan Ketujuh yaitu: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 999,603,000,- dan realisasi sebesar Rp. 997,418,917,- dengan capaian 99.78%.
4. Sasaran Kegiatan Kedelapan yaitu: Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal dengan pagu sebesar Rp. 763,858,000,- dan realisasi sebesar Rp. 762,097,700,- dengan capaian 99.77%.
5. Sasaran Kegiatan Kesepuluh yaitu: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan pagu sebesar Rp. 10,845,709,000,- dan realisasi sebesar Rp. 10,821,233,568,- dengan capaian 99.77%.
6. Sasaran Kegiatan Keempat yaitu: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 2,080,540,000,- dan realisasi sebesar Rp. 2,075,524,677,- dengan capaian 99.76%.
7. Sasaran Kegiatan Keenam yaitu: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 1,323,723,000,- dan realisasi sebesar Rp. 1,320,600,155,- dengan capaian 99.76%.
8. Sasaran Kegiatan Kesebelas yaitu: Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel dengan pagu sebesar Rp. 3,960,321,000,- dan realisasi sebesar Rp. 3,950,812,255,- dengan capaian 99.76%.
9. Sasaran Kegiatan Kesembilan yaitu: Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal dengan pagu sebesar Rp. 22,492,534,000,- dan realisasi sebesar Rp. 22,434,630,532,-, dengan capaian 99.74%.
10. Sasaran Kegiatan Kelima yaitu: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 6,663,275,000,- dan realisasi sebesar Rp. 6,597,856,693,- dengan capaian 99.02%.



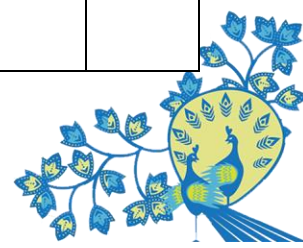
11. Sasaran Kegiatan Kedua yaitu: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 300,829,000,- dan realisasi sebesar Rp. 296,325,760,- dengan capaian 98.50%.

Sedangkan jika dilihat penyerapan anggaran berdasarkan *perspective balance score card* maka secara berturut-turut dari yang tertinggi adalah sebagai berikut:

- 1) *Learning and Growth Perspective* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38,062,422,000,- dan realisasi sebesar Rp. 37,968,774,055,- dengan capaian 99.75%.
- 2) *Stakeholders Perspective* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1,361,206,000,- dan realisasi sebesar Rp. 1,355,008,137,- dengan capaian 99.54%.
- 3) *Internal Process Perspective* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11,067,141,000,- dan realisasi sebesar Rp. 10,991,400,442,- dengan capaian 99.32%.

TABEL 3.62
REALISASI ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN BERDASARKAN
PERSPECTIVE BALANCE SCORE CARD BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2021

Perspective	Sasaran Kegiatan		Sasaran Kegiatan			Perspective		
			Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	787,170,000	785,475,577	99.78%	1,361,206,000	1,355,008,137	99.54%
	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	300,829,000	296,325,760	98.50%			
	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	273,207,000	273,206,800	100.00%			
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	2,080,540,000	2,075,524,677	99.76%	11,067,141,000	10,991,400,442	99.32%
	5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja	6,663,275,000	6,597,856,693	99.02%			



Perspective	Sasaran Kegiatan		Sasaran Kegiatan			Perspective		
			Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
		BBPOM di Bandung						
	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1,323,723,000	1,320,600,155	99.76%			
	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	999,603,000	997,418,917	99.78%			
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	763,858,000	762,097,700	99.77%	38,062,422,000	37,968,774,055	99.75%
	9	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	22,492,534,000	22,434,630,532	99.74%			
	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	10,845,709,000	10,821,233,568	99.77%			
	11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	3,960,321,000	3,950,812,255	99.76%			
NILAI PENCAPAIAN ANGGARAN			50,490,769,000	50,315,182,634	99.65%	50,490,769,000	50,315,182,634	99.65%

Pada triwulan IV, RPD yang tercantum dalam Halaman III DIPA BBPOM di Bandung sebesar Rp. 50.490.769.000,-, maka deviasi sebesar 0,35 (SAS) dan 0,46 (Omspan) dengan kategori Baik (Hijau). Secara rinci dijelaskan tabel berikut :

TABEL 3.63
HASIL PERHITUNGAN DEVIASI RPD
TAHUN 2021

BULAN	% RPD Halaman III DIPA	% Realisasi (SAS)	Deviasi	Kategori	% Realisasi (OMSPAN)	Deviasi	Kategori
JANUARI	1.29	1.29	0.00	HATI-HATI	1.29	0.00	HATI-HATI
FEBRUARI	5.09	5.10	-0.23	BAIK	5.10	-0.23	BAIK
MARET	10.33	11.91	-15.34	BAIK	10.38	-0.50	BAIK
APRIL	15.32	18.33	-19.62	BAIK	15.45	-0.85	BAIK
MEI	22.53	24.29	-7.78	BAIK	22.74	-0.91	BAIK
JUNI	28.94	30.80	-6.44	BAIK	29.20	-0.90	BAIK



JULI	35.29	37.29	-5.65	BAIK	35.63	-0.97	BAIK
AGUSTUS	54.29	56.34	-3.77	BAIK	54.58	-0.54	BAIK
SEPTEMBER	61.93	63.70	-2.87	BAIK	61.95	-0.04	BAIK
OKTOBER	73.29	70.43	3.90	BAIK	68.67	6.31	HATI-HATI
NOVEMBER	84.45	89.11	-5.52	BAIK	78.80	6.69	HATI-HATI
DESEMBER	100.00	99.65	0.35	BAIK	99.54	0.46	BAIK

Berdasarkan Surat Edaran Nomor : HK.02.02.2.21.04.21.11 tentang Target Rencana Penarikan Dana (RPD) Per Triwulan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2021 bahwa target RPD per triwulan, mengacu pada target penyerapan anggaran per triwulan:

- Triwulan I, sebesar minimal 15 persen;
- Triwulan II, sebesar minimal 40 persen;
- Triwulan III, sebesar minimal 60 persen; dan
- Triwulan IV, sebesar minimal 99 persen.

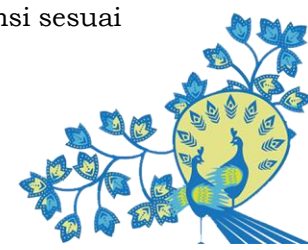
TABEL 3.64
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2021

Target Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran (SAS)	Capaian	Kategori	Realisasi Anggaran (OMSPAN)	Capaian	Kategori
99,00%	99,65%	100,66%	BAIK	99,54%	100,55%	BAIK

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ CAPAIAN INPUT}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:



$$SE = \frac{\% \text{ RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ RENCANA CAPAIAN INPUT}}$$

$$SE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

$$SE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Apabila $IE \geq SE$: kegiatan efisien

Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana).

Hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan pada triwulan IV tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



TABEL 3.65
PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI
BERDASARKAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TAHUN 2021

Indikator Sasaran Kegiatan	Volume	Anggaran	IE	TE	KATEGORI	
	Capaian (%)	Capaian (%)				
a	b	c	d=b/c	e = d-1	f	
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98.85	99.77	0.99	-0.01	100%
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	108.83	99.93	1.09	0.09	100 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97.83	99.77	0.98	-0.02	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	105.94	99.93	1.06	0.06	100 %
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87.62	99.30	0.88	-0.12	75 %
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	110.32	98.50	1.12	0.12	100 %
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94.84	100.00	0.95	-0.05	75 %
8	Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan	88.81	100.00	0.89	-0.11	75 %
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	104.21	100.00	1.04	0.04	100 %
10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95.94	100.00	0.96	-0.04	75 %
11	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	87.72	100.00	0.88	-0.12	75 %
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	115.48	99.25	1.16	0.16	100 %
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	89.71	100.00	0.90	-0.10	75 %
14	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	116.44	100.00	1.16	0.16	100 %
15	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	102.99	100.00	1.03	0.03	100 %
16	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	99.29	99.08	1.00	0.00	100 %
17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100.00	96.79	1.03	0.03	86%
18	Jumlah desa pangan aman	100.00	99.46	1.01	0.01	100 %
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00	99.68	1.00	0.00	100 %
20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	87.03	99.80	0.87	-0.13	75 %
21	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91.82	99.68	0.92	-0.08	75 %
22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	128.32	99.78	1.29	0.29	95 %
23	Indeks RB BBPOM di Bandung	99.83	99.76	1.00	0.00	100 %
24	Nilai AKIP BBPOM di Bandung	97.23	99.99	0.97	-0.03	75 %
25	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	107.32	99.74	1.08	0.08	100 %
26	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	96.84	99.77	0.97	-0.03	75 %
27	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	72.50	99.96	0.73	-0.27	75 %
28	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95.46	96.24	0.99	-0.01	75 %
29	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	103.80	99.83	1.04	0.04	100 %
Tingkat Efisiensi		99,33	99.65			



Pada tahun 2021, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) indikator secara kumulatif masuk kedalam kategori **Efektif (99,33%)**.

Sedangkan hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Kegiatan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.66
PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI
BERDASARKAN KEGIATAN/OUTPUT
TAHUN 2021

No	Rincian Output	Capaian Volume (%)	Capaian Anggaran (%)	IE	TE	Capaian TE
1	3165.ADD.001 - Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	100.00	99.02	1.01	0.01	EFISIEN
2	3165.AEA.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	100.00	99.65	1.00	0.00	EFISIEN
3	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh BB/BPOM	100.00	99.73	1.00	0.00	EFISIEN
4	3165.BDC.001-KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	128.74	99.05	1.30	0.30	EFISIEN
5	3165.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	100.00	99.55	1.00	0.00	EFISIEN
6	3165.BMB.001-Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	100.00	100.00	1.00	0.00	EFISIEN
7	3165.CAB.001 - Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	100.00	99.99	1.00	0.00	EFISIEN
8	3065.CAB.002 - Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	100.00	99.46	1.01	0.01	EFISIEN
9	3165.CAB.003 - Layanan Prasarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	100.00	99.94	1.00	0.00	EFISIEN
10	3165.QCD.U02 - Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPPOM	100.00	99.79	1.00	0.00	EFISIEN
11	3165.QDB.001 - Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100.00	96.79	1.03	0.03	EFISIEN
12	3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	100.00	99.46	1.01	0.01	EFISIEN
13	3165.QDB.003 - Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	100.00	99.68	1.00	0.00	EFISIEN
14	3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	100.13	99.83	1.00	0.00	EFISIEN
15	3165.QIA.005 - Sampel Obat, Obat Bahan Alam Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai Standar oleh BB/BPOM	100.00	99.79	1.00	0.00	EFISIEN
16	3165.QIA.008 - Sampel Pangan Fortifikasi yang diperiksa oleh BB/BPPOM	100.00	95.91	1.04	0.04	EFISIEN
17	3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	102.32	100.00	1.02	0.02	EFISIEN
18	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	101.40	100.00	1.01	0.01	EFISIEN
19	6384.EAA.004 - Layanan Perkantoran UPT	100.00	99.76	1.00	0.00	EFISIEN
	TOTAL	101.72	99.65	1.02	0.02	EFISIEN

Pada tahun 2021, BBPOM di Bandung melaksanakan 19 (sembilan belas) Rincian Output (RO) dengan nilai TE masuk kategori Efisien. Dari data perhitungan tingkat efisiensi, nilai TE tertinggi adalah KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM (TE=0,30).



Berdasarkan perhitungan Nilai TE, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan BBPOM di Bandung pada triwulan IV terlaksana secara efisien ($TE=0.02$).

Namun, tingkat efisiensi adalah bersifat relative, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.





BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

4.2 SARAN

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 mengukur pencapaian kinerja tahun 2021 berdasarkan target pada Revisi Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 08 November 2021 berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024. Pada tahun 2021 merupakan tahun kedua Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024. Berikut hasil pencapaian sasaran kegiatan pada tahun 2021, yaitu:

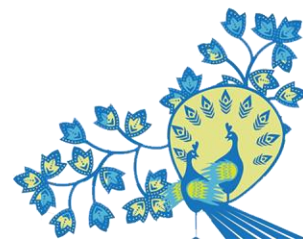
1. Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2021 sebanyak 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Dari sasaran kegiatan tersebut diukur berdasarkan 29 (dua puluh sembilan) indikator sasaran kegiatan, dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) indikator sasaran kegiatan dengan kriteria **Sangat Baik**, 7 (tujuh) indikator sasaran kegiatan dengan kriteria **Baik**, 2 (dua) indikator sasaran kegiatan dengan kriteria **Cukup** dan 1 (satu) indikator sasaran kegiatan dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.
2. Hasil capaian kinerja sasaran kegiatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan pertama sebesar 99,81% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan kedua sebesar 110,32% dengan kriteria Sangat Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan ketiga sebesar 95,95% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan keempat sebesar 101,38% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik.
- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan kelima sebesar 99,82% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan.



- ☰ Capaian kinerja sasaran strategis keenam sebesar 89,42% dengan kriteria Cukup, ini menunjukkan kegagalan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan.
- ☰ Capaian kinerja sasaran kegiatan ketujuh sebesar 128,32% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan.

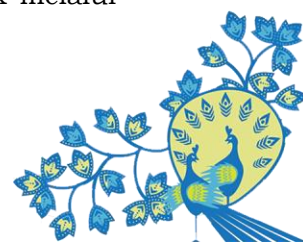
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

- ☰ Capaian kinerja sasaran kegiatan kedelapan sebesar 98,53% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan UPT yang optimal.
 - ☰ Capaian kinerja sasaran kegiatan kesembilan sebesar 107,32% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam mewujudkan SDM UPT yang berkinerja optimal.
 - ☰ Capaian kinerja sasaran kegiatan kesepuluh sebesar 74,67% dengan kriteria Cukup, ini menunjukkan kegagalan Balai Besar POM di Bandung menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.
 - ☰ Capaian kinerja sasaran kegiatan kesebelas sebesar 100,01% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung mengelola keuangan secara akuntabel.
3. Pada tahun 2021, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) didapatkan hasil sebesar Efisiensi (99,33%).
 4. Pada tahun 2021, BBPOM di Bandung melaksanakan 19 (sembilan belas) Rincian Output (RO) dengan nilai TE masuk kategori Efisien. Dari data perhitungan tingkat efisiensi, nilai TE tertinggi adalah KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM (TE=0,30). Berdasarkan perhitungan Nilai TE, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan BBPOM di Bandung pada tahun 2021 terlaksana secara efisien (TE=0.02).

4.2 SARAN

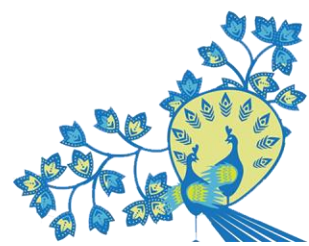
Untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan dalam kondisi new normal serta sumber daya yang terbatas maka perlu langkah-langkah strategi yang tepat serta inovasi. Capaian sasaran kegiatan pada tahun 2021 merupakan dasar untuk menetapkan strategi dan inovasi pada periode selanjutnya. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandung, antara lain :

1. Koordinasi dengan lintas sektor sehingga inpres No. 3 tahun 2018 tentang peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan dengan baik melalui



pemantapan jaringan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Provinsi Jawa Barat.

2. Menjalinkan kerjasama dengan *stake holder* terkait, sehingga instansi yang berkomitmen dalam pengawasan Obat dan Makanan lebih banyak lagi. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dengan melakukan berbagai inovasi yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pelayanan prima.
4. Melakukan penyesuaian dalam metode pengawasan pre market, post market dan penyidikan yaitu dengan menggunakan teknologi dan melakukan inovasi berbasis teknologi.
5. Melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan terus menerus serta berkesinambungan.





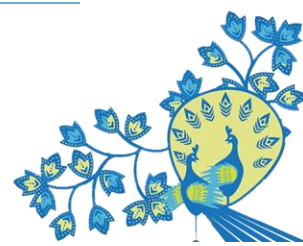
LAMPIRAN

1. REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020-2024
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2021 (REVISI)
3. PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2021 (REVISI)
4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2021 (REVISI)
5. PENGUKURAN KINERJA SASARAN KEGIATAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2021
6. TINGKAT EFISIENSI SASARAN KEGIATAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2021

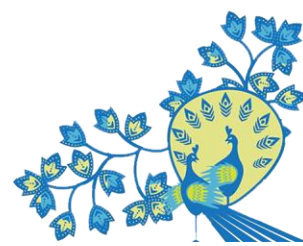
LAMPIRAN 1

REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020-2024

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Target Kinerja (Menjadi)			
	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE									
SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3	97	97.5	98	98.5
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	80	82	84	86
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94	95	95.5	96	94
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78	70	72	74	76
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat						70	72	74	76
SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	75	78	81	83	71	74	77	80
SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	85	86	87,5	89	91.1	92.3	93.4	94.6
8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83	77.83	80.22	82.62	85.01
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	88,5	90,5	91	91,5	92	89,50	90,50	91,00	92,00
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95	96	97	98	99
11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,9	63,9	70,9	78	85	64	71	78	85
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97	88	91	94	97
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70	57	61	66	70
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	78	80	81	82	74	76	78	80

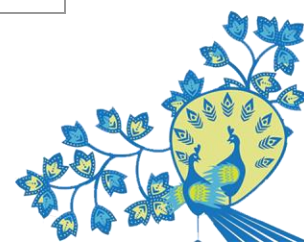


Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Target Kinerja (Menjadi)			
	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,7	3,75	3,81	4,16	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55
16. Persentase UMKM yang memenuhi standar						-	77	79	81
SK5. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83	92	93.8	95.7	97.6
18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	42	62	82	104	42	76	112	150
19. Jumlah desa pangan aman	9	19	28	37	47	19	28	37	47
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	8	13	18	23	8	13	18	23
SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94	100	100	100	100
22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	84	86	88	90	100	100	100	100
SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
23. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74	78	82	86	90	65	67	69	71
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal									
24. Indeks RB BBPOM di Bandung	91	92	93	94	95	82.8	83.8	84.8	85.8
25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81	85	90	91	92	83	85.5	88	90.5
SK9. Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal									
26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	77	80	82	85	79	80	81	82
SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan									
27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	79	81	85	90	79	84	89	94
28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3	2	2.25	2.5	3
SK11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel									
29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93	94	95	96	97	95.1	95.3	95.6	95.9
30. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (95%)	-	-	-



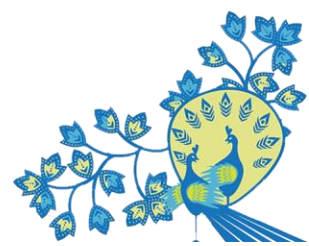
LAMPIRAN 2
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2021 (REVISI)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	97
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	70
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	71
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91.1
		8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77.83
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	89,50
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	64
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	4,35
		16. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	92
		17. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	42
		18. Jumlah desa pangan aman	19
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	19. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8
		20. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		22. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
8.		23. Indeks RB BBPOM di Bandung	82.8



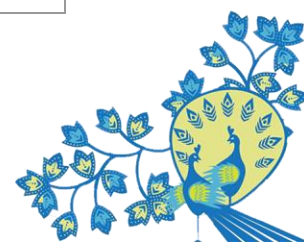
LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR POM DI BANDUNG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	24. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	83
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	25. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	79
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	26. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
		27. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	28. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95.1
		29. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisiensi (95%)



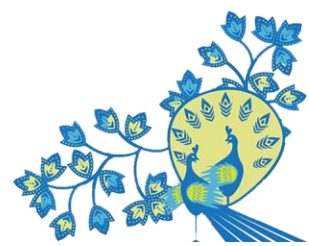
LAMPIRAN 3
PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2021 (REVISI)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	30. Persentase Obat yang memenuhi syarat	97
		31. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		32. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95
		33. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70
		34. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	70
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	35. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	71
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	36. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91.1
		37. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77.83
		38. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	89,50
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	39. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96
		40. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	64
		41. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		42. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
		43. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74
		44. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	4,35
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	45. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92
		46. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	42
		47. Jumlah desa pangan aman	19
		48. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	49. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		50. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	51. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
8.		52. Indeks RB BBPOM di Bandung	82.8



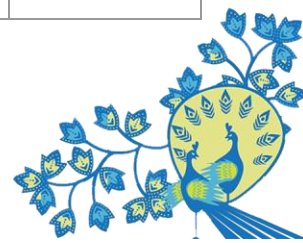
LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR POM DI BANDUNG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	53. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	83
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	54. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	79
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	55. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
		56. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	57. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95.1
		58. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisiensi (95%)



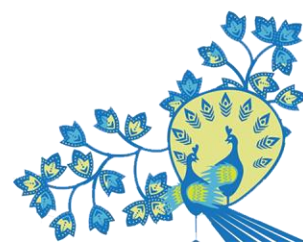
LAMPIRAN 4
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						ANGGARAN (Rp)
			B03	B06	B09	B10	B11	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6%	83,6%	83,6%	97%	97%	97%	412.453.800,-
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	80%	80%	80%	80%	80%	89/641.500,-
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91%	91%	91%	94%	94%	94%	212.476.200,-
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73%	73%	73%	70%	70%	70%	48.268.500,-
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat				70%	70%	70%	24.330.000,-
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu						71	116.652.000,-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan						91,1	91.667.000,-
		8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan						77,83	52.270.000,-
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung						89,50	129.270.000,-
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	89%	89%	96%	96%	96%	18.900.000,-
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,9%	63,9%	63,9%	64%	64%	64%	3.540.000,-
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88%	88%	88%	88%	88%	88%	655.120.000,-
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	55%	55%	57%	57%	57%	569.809.000,-
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78%	78%	78%	74%	74%	74%	758.120.000,-
		15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung						4,35	60.911.000,-
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	16. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,18	89,18	89,18	92	92	92	5.604.012.000,-
		17. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	0%	40%	55%	55%	55%	42	345.620.000,-
		18. Jumlah desa pangan aman	0%	25%	40%	40%	40%	19	726.561.000,-



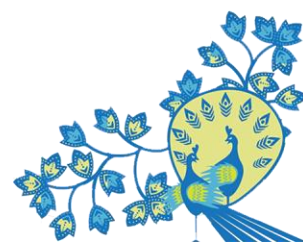
LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR POM DI BANDUNG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						ANGGARAN (Rp)
			B03	B06	B09	B10	B11	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	
		19. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	5%	60%	70%	70%	70%	8	171.259.000,-
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	20. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	17,5%	37,5%	62,5%	100%	100%	100%	889.680.000,-
		21. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	22,5%	42,5%	65%	100%	100%	100%	434.043.000,-
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	22. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	46%	60%	68%	65%	65%	65%	999.603.000,-
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	23. Indeks RB BBPOM di bandung						82,8	694.155.000,-
		24. Nilai AKIP BBPOM di Bandung						83	17.214.000,-
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	25. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung						79	22.480.179.000,-
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	26. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP						79%	10.445.978.000,-
		27. Persentase pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	0,5	1	1,5	2	2	2	482.904.000,-
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	28. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	24	48	72	95,1	95,1	95,1	83.208.000,-
		29. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisiensi (92%)	Efisiensi (92%)	Efisiensi (92%)	Efisiensi (95%)	Efisiensi (95%)	Efisiensi (95%)	3.872.924.000,-



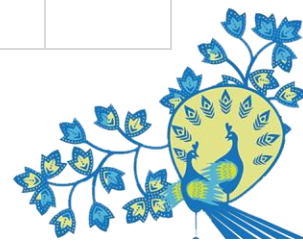
LAMPIRAN 5
PENGUKURAN KINERJA SASARAN KEGIATAN
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2021	Target TW IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW IV	Capaian Terhadap Target Tahun 2021		
				Tahun 2021						
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
Stakeholder Perspective										
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.00%	97.00%	1257	1311	95.88%	98.85%	98.85%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.00%	80.00%	424	487	87.06%	108.83%	108.83%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94.00%	94.00%	629	684	91.96%	97.83%	97.83%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70.00%	70.00%	198	267	74.16%	105.94%	105.94%
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	70.00%	70.00%	92	150	61.33%	87.62%	87.62%
NPS SK 1							99,81%	99,81%		
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	71.00	71.00	-	-	78.33	110.32%	110.32%
NPS SK 2							110.32%	110.32%		
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91.1	91.1	-	-	86.40	94.84%	94.84%
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	77.83	77.83	-	-	69.12	88.81%	88.81%
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89.5	89.5	-	-	93.27	104.21%	104.21%
NPS SK 3							95,95%	95,95%		
Capaian Perspective stakeholder							102	102		
Internal Process Perspective										
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	10	Persentase keputusan/rekomen dari hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96.00%	96.00%	489.00	513.00	92.10%	95.94%	95.94%



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR POM DI BANDUNG

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2021	Target TW IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW IV	Capaian Terhadap Target Tahun 2021
					Tahun 2021				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi		
pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Persentase keputusan/rekomen dari hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	64.00%	64.00%	524.00	843.00	56.14%	87.72%	87.72%
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88.00%	88.00%	2749	2705	101.63%	115.48%	115.48%
	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57.00%	57.00%	158	309	51.13%	89.71%	89.71%
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74.00%	74.00%	934	1084	86.16%	116.44%	116.44%
	15	Indeks Pelayanan Publik	4.35	4.35	-	-	4.48	102.99%	102.99%
NPS SK 4								101,38%	101,38%
5 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	16	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.00	92.00	-	-	91.35	99.29%	99.29%
	17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	42.00	42.00	-	-	42.00	100.00%	100.00%
	18	Jumlah desa pangan aman	19.00	19.00	-	-	19.00	100.00%	100.00%
	19	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8.00	8.00	-	-	8.00	100.00%	100.00%
NPS SK 5								99,82%	99,82%
6 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00 %	100.00 %	-	-	87.03%	87.03%	87.03%
	21	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00 %	100.00 %	-	-	91.82%	91.82%	91.82%
NPS SK 6								89,42%	89,42%
7 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65.00%	65.00%	-	-	83.40%	128.32%	128.32%
NPS SK 7								128.32%	128.32%
Capaian Internal Process Perspective									
Learning & Growth Perspective									
8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	23	Indeks RB UPT	82.8	82.8	-	-	82.66	99.83%	99.83%
	24	Nilai AKIP UPT	83.00	83.00	-	-	-	-	-
NPS SK 8									
9 Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	25	Indeks Profesionalitas ASN UPT	79.00	79.00	-	-	84.78	107.32%	107.32%



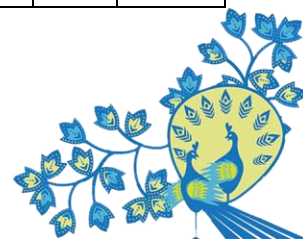
LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR POM DI BANDUNG

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2021	Target TW IV	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW IV	Capaian Terhadap Target Tahun 2021	
					Tahun 2021					
					Pembilang	Penyebut	Realisasi			
					NPS SK 9			107.32%	107.32%	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	26	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79.00%	79.00%	-	-	76.50%	96.84%	96.84%
		27	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.00	2.00	-	-	1.05	52.50%	52.50%
					NPS SK 10			74,67%	74,67%	
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	28	Nilai Kinerja Anggaran UPT	95.10	95.10	-	-	90.78	95.46%	95.46%
		29	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95.00	95.00					
					NPS SK 11					
					Capaian Learning & Growth Perspective					
					NPS TOTAL					



LAMPIRAN 6
TINGKAT EFISIENSI SASARAN KEGIATAN
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2021

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.00%	95.88%	98.85	412,453,800	411,510,190	99.77	0.99	-0.01	100%
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.00%	87.06%	108.83	89,641,500	89,580,555	99.93	1.09	0.09	100 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94.00%	91.96%	97.83	212,476,200	211,990,098	99.77	0.98	-0.02	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70.00%	74.16%	105.94	48,268,500	48,235,684	99.93	1.06	0.06	100 %
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	70.00%	61.33%	87.62	24,330,000	24,159,050	99.30	0.88	-0.12	75 %
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	71	78.33	110.32	300,829,000	296,325,760	98.50	1.12	0.12	100 %
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91.1	86.40	94.84	91,667,000	91,666,800	100.00	0.95	-0.05	75 %
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	77.83	69.12	88.81	52,270,000	52,270,000	100.00	0.89	-0.11	75 %
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89.5	93.27	104.21	129,270,000	129,270,000	100.00	1.04	0.04	100 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96.00%	92.10%	95.94	18,900,000	18,900,000	100.00	0.96	-0.04	75 %
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	64.00%	56.14%	87.72	3,540,000	3,540,000	100.00	0.88	-0.12	75 %
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88.00%	101.63%	115.48	669,260,000	664,260,477	99.25	1.16	0.16	100 %
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57.00%	51.13%	89.71	569,809,000	569,803,200	100.00	0.90	-0.10	75 %
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74.00%	86.16%	116.44	758,120,000	758,110,000	100.00	1.16	0.16	100 %
15	Indeks Pelayanan Publik	4.35	4.48	102.99	60,911,000	60,911,000	100.00	1.03	0.03	100 %
16	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92	91.35	99.29	5,419,835,000	5,370,004,450	99.08	1.00	0.00	100 %
17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	42	42	100.00	345,620,000	334,528,060	96.79	1.03	0.03	86%
18	Jumlah desa pangan aman	19	19	100.00	726,561,000	722,616,675	99.46	1.01	0.01	100 %



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR POM DI BANDUNG

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8	8	100.00	171,259,000	170,707,508	99.68	1.00	0.00	100 %
20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00%	87.03%	87.03	889,680,000	887,925,475	99.80	0.87	-0.13	75 %
21	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00%	91.82%	91.82	434,043,000	432,674,680	99.68	0.92	-0.08	75 %
22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65.00%	83.40%	128.32	999,603,000	997,418,917	99.78	1.29	0.29	95 %
23	Indeks RB UPT	82.8	82.66	99.83	745,444,000	743,685,460	99.76	1.00	0.00	100 %
24	Nilai AKIP UPT	83			18,414,000	18,412,240	99.99	0.00	-1.00	75 %
25	Indeks Profesionalitas ASN UPT	79	84.78	107.32	22,492,534,000	22,434,630,532	99.74	1.08	0.08	100 %
26	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79.00%	76.50%	96.84	10,362,905,000	10,338,616,079	99.77	0.97	-0.03	75 %
27	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	1.05	52.50	482,804,000	482,617,489	99.96	0.53	-0.47	75 %
28	Nilai Kinerja Anggaran UPT	95.1	90.78	95.46	77,848,000	74,918,319	96.24	0.99	-0.01	75 %
29	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95		0.00	3,882,473,000	3,875,893,936	99.83	0.00	-1.00	75 %
TOTAL										



LAMPIRAN 7
TINGKAT EFISIENSI RINCIAN OUTPUT
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2021

No	Rincian Output	Volume			Anggaran			IE	TE	KATEGORI
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)			
a	b	c	d	$e=(d/cx100)$	f	g	$h=(g/fx100)$	$i=e/h$	i	j
1	3165.ADD.001 - Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100.00	2,658,257,000	2,632,193,131	99.02	1.01	0.01	EFISIEN
2	3165.AEA.001 - Laporan Kegiatan Dukungan Investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	1	1	100.00	81,159,000	80,873,405	99.65	1.00	0.00	EFISIEN
3	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh BB/BPOM	7	7	100.00	592,787,000	591,183,300	99.73	1.00	0.00	EFISIEN
4	3165.BDC.001-KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	18,000	23,174	128.74	5,720,664,000	5,666,330,210	99.05	1.30	0.30	EFISIEN
5	3165.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100.00	1,320,407,000	1,314,424,036	99.55	1.00	0.00	EFISIEN
6	3165.BMB.001-Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	26	26	100.00	129,270,000	129,270,000	100.00	1.00	0.00	EFISIEN
7	3165.CAB.001 - Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100.00	6,199,633,000	6,199,072,663	99.99	1.00	0.00	EFISIEN
8	3065.CAB.002 - Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	1	100.00	271,697,000	270,218,860	99.46	1.01	0.01	EFISIEN
9	3165.CAB.003 - Layanan Prasarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100.00	1,673,155,000	1,672,094,262	99.94	1.00	0.00	EFISIEN
10	3165.QCD.U02 - Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPPOM	10	10	100.00	918,444,000	916,545,512	99.79	1.00	0.00	EFISIEN
11	3165.QDB.001 - Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	42	42	100.00	345,620,000	334,528,060	96.79	1.03	0.03	EFISIEN
12	3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	19	19	100.00	726,561,000	722,616,675	99.46	1.01	0.01	EFISIEN
13	3165.QDB.003 - Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	8	8	100.00	171,259,000	170,707,508	99.68	1.00	0.00	EFISIEN
14	3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	753	754	100.13	542,770,000	541,828,219	99.83	1.00	0.00	EFISIEN
15	3165.QIA.005 - Sampel Obat, Obat Bahan Alam Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai Standar oleh BB/BPOM	1,995	1,995	100.00	1,514,610,000	1,511,425,763	99.79	1.00	0.00	EFISIEN
16	3165.QIA.008 - Sampel Pangan Fortifikasi yang diperiksa oleh BB/BPPOM	150	150	100.00	53,513,000	51,325,750	95.91	1.04	0.04	EFISIEN
17	3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	302	309	102.32	588,049,000	588,043,200	100.00	1.02	0.02	EFISIEN
18	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	1,069	1,084	101.40	814,590,000	814,580,000	100.00	1.01	0.01	EFISIEN
19	6384.EAA.004 - Layanan Perkantoran UPT	1	1	100.00	26,168,324,000	26,106,426,080	99.76	1.00	0.00	EFISIEN
TOTAL				101.72	50,490,769,000	50,313,686,634	99.65	1.02	0.02	EFISIEN

